

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

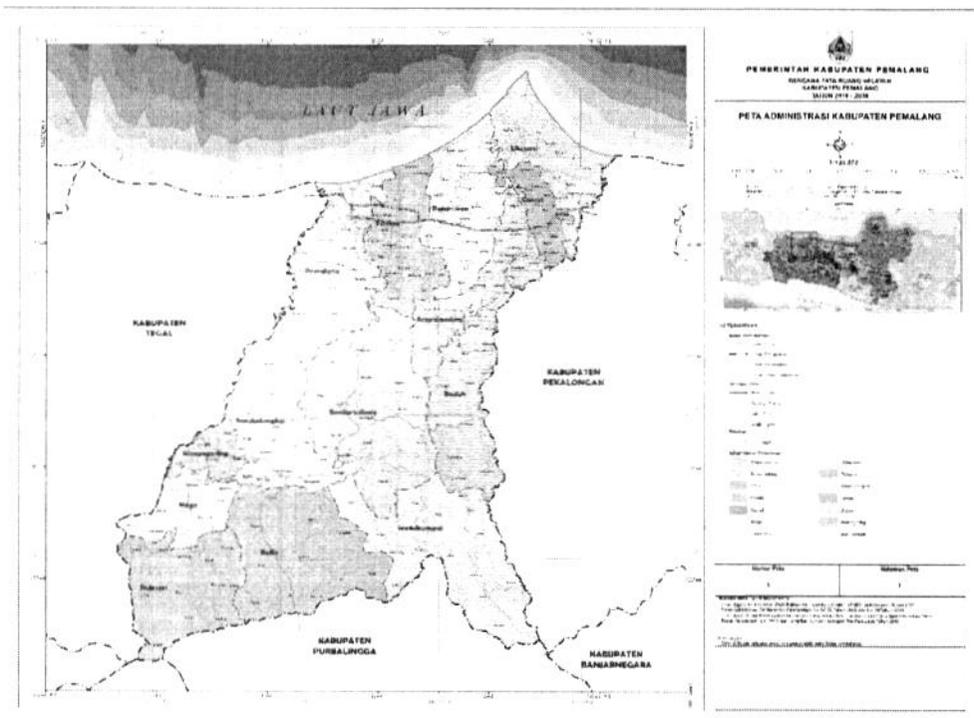
2.1.1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Kabupaten Pemalang terletak pada $109^{\circ} 11' 13.452'' - 109^{\circ} 35' 45.969''$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ} 46' 22.17'' - 7^{\circ} 14' 55.879''$ Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah 1.115,30 Km².

Secara administratif Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut:



Sumber : Peta RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 - 2038.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa dengan ibu kota di kawasan perkotaan Pemalang. Lokasi Kabupaten Pemalang sangat strategis karena berada pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta – Cirebon – Semarang – Surabaya. Kabupaten Pemalang dilintasi oleh jalur transportasi utama, sebagai berikut :

- Jalan Tol Trans Jawa (Trase Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang)
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Cirebon
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan serta 1 (satu) desa persiapan di wilayah Kecamatan Belik. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu mencapai 139,19 Km² (12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu seluas 26,31 Km² (2,36%).

Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pemalang

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase
1	Moga	10	41.40	3.71
2	Warungpring	6	26.31	2.36
3	Pulosari	12	87.52	7.85
4	Belik	12	124.54	11.17
5	Watukumpul	15	129.02	11.57
6	Bodeh	19	85.98	7.71
7	Bantarbolang	17	139.19	12.48
8	Randudongkal	18	90.32	8.10
9	Pemalang	20	101.93	9.14
10	Taman	21	67.41	6.04
11	Petarukan	20	81.29	7.29
12	Ampelgading	16	53.30	4.78
13	Comal	18	26.54	2.38
14	Ulujami	18	60.55	5.43
Jumlah		222	1,115.30	100.00

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2021

2.1.2. Topografi

Secara topografis Kabupaten Pemalang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Daerah Dataran Pantai: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter di atas permukaan air laut (dpl); meliputi 17 desa dan 2 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
2. Daerah Dataran Rendah: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter dpl yang meliputi 69 desa dan 9 kelurahan di bagian selatan dari Daerah Dataran Pantai.
3. Daerah Dataran Tinggi: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter dpl yang meliputi 77 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.

4. Daerah Pegunungan yang terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter dpl, meliputi 39 desa yang terletak di bagian selatan.
 - b. Daerah berketinggian 925 meter dpl, meliputi 9 desa yang terletak di bagian selatan.

Secara rinci ketinggian wilayah di Kabupaten Pemalang berdasarkan letak ibu kota kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Pemalang berdasarkan Ibu Kota Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah (mdpl)
1.	Moga	497
2.	Warungpring	213
3.	Pulosari	914
4.	Belik	738
5.	Watukumpul	559
6.	Bodeh	15
7.	Bantarbolang	34
8.	Randudongkal	212
9.	Pemalang	6
10.	Taman	6
11.	Petarukan	8
12.	Ampelgading	13
13.	Comal	9
14.	Ulujami	6

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021.

Kenampakan bentang alam wilayah Kabupaten Pemalang merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan lereng beragam mulai 0 % sampai lebih dari 40 % dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0 – 8 %
Berada di seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Ulujami dan Comal, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading dan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.
2. Kemiringan 8 – 15%
Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang, sebagian di wilayah Kecamatan Pulosari dan Belik, sebagian kecil di Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Ampelgading, Taman dan Pemalang.
3. Kemiringan 15 – 25%
Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh dan Moga, sebagian kecil di Kecamatan Pemalang dan Ampelgading

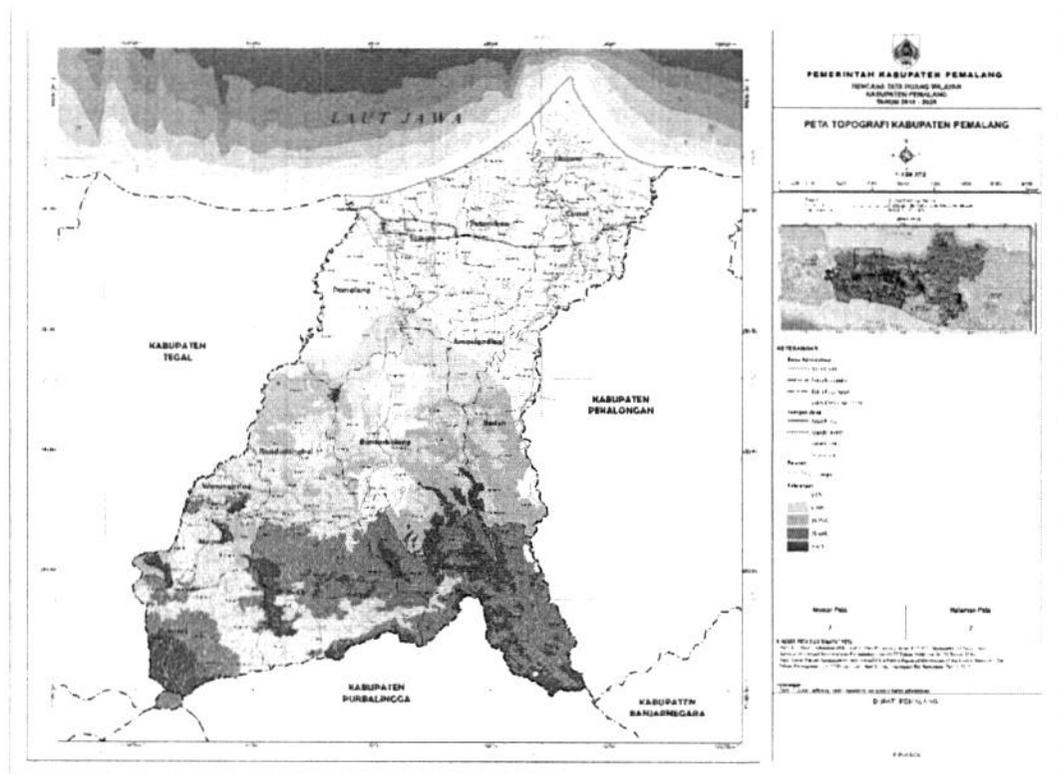
4. Kemiringan 25 – 40%

Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Warungpring.

5. Lebih dari 40%

Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Bantarbolang, Moga dan Warungpring.

Peta kemiringan lahan Kabupaten Pemalang terlihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pemalang

2.1.3. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Pemalang meliputi gambaran: jenis tanah, struktur geologi, dan gerakan tanah yang mempengaruhi lingkungan fisik di wilayah ini.

1. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik, dengan rincian:

- a. Jenis tanah aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Taman Petarukan, Pemalang, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.

- b. Jenis tanah litosol dan kompleksnya terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
- c. Jenis tanah latosol dan sejenisnya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.

2. Struktur Geologi

Struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, formasi tapak, formasi rambatan, lava Gunung Slamet dan formasi halang.

- a. Struktur aluvium terdapat di Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, bagian utara dan Bodeh.
- b. Formasi tapak terdapat di Kecamatan Pemalang bagian utara, Ampelgading, Bodeh dan bagian selatan Kecamatan Bantarbolang.
- c. Formasi rambatan terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik, Watukumpul, bagian utara Kecamatan Bodeh, dan sebagian Kecamatan Randudongkal.
- d. Struktur batuan produk gunung api – tak terpisahkan terdapat disebagian besar Kecamatan Randudongkal.
- e. Struktur batuan produk gunung api – lava terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik dan Pulosari.
- f. Formasi halang terdapat di sebagian besar Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Pulosari.

3. Gerakan Tanah

Wilayah Kabupaten Pemalang mempunyai potensi bencana geologi gerakan tanah yaitu:

a. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah:

Seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Comal dan Ulujami, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman dan Ampelgading, sebagian wilayah Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.

b. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah:

Sebagian besar di wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal, Warungpring dan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pulosari, Belik, Pemalang, Taman dan Ampelgading.

c. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah:

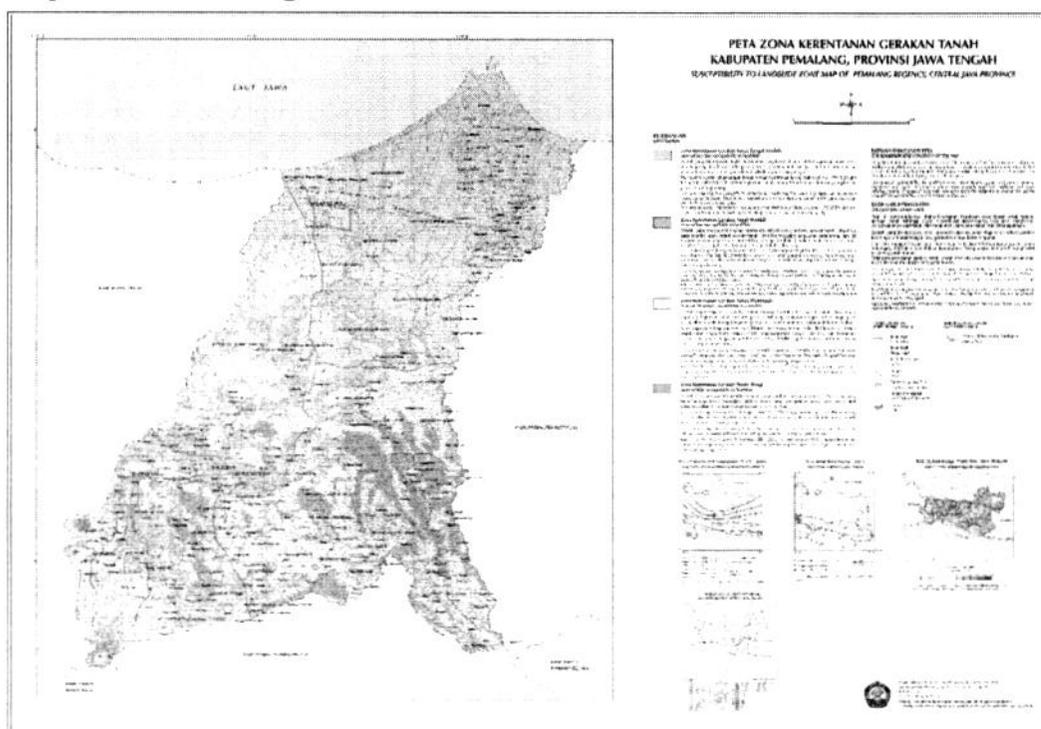
Sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, sebagian di wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan Moga, sebagian kecil di wilayah Kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Warungpring.

d. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi:

Sebagian di wilayah Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Belik dan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Moga

Hal tersebut diatas disebabkan oleh struktur batuan/ geologi, jenis tanah, gerakan vulkanis/ aktifitas gunung berapi dan sesar. Sesar terdapat di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Bantarbolang dan Randudongkal. Disamping itu terdapat Sesar naik di Kecamatan Watukumpul dan sesar geser di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal.

Berikut adalah Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang:



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Gambar 2.3 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang

2.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sumber air, yaitu:

1. Air Permukaan

Wilayah Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Comal yang memiliki anak sungai sekitar 85 buah yang mengalir dari hulu sungai di kaki Gunung Slamet sampai hilir bermuara di Laut Jawa. Sungai Comal merupakan sungai yang paling besar pengaruhnya di Kabupaten Pemalang dengan lebar lebih dari 15 meter dan panjang sekitar 91 Km. Wilayah yang dialiri Kecamatan Moga, Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Comal dan Ulujami.

Sedangkan sungai besar lainnya yang cukup berpengaruh adalah :

- a. Sungai Waluh: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 56.1 Km di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Taman
- b. Sungai Layangan: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 8,9 Km di Kecamatan Bodeh
- c. Sungai Polaga: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 33.3 Km di Kecamatan Belik, Watukumpul dan Bantarbolang
- d. Sungai Lumeneng: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 20.4 Km di Kecamatan Watukumpul dan Bantarbolang
- e. Terdapat sekitar 85 sungai dengan lebar kurang dari 10 meter yang tersebar dari daerah hulu sampai hilir
- f. Disamping itu terdapat Sungai Rambut yang sebagian besar alirannya menjadi perbatasan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal.

2. Mata Air

Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber air berupa mata air yang tersebar di beberapa tempat. Beberapa sumber mata air yang selama ini telah dimanfaatkan oleh PDAM, antara lain:

- a. Mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur/ Desa Persiapan Sodong Besari Kecamatan Belik. debit 1200 Lt/detik, dimanfaatkan 400 Lt/detik kondisi tidak terpengaruh musim.
- b. Mata Air Moga lokasi di Desa Moga Kecamatan Moga dengan debit maksimal 750 Lt/detik dimanfaatkan 200 Lt/detik.
- c. Mata Air Sumur Wadon Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal debit maksimal 200 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/ detik.
- d. Mata Air Suci di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 150 Lt/detik dimanfaatkan 10 Lt/detik.
- e. Mata Air Cipete di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 75 Lt/detik dimanfaatkan 35 Lt/detik

- f. Mata Air Cipanas Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 75 Lt/detik dimanfaatkan 37.50 Lt/detik
- g. Mata Air Si Cipluk Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 30 Lt/detik dimanfaatkan 7.50 Lt/detik
- h. Mata Air Bulakan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 32 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/detik
- i. Mata Air Kemiri Dukuh Sodong Desa Sikasur Kec Belik debit maksimal 30 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/detik
- j. Mata Air Kebanggan di Desa Kebanggan Kecamatan Moga debit Maksimal 300 Lt/detik dimanfaatkan 150 Lt/detik

3. Air Tanah

Sumber air tanah di Kabupaten Pemalang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Air Tanah Dangkal

Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, pada daerah dekat pantai kualitas kurang baik karena bersifat payau. Ketersediaan air tanah dangkal sangat dipengaruhi air hujan.

b. Air Tanah Dalam berupa Cekungan Air Tanah (CAT)

Terdapat 2 (dua) CAT yaitu CAT Bumiayu meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pulosari, Moga, Warungpring dan Randudongkal dan CAT Pekalongan – Pemalang meliputi daerah Pantura Pemalang sampai dengan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh dan Bantarbolang.

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun: yakni musim penghujan dan musim kemarau, dengan suhu rerata berkisar antara 24°C sampai dengan 31°C.

Jumlah hari hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mencapai rata – rata 159 yang terpantau dari 18 stasiun pemantau hujan. Jumlah hari hujan terendah pada bulan Juli dan Agustus rata-rata hanya 4 hari, sedangkan tertinggi pada bulan Desember sejumlah 23 hari hujan.

Jumlah curah hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mencapai 355 mm yang terpantau dari rata – rata 18 stasiun pemantau. Adapun bulan dengan curah hujan paling rendah adalah bulan Agustus sebesar 28mm. Sedangkan curah hujan paling tinggi pada bulan Februari sebesar 759 mm.

Jumlah hari hujan dan curah hujan per bulan di Kabupaten Pemalang dirinci berdasarkan masing-masing stasiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Hari Hujan Perbulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No.	Stasiun	Hari Hujan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Kejene	21	25	20	16	9	8	5	0	6	13	16	20	159
2	Warungpring	22	25	23	18	12	12	6	5	8	17	18	26	192
3	Kecepit	22	25	22	21	14	7	4	4	8	14	19	23	183
4	Randudongkal	21	24	19	17	11	7	5	4	5	11	18	22	164
5	Nambo	22	19	18	17	11	6	5	4	6	13	16	22	159
6	Moga	20	16	18	15	13	7	2	1	4	12	17	13	138
7	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Belik	29	23	29	24	16	20	7	6	14	28	26	29	251
9	Banjardawa	18	20	18	11	7	0	2	4	2	5	10	16	113
10	Sungapan	21	24	20	20	10	4	3	5	7	11	18	23	166
11	Karangsuci	19	23	18	20	10	4	3	5	7	12	18	23	162
12	Klareyan	18	21	17	14	8	2	6	4	4	3	12	18	127
13	Karangtengah	15	17	18	11	7	1	4	3	5	8	12	22	123
14	Sokawati	20	23	21	18	9	3	6	3	11	12	16	20	162
15	Bantarbolang	19	23	18	15	9	7	4	0	7	14	20	24	160
16	Pedagung	21	17						0	0	14	22	24	98
17	Watukumpul	25	24	28	24	15	12	3	4	7	21	20	26	209
18	Sipedang	27	24	28	24	17	15	3	5	7	22	20	28	220
19	Bongas	26	24	29	24	18	14	5	5	9	23	20	29	226
	Rata - Rata	21	22	21	18	12	8	4	4	7	14	18	23	159

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021.



Tabel 2.4 Curah Hujan Perbulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No.	Stasiun	Curah Hujan (mm)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kejene	794	627	455	384	304	57	70	R	142	142	236	381
2	Warungpring	741	570	756	436	244	100	74	35	111	190	240	689
3	Kecepit	513	853	646	503	246	35	81	50	112	185	360	561
4	Randudongkal	469	874	544,5	583	245	44	50	25	131	229	409	665
5	Nambo	586	649	344	468	360	78	89	37	116	239	436	609
6	Moga	927	1339	746	428	467	199	75	30	144	494	963	345
7	Pulosari	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8	Belik	737	830	1118	546	471	279	112	46	148	832	1134	1606
9	Banjardawa	206	323	260	41	92	R	35	18	13	58	174	354
10	Sungapan	438	515	341	215	118	62	50	32	131	149	290	523
11	Karangsucu	434	544	260	232	118	60	50	31	129	179	289	513
12	Klareyan	580	952	319	170	300	54	97	20	51	21	106	445
13	Karangtengah	534	522	370	166	190	39	41	53	85	57	156	442
14	Sokawati	572	539	373	333	77	44	57	12	179	277	227	311
15	Bantarbolang	536	794	456	242	216	113	176	R	254	355	46	533
16	Pedagung	589	754	R	R	R	R	R	R	R	284	541	635
17	Watukumpul	796	1039	888	442	273	87	27	25	42	411	573	1312
18	Sipedang	854	920	826	481	180	296	22	27	46	416	610	932
19	Bongas	947	1022	1034	519	32	152	30	28	61	481	654	1157
	Rata - Rata	625	759	573	364	247	105	67	28	111	278	436	667

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang sekitar 32% berupa sawah, lebih dari 80% berupa sawah irigasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian lahan sawah menjadi salah satu aktifitas ekonomi masyarakat yang dominan. Adapun penggunaan lahan untuk bangunan dan pekarangan sekitar 20% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Pemalang. Disamping itu terdapat penggunaan lahan berupa tambak di kawasan pesisir yang secara ekonomi cukup berpengaruh. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan (Km2)							Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah						
		Bangunan & Pekarangan	Tegalan/ Kebun	Hutan Rakyat	Tambak/ Kolam	Perkebunan	Lain-Lain	
Moga	12,51	11,78	7,00	0,55	2,48	1,90	5,18	41,40
Warungpring	8,86	9,02	3,85	1,81	0,88	0,65	1,25	26,31
Pulosari	2,40	10,11	41,29	12,4	0,68	0,75	31,04	87,52
Belik	24,74	23,49	28,11	3,84	0,03	1,12	43,21	124,54
Watukumpul	33,26	16,98	18,62	6,27	0,05	0	53,85	129,02
Bodeh	26,50	15,23	7,41	0	2,45	0	34,40	90,32
Bantarbolang	26,96	18,93	21,06	3,65	0	0	68,59	139,19
Randudongkal	33,63	13,79	9,83	0,94	0	1,01	31,12	90,32
Pemalang	41,23	17,08	6,82	0	2,14	0	34,67	101,93
Taman	37,62	17,39	1,45	0	3,01	0,07	7,87	67,41
Petarukan	52,52	24,78	3,1	0	0,89	0	0	81,29
Ampelgading	12,15	13,26	0,76	0,37	0	0	0	26,54
Comal	28,58	9,13	0,54	0	0	0	15,05	53,30
Ulujami	22,40	17,27	12,13	2,25	2,70	3	0	60,55
Jumlah	363,35	218,25	161,96	20,91	15,31	8,50	326,22	1.115,30

Sumber: Kab. Pemalang Dalam Angka 2019 (Data 2020 dan 2021 tidak ada)

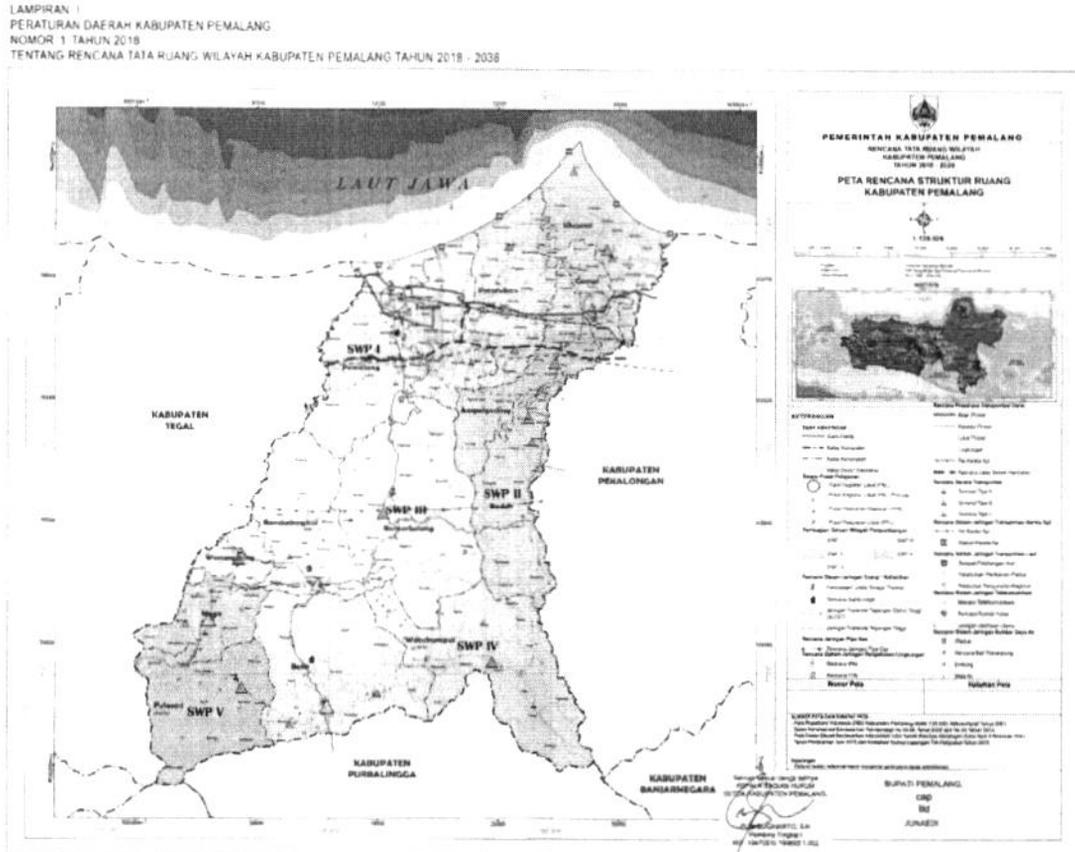
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, antara lain:

- pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah.
- pembangunan prasarana daerah.
- pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.
- pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- e. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah.
- f. pengembangan industri; pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir.
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan pengembangan kawasan strategis daerah.

Berikut peta rencana struktur ruang Kabupaten Pemalang

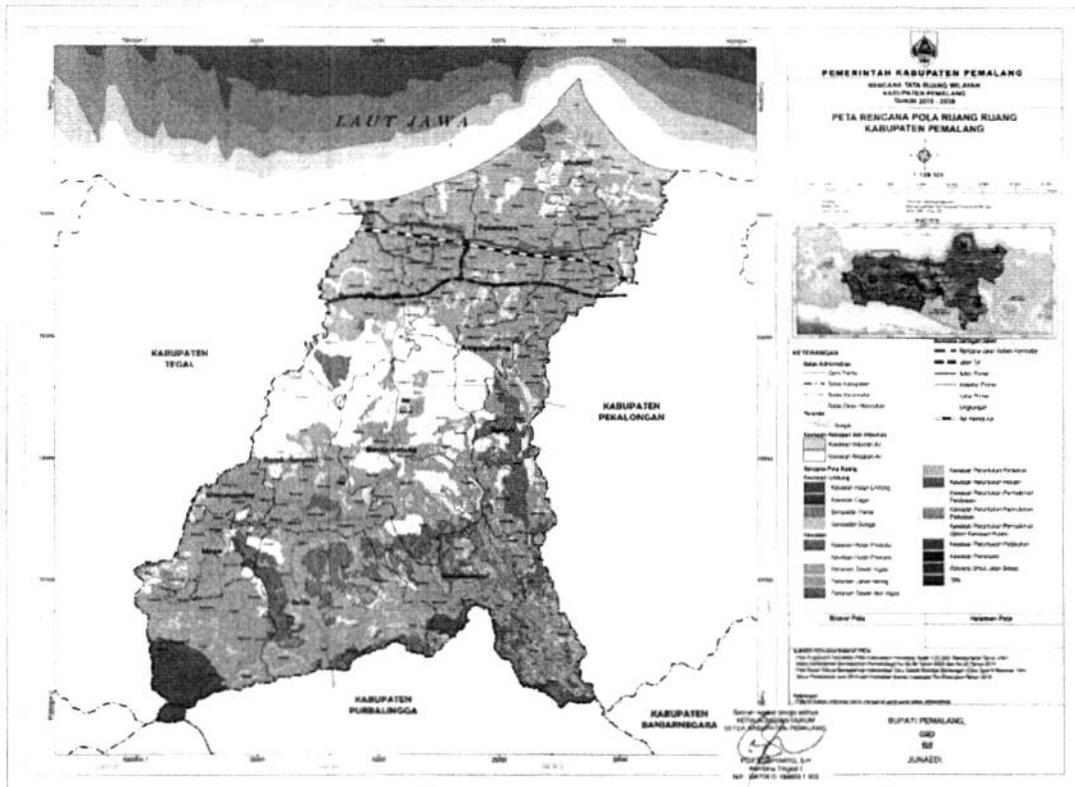


Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Berikut ini disampaikan peta pola ruang Kabupaten Pemalang

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 - 2038



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Wilayah Kabupaten Pemalang secara umum terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya:

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri atas:

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan yang dimaksud berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung, dengan luas \pm 5.395 hektar. Tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Bantarbolang, Belik, Moga, Pulosari, dan Watukumpul.

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan ini berupa kawasan resapan air, direncanakan luas \pm 7.589 hektar. Tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari, Randudongkal, Warungpring, dan Watukumpul.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan yang dimaksud terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi, dan ruang terbuka hijau perkotaan.

- Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari garis pantai, tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.
- Sempadan sungai meliputi sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, dan sungai yang terpengaruh pasang air laut. Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang dilalui Sungai Waluh beserta 45 anak sungai, Sungai Rambut beserta 15 anak sungai, Sungai Comal beserta 85 anak sungai.
- Sempadan saluran irigasi meliputi saluran irigasi bertanggung, saluran irigasi tidak bertanggung, saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing, saluran pembuangan irigasi, dan bangunan irigasi. Baik kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.
- Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan meliputi RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu. Rencana pengembangan seluas \pm 4.563 hektar di seluruh kawasan perkotaan yang berada pada 14 kecamatan.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan ini terdiri dari agar alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Cagar alam meliputi Cagar Alam Bantarbolang di Desa Kebongede dengan luas 24,1968 hektar, Cagar Alam Moga di Desa Banyumudal dengan luas 3,8824 hektar, dan Cagar Alam Curug Bengkawah di Desa Sikasur dengan luas 2,4867 hektar. Sedangkan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan antara lain :

- Situs Plawangan di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang;
- Gedung Badan Kesbangpol (Gedung Landraad), gedung SMA Negeri 3 Pemalang (Gedung MULO), gedung Dinas Perikanan, bekas Gedung Badan Kepegawaian Daerah (Gedung ELS), Kompleks Makam Masjid Agung Pemalang dan Kompleks Makam Yudhanegara di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang;
- Kompleks Makam Belanda di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang;
- Kompleks Pabrik Gula Sumberharjo di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang;
- Kompleks Dinas Kesehatan dan Kompleks Stasiun Kereta Api Pemalang di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang;
- Gedung Pegadaian Pemalang di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang;
- Gedung eks Koramil Taman di Kelurahan Beji Kecamatan Taman;
- Kompleks Stasiun Kereta Api Petarukan di Desa Serang Kecamatan Petarukan;
- Gedung UPPU Wilayah V dan Gedung eks Koramil Petarukan (eks Pabrik Gula Petarukan) di Kelurahan Petarukan;
- Gedung Pegadaian Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal;
- Kompleks Stasiun Kereta Api Comal di Desa Purwosari Kecamatan Comal;
- Kolam Renang Comal Baru di Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading;
- Situs Watu Tumpeng di Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal;
- Pos Penjagaan Kebun Kakao di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal;
- Watu Tugu (Menhir) di Desa Pepedan Kecamatan Moga;
- Kompleks PTPN IX Kebun Semugih, Gedung Polsek, Gereja Kristen Jawa Pendopo Kecamatan Moga dan Arca Ganesha di Pemandian Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga;
- Pendopo Kemantren di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring;

- Kubur Batu Prasejarah (Candi Arca) di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul;
 - Situs Gunung Jimat (Sigogok) di Desa Mendelem Kecamatan Belik;
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan yang dimaksud antara lain :

- Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi yang tersebar di 4 (empat) kecamatan.
 - Kawasan rawan banjir dan genangan di 10 (sepuluh) kecamatan.
 - Kawasan rawan kekeringan yang terdiri dari rawan kekeringan air bersih dan rawan kekeringan pertanian.
 - Kawasan rawan angin topan tersebar di 6 (enam) kecamatan.
 - Kawasan rawan tanah longsor meliputi 5 (lima) kecamatan.
 - Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi.
 - Kawasan rawan bencana lainnya meliputi kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- f. Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan ini mencakup kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Pulosari dan Belik yang berada di kaki Gunung Slamet. Serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbunan air tanah direncanakan dengan luas ± 2.376 hektar tersebar di 5 (lima) kecamatan antara lain Randudongkal, Warungpring, Moga, Pulosari, dan Belik. Sedangkan kawasan sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- g. Kawasan Lindung Lainnya
- Kawasan yang dimaksud berupa kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan dan perairan yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

2. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya-guna dan berhasil-guna bagi kehidupan manusia. Kawasan budidaya terdiri atas :

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan yang dimaksud direncanakan tetap seluas ± 27.373 hektar meliputi kawasan hutan produksi terbatas direncanakan seluas 10.530 hektar yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Pemalang, Bodeh, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul. Serta kawasan hutan produksi tetap direncanakan dengan luas ± 16.843 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Randudongkal, Warungpring, Belik, dan Watukumpul.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan ini mencakup kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering, dengan rincian:

- Kawasan lahan basah terdiri dari kawasan sawah irigasi direncanakan dengan luas ± 30.301 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Sedangkan kawasan sawah bukan irigasi direncanakan dengan luas ± 841 hektar meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Ampelgading, Bodeh, Warungpring, Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul.
- Kawasan lahan kering direncanakan dengan luas ± 22.114 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Pemanfaatannya dapat berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat, peternakan, perikanan, dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Sebagai upaya untuk melindungi kawasan peruntukan pertanian, maka ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit seluas ± 34.299 hektar meliputi :

- 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Paling sedikit ditetapkan seluas ± 30.299 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

- 2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Paling sedikit ditetapkan \pm 4.000 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

c. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan yang dimaksud adalah budi daya tambak, budi daya air tawar, fasilitas perikanan tangkap, dan pengolahan perikanan, meliputi:

- Budi daya tambak direncanakan seluas \pm 2.288 hektar meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.
- Budi daya air tawar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- Fasilitas perikanan tangkap berupa pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai dan TPI di Kecamatan Taman, dan peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan serta sarana dan prasarana TPI yang terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pemalang, Petarukan, dan Ulujami.
- Pengolahan perikanan meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan ini meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan pengusahaan panas bumi, meliputi:

- Pertambangan minyak dan gas bumi berupa daerah terbuka meliputi 9 (sembilan) kecamatan.
- Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan (pasir-batu, tanah urug dan tanah liat) dan mineral bukan logam serta batuan lainnya.
- Pengusahaan panas bumi berupa Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Panas Bumi Baturaden dan WKP Panas Bumi Guci berlokasi di kawasan sekitar Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari.

e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan ini merupakan tempat pemusatan kegiatan industri meliputi industri besar, menengah, dan kecil/ mikro, direncanakan dengan luas \pm 1.909 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading, Bantabolang, Randudongkal, Warungpring, Moga, dan Belik.

Pengembangan industri besar dan menengah direncanakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Industri besar dan menengah harus berlokasi di kawasan peruntukan industri atau berupa kawasan industri, yang meliputi sebagian wilayah dari 5 (lima) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, dan Randudongkal.

Sedangkan untuk industri kecil/ mikro dapat dikembangkan pada kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertanian lahan kering (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan atau pertambangan) dan kawasan peruntukan perikanan (untuk pengolahan hasil perikanan).

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan yang dimaksud terdiri dari pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan dengan rincian:

➤ Pariwisata alam meliputi :

- 1) Kawasan Wisata Pantai Widuri di Kecamatan Pemalang;
- 2) Kawasan Wisata Pantai Joko Tingkir dan Sumur Pandan di Kecamatan Petarukan;
- 3) Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami;
- 4) Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantabolang;
- 5) Kawasan Wisata Gunung Gajah dan kawasan arung jeram di Kecamatan Randudongkal;
- 6) Kawasan Wisata Telaga Silating, kawasan Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong, Curug Lawang dan Wanawisata Candi Batur di Kecamatan Belik;
- 7) Kawasan Wisata Wanawisata Cempaka Wulung dan Curug Sipedil di Kecamatan Moga;

- 8) Kawasan Wisata Telaga Rengganis dan Bukit Banowati di Kecamatan Watukumpul;
 - 9) Kawasan perbukitan dan jalur pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari;
 - 10) Kawasan pesisir, estuari dan hutan mangrove di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami;
- Pariwisata budaya meliputi :
- 1) gelar prosesi hari jadi Kabupaten;
 - 2) upacara tradisi menjamas pusaka peninggalan Syekh Pandanjati di Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang;
 - 3) Makam Syekh Maulana Syamsudin di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang;
 - 4) Makam Pangeran Benowo Di Desa Penggarit Kecamatan Taman;
 - 5) Makam Mbah Palintaran di Desa Bantarbolang;
 - 6) Makam Syekh Jambu Karang (Sigeseng) di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan;
 - 7) Makam Syekh Maulana Magribi di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
 - 8) Baritan/ sedekah laut tersebar di kawasan pesisir.
 - 9) Seni Kerangkeng, sintren, lais, jaran Kepang dan kuntulan.
- Pariwisata buatan meliputi :
- 1) Kawasan Wisata Gardu Pandang Gunung Slamet
 - 2) Taman Wisata Air Pantai Widuri
 - 3) Kawasan Wisata Moga
 - 4) Desa - desa Wisata

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan ini meliputi kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Berupa fasilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meliputi markas Komando Distrik Militer (Kodim) di Perkotaan Pemalang, markas Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan, dan pangkalan satuan Angkatan laut di Kecamatan Pemalang.

Juga fasilitas Kepolisian Republik Indonesia meliputi Kantor Kepolisian Resor (Polres) di Perkotaan Pemalang, Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan, dan Kantor Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Ulujami.

i. Kawasan Peruntukan Pelabuhan

Kawasan ini berupa kawasan Pelabuhan pengumpan regional yang berada di Kecamatan Pemalang.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis Kabupaten Pemalang beserta kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis yang melingkupinya menyebabkan terdapat kawasan yang berpotensi bencana. Kawasan terdampak peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi, yaitu kawasan pantai Kecamatan Pemalang (Desa Lawangrejo, Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Widuri, dan Desa Danasari), Kecamatan Taman (Desa Asemtoyong), Kecamatan Petarukan (Desa Nyamplungsari, Desa Klareyan, Desa Kendalrejo, dan Kecamatan Ulujami meliputi Desa Pesantren, Mojo, Limbangan, Ketapang, Blendung, Kaliprau, Kertosari, dan Tasikrejo).
2. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan, yaitu kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Bantarbolang, Watukumpul, dan Belik. Sedangkan kawasan rawan genangan meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami.

3. Kawasan Rawan Kekeringan yang dibedakan kekeringan air bersih dan kekeringan pertanian, dimana kekeringan air bersih meliputi Kecamatan Pulosari dan Belik sedangkan kekeringan pertanian meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ampelgading, Ulujami, dan Bodeh.
4. Kawasan Rawan Angin Topan, yaitu meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Warungpring, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Belik, dan Watukumpul.
5. Kawasan Rawan Tanah Longsor, meliputi Kecamatan Randudongkal, Moga, Pulosari, Watukumpul, Belik, serta meliputi kawasan sepanjang alur Sungai Comal, Sungai Waluh, Sungai Polaga, Sungai Lumeneng, Sungai Layangan, dan Sungai Rambut.
6. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi kawasan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik.
7. Kawasan Rawan Bencana Lainnya, meliputi kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang tersebar di daerah.

Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa di wilayah Kabupaten Pemalang juga terdapat kawasan rawan bencana gempa bumi. Hasil analisa resiko bencana gempa bumi di Kabupaten Pemalang menunjukkan 4 (empat) kecamatan memiliki kelas resiko sedang dan 10 (sepuluh) kecamatan memiliki resiko rendah. Kecamatan yang memiliki resiko bencana sedang yaitu Kecamatan Pemalang, Taman, Belik, dan Bodeh.

Wilayah Kabupaten Pemalang juga memiliki risiko bencana yang cukup tinggi seperti tanah longsor, angin kencang/topan, dan kebakaran. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pemalang termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi dengan skor 185 dan menempati urutan/rangking 5 (lima) di tingkat provinsi.

Peringkat kerawanan bencana di tingkat Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan frekuensi kejadian bencana alam yang cukup tinggi setiap tahunnya di Kabupaten Pemalang, terutama kejadian bencana tanah longsor, angin kencang/topan dan kebakaran yang menimbulkan dampak serta kerugian cukup besar di semua sektor.

Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dalam Tabel berikut:

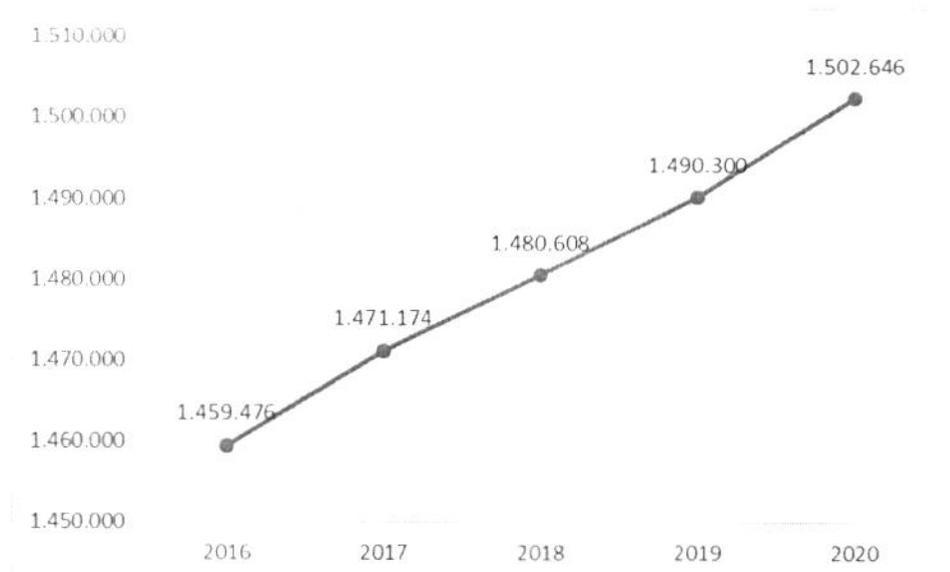
Tabel 2.6 Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Kejadian	Tahun					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Banjir	7	4	10	2	57	5
2	Banjir Bandang	1	1	3	2	4	1.4
3	Tanah Longsor	18	41	35	25	41	27.6
4	Puting Beliung	2	9	5	18	1	9
5	Kebakaran	38	82	40	62	32	55.6
6	Kekeringan	8	14	15	22	14	15.4
7	Hujan dan Angin	21	28	19	33	30	24
8	Angin Kencang	6	19	9	33	13	15.2
9	Tersambar Petir	2	2	3	3	4	2.4
10	Orang Tenggelam	5	8	6	3	6	6.4
11	Gempa	0	4	0	0	0	0.8
12	Bencana Lainnya	2	3	2	4	12	3.4
Jumlah		110	215	147	207	214	166.2

Sumber: BPBD Kab. Pemalang 2021

2.1.9. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebesar 1.502.646 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2021

Gambar 2.6 Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mencapai 1.502.646 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 764.805 jiwa (50,90%) dan jumlah penduduk perempuan sebesar 737.841 jiwa (49,10%). Rasio jenis kelamin selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 103,7% per tahun, sedangkan kepadatan penduduk tahun 2020 sebesar 1.347 jiwa/km² dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.336 jiwa/km², secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	1.459.476	1.471.174	1.480.608	1.490.300	1.502.646
2.	Laki-laki (jiwa)	744.979	750.772	754.212	758.287	764.805
3.	Perempuan (jiwa)	714.497	720.402	726.396	732.013	737.841
4.	Rasio Jenis kelamin (%)	104,27	104,22	103,8	103,6	103,7
5.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	1.309	1.319	1327,53	1.336	1.347

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2021

Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata, yaitu terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah

penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Petarukan. Jumlah penduduk pada ketiga kecamatan tersebut mencapai 573.184 jiwa, atau sebesar 38,14 % dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Pemalang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang per kecamatan 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	69.961	71.664	72.648	74.581	74.922
	Laki-laki	35.538	36.422	36.962	37.969	38.129
	Perempuan	34.423	35.242	35.686	36.612	36.793
2	Pulosari	54.417	58.032	61.265	61.064	61.852
	Laki-laki	27.732	29.617	31.091	31.063	31.411
	Perempuan	26.685	28.415	30.174	30.001	30.441
3	Belik	111.571	117.460	118.274	118.688	120.130
	Laki-laki	57.261	60.196	60.610	60.829	61.568
	Perempuan	54.310	57.264	57.664	57.859	58.562
4	Watukumpul	76.400	79.598	75.820	74.743	75.457
	Laki-laki	39.258	41.076	38.940	38.628	39.068
	Perempuan	37.142	38.522	36.880	36.115	36.389
5	Bodeh	62.383	61.728	62.928	63.237	63.470
	Laki-laki	31.830	31.535	32.090	32.244	32.345
	Perempuan	30.553	30.193	30.838	30.993	31.125
6	Bantarbolang	86.993	88.021	86.609	85.109	86.086
	Laki-laki	44.303	44.882	44.002	43.215	43.700
	Perempuan	42.690	43.139	42.607	41.894	42.386
7	Randudongkal	110.094	109.194	112.900	113.238	113.975
	Laki-laki	56.139	55.713	57.377	57.337	57.746
	Perempuan	53.955	53.481	55.523	55.901	56.229
8	Pemalang	202.355	198.640	202.944	206.100	208.127
	Laki-laki	102.975	101.024	103.284	104.738	105.843
	Perempuan	99.380	97.616	99.660	101.362	102.284
9	Taman	188.395	188.767	186.823	188.647	190.606
	Laki-laki	96.146	96.209	95.155	96.010	97.024
	Perempuan	92.249	92.558	91.668	92.637	93.582
10	Petarukan	161.378	164.250	171.127	172.986	174.451
	Laki-laki	82.436	83.769	87.180	87.939	88.757

	Perempuan	78942	80481	83947	85047	85694
11	Ampelgading	77.182	76.224	75.703	76.072	76.415
	Laki-laki	39.150	38591	38.167	38.272	38.393
	Perempuan	38032	37633	37536	37800	38022
12	Comal	97.057	94.724	94.996	96.249	96.358
	Laki-laki	49421	48188	48.191	48.652	48.792
	Perempuan	47636	46536	46805	47597	47566
13	Ulujami	117.146	118.602	114.499	115.168	116.151
	Laki-laki	60110	60829	58616	58710	59258
	Perempuan	57036	57773	55883	56458	56893
14	Warungpring	44.144	44.270	44.072	44.418	44.646
	Laki-laki	22680	22721	22547	22681	22771
	Perempuan	21464	21549	21525	21737	21875
	Jumlah	1.459.476	1.471.174	1.480.608	1.490.300	1.502.646

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2021

Untuk kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020, paling besar berada di Kecamatan Comal yang mencapai 3.631 jiwa/km² dan paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul yang mencapai 585 jiwa/km², secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemalang Per Kecamatan Tahun 2016-2020 (jiwa/km²)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	1.689	1731	1.754	1.801	1.810
2	Pulosari	622	663	700	698	707
3	Belik	896	943	950	953	965
4	Watukumpul	592	617	588	579	585
5	Bodeh	726	718	732	735	738
6	Bantarbolang	625	632	622	611	618
7	Randudongkal	1.219	1209	1.250	1.254	1.262
8	Pemalang	1.985	1949	1.991	2.022	2.042
9	Taman	2.795	2800	2.771	2.799	2.828
10	Petarukan	1.985	2021	2.105	2.128	2.146
11	Ampelgading	1.448	1430	1.420	1.427	1.434
12	Comal	3.657	3569	3.579	3.627	3.631
13	Ulujami	1.935	1959	1.891	1.902	1.918
14	Warungpring	1.678	1683	1.675	1.688	1.697
	Jumlah	1.309	1.319	1327,53	1.336	1.347

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2021



Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Pemalang tahun 2020 terdapat sebesar 23,75% berusia 0-14 tahun, 69,56% berusia produktif (15-64 tahun) dan 6,69% berusia 65 tahun ke atas, sehingga berdasarkan angka mutlakanya diperoleh angka ketergantungan penduduk Pemalang tahun 2020 sebesar 43,75%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 orang penduduk usia tidak produktif. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Pemalang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 4	103.486	105.712	104.117	115.208	109.904
5 - 9	118.228	120.924	116.585	126.777	126.644
10 - 14	119.686	121.224	109.222	119.682	120.286
15 - 19	132.677	132.827	111.786	118.735	106.445
20 - 24	141.723	140.278	132.031	128.351	132.161
25 - 29	132.237	135.069	134.220	130.957	130.349
30 - 34	131.798	129.404	123.586	116.019	119.894
35 - 39	116.622	120.531	127.915	122.869	123.050
40 - 44	101.880	102.634	106.880	106.057	109.957
45 - 49	89.475	92.781	98.538	94.550	95.014
50 - 54	81.885	82.580	87.915	86.669	89.275
55 - 59	67.584	68.428	76.405	76.032	77.034
60 - 64	49.923	49.267	56.911	57.867	62.130
65 - 69	32.700	32.671	41.036	42.266	45.206
70 - 75	19.714	18.513	23.959	23.640	26.953
75+	19.856	18.331	29.502	24.621	28.344
Jumlah	1.459.476	1.471.174	1.480.608	1.490.300	1.502.646

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

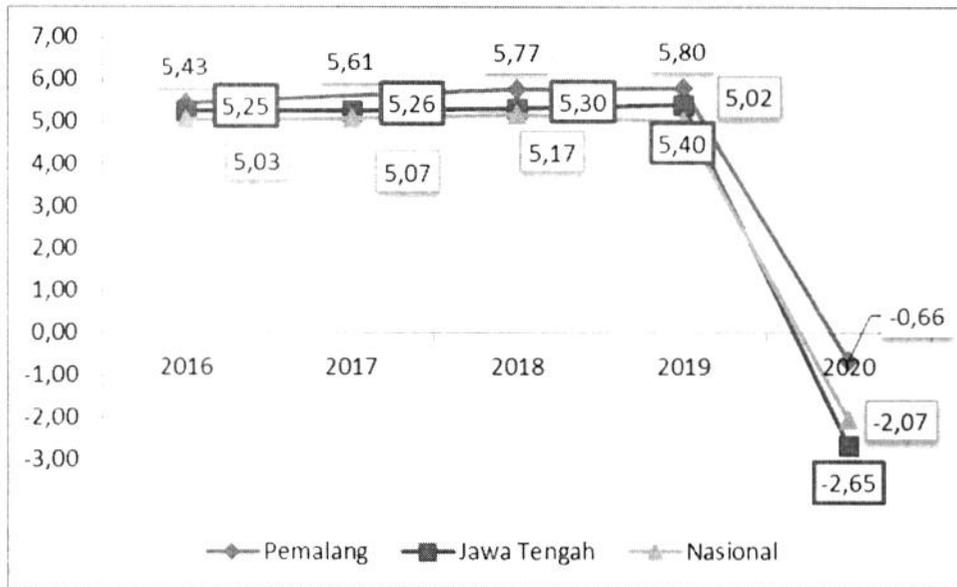
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

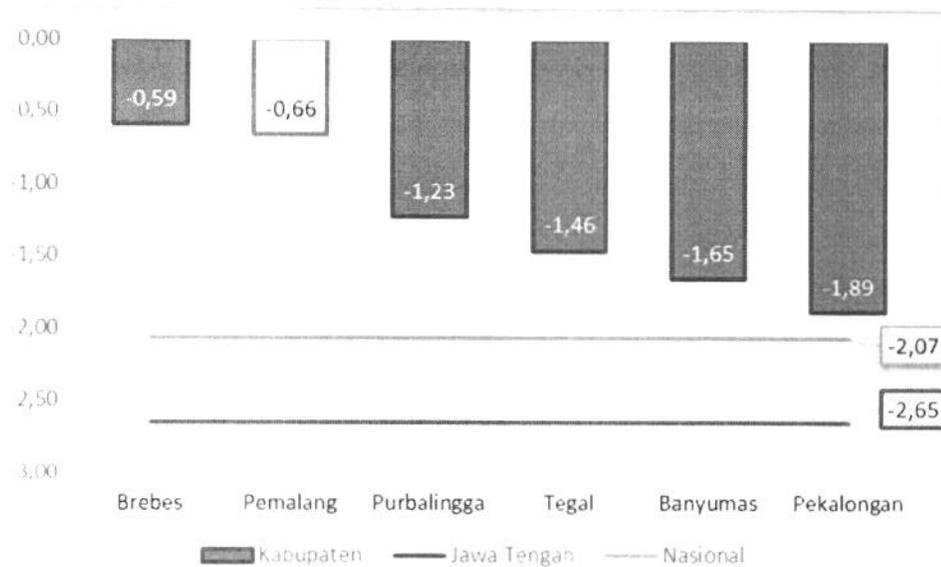
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 5,43% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,80%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -0,66% Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sampai dengan 2020 relevan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Buku PDRB Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2021

Gambar 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar -0,66% berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar -2,65% dan Nasional sebesar -2,07%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah pada tahun 2020, Kabupaten Pemalang merupakan tertinggi kedua dari kabupaten sekitar setelah Kabupaten Brebes (-0,59%). Dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, Buku PDRB Kabupaten/Kota Di Indonesia, 2021

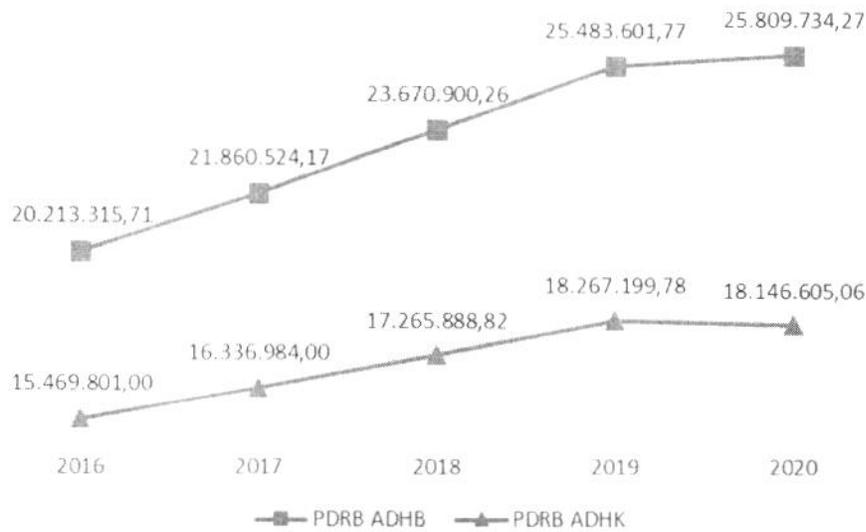
Gambar 2.8 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020 (%)

2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB Kabupaten Pemalang baik PDRB ADHB maupun ADHK atas dasar tahun 2010 mengalami kenaikan, yaitu PDRB ADHB pada tahun 2016 sebesar Rp.20.213.315,71 juta dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp.25.809.734,27 juta, sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2016 sebesar Rp.15.469.801,00 juta dan pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp.18.146.605,06 juta, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

9



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kab. Pemalang, 2021

Gambar 2.9 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kab. Pemalang selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	5.600.639,22	5.836.489,48	6.270.308,32	6.475.823,69	6.963.931,72
B	Pertambangan dan Penggalian	868.662,19	966.070,90	1.008.805,95	1.017.466,77	1.047.170,81
C	Industri Pengolahan	4.356.059,88	4.722.013,91	5.118.414,59	5.602.967,50	5.666.258,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.749,84	24.868,69	27.114,19	28.511,93	28.891,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.428,73	15.183,26	15.932,01	16.684,61	18.056,25
F	Konstruksi	819.427,62	938.795,86	1.049.239,02	1.200.432,23	1.162.322,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.052.985,61	3.315.846,01	3.587.584,57	3.926.037,69	3.829.556,80
H	Transportasi dan Pergudangan	531.943,34	573.709,40	620.816,07	685.552,33	482.997,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.021.822,75	1.094.350,96	1.201.929,28	1.326.140,86	1.294.098,10
J	Informasi dan Komunikasi	368.224,88	440.605,19	496.969,63	564.011,32	662.941,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	621.114,29	685.803,22	737.231,99	778.018,54	793.892,59

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
L	Real Estate	326.527,85	354.812,45	384.782,82	418.953,27	421.816,46
M,N	Jasa Perusahaan	68.414,71	76.223,03	85.110,81	96.778,95	90.783,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	675.248,98	719.029,31	748.795,55	784.904,52	784.668,65
P	Jasa Pendidikan	1.122.492,52	1.269.111,41	1.400.237,00	1.547.358,12	1.572.178,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.805,42	228.891,69	253.098,49	279.191,60	305.060,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya	536.767,88	598.719,40	664.529,97	734.767,84	685.109,45
PDRB		20.213.315,71	21.860.524,17	23.670.900,26	25.483.601,77	25.809.734,27

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, 2021

Dilihat dari lapangan usaha, PDRB ADHK Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun juga didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selengkapnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.860.771,69	3.981.817,04	4.151.223,81	4.205.833,39	4.420.637,51
B	Pertambangan dan Penggalian	695.706,26	749.308,41	773.506,69	769.607,55	775.453,35
C	Industri Pengolahan	3.206.893,42	3.375.595,13	3.555.530,68	3.834.064,34	3.785.732,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20.519,09	21.609,01	22.827,81	23.970,69	24.439,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.283,69	13.894,29	14.489,81	15.095,38	15.441,80
F	Konstruksi	652.286,15	702.870,34	751.342,57	819.722,77	790.982,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.607.615,09	2.764.653,21	2.912.820,71	3.120.035,29	3.011.268,20
H	Transportasi dan Pergudangan	462.443,60	490.632,34	525.816,58	568.337,15	387.601,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	862.103,74	912.838,22	989.250,88	1.078.844,76	1.037.270,54
J	Informasi dan Komunikasi	383.843,66	437.632,28	493.959,44	554.594,24	649.012,73

6

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	463.568,47	489.437,05	509.975,88	528.581,88	539.629,94
L	Real Estate	286.751,82	303.891,71	321.433,27	341.772,37	341.990,47
M,N	Jasa Perusahaan	55.942,29	60.164,41	65.409,82	72.306,37	65.914,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	505.060,44	520.624,16	536.375,45	554.001,69	547.281,92
P	Jasa Pendidikan	808.136	874.593,96	942.363,82	1.015.425,91	1.014.899,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	154.797	168.684,32	184.188,10	200.114,45	215.962,39
R,S, T,U	Jasa lainnya	430.079	468.738,12	515.373,50	564.891,55	523.087,03
PDRB ADHK		15.469.801,00	16.336.984,00	17.265.888,82	18.267.199,78	18.146.605,06

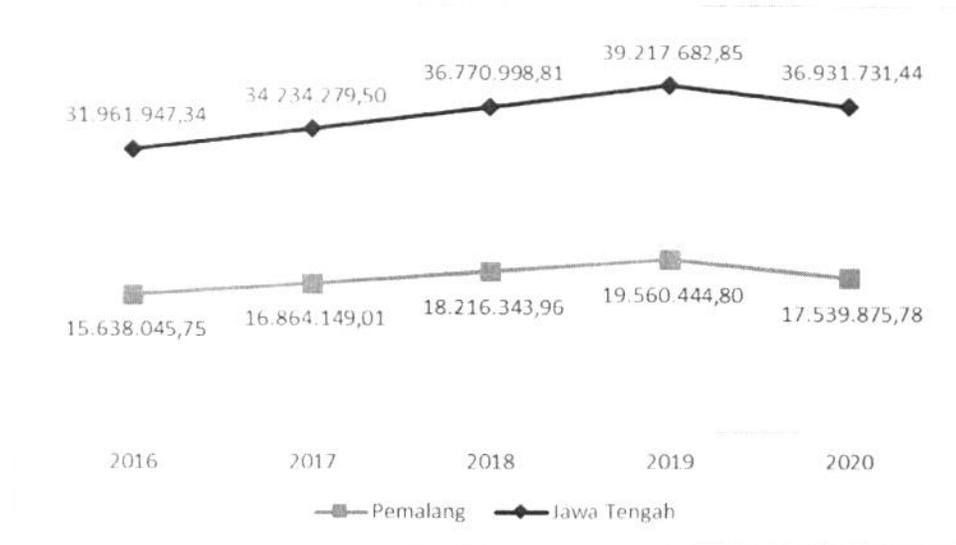
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, 2021

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, belum sepenuhnya menunjukkan sebagai indikator kenaikan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut didasari, antara lain : (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi, dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata di kalangan penerima pendapatan, karena dalam prakteknya tidak semua faktor produksi, khususnya tenaga kerja, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi.

Perkembangan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terus terjadi peningkatan dari sebesar Rp.15.638.045,75 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.19.560.444,80 pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 17.539.875,78. Dibandingkan dengan perkembangan PDRB Per kapita Provinsi Jawa Tengah, PDRB Per

Kapita ADHB Kabupaten Pemalang relevan atau sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Pemalang, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

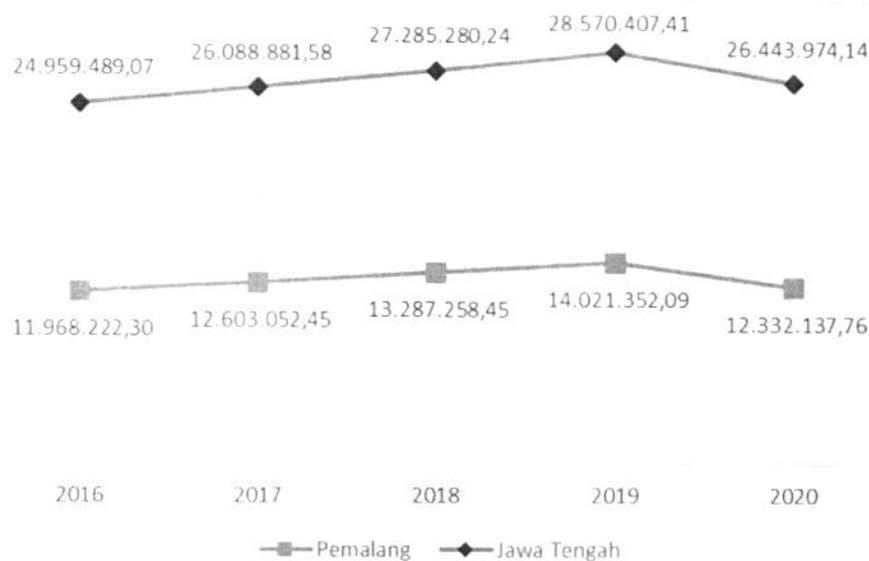


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, 2021

Gambar 2.10 Perbandingan Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Perkembangan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terus terjadi peningkatan dari sebesar Rp.11.968.222,30 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.14.021.352,09 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.12.332.137,76. Dibandingkan dengan perkembangan PDRB Per kapita Provinsi Jawa Tengah, PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Pemalang relevan atau sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Pemalang, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

f



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, 2021

Gambar 2.11 Perbandingan Perkembangan PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 (Rupiah)

4. Laju Inflasi

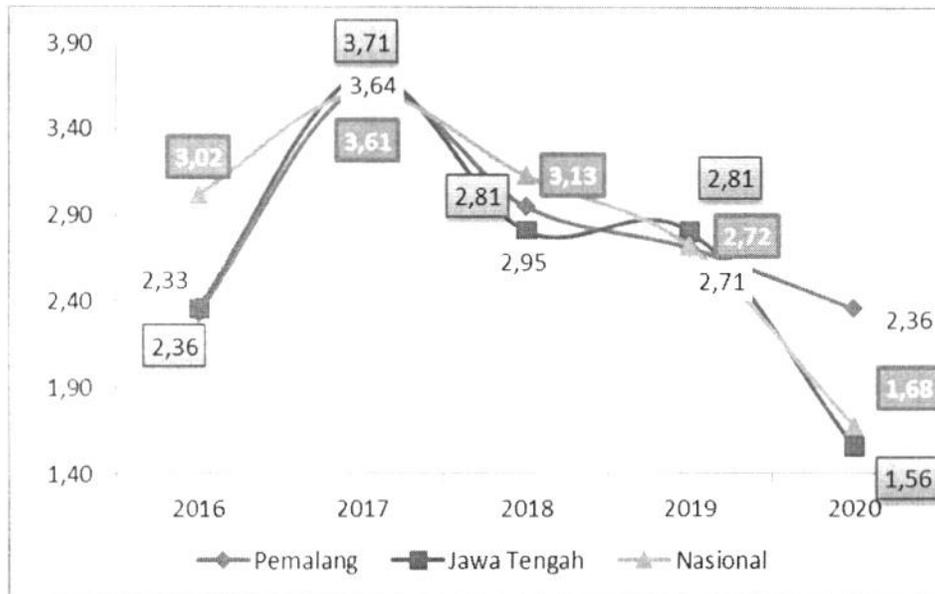
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Inflasi Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 2,33% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,36%. Kondisi Inflasi Kabupaten Pemalang

6

selama kurun waktu lima tahun tersebut masih dalam kategori rendah karena masih berada dibawah 10%. Dilihat dari relevansinya, perkembangan inflasi Kabupaten Pemalang masih sejalan dengan perkembangan inflasi di Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.12 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

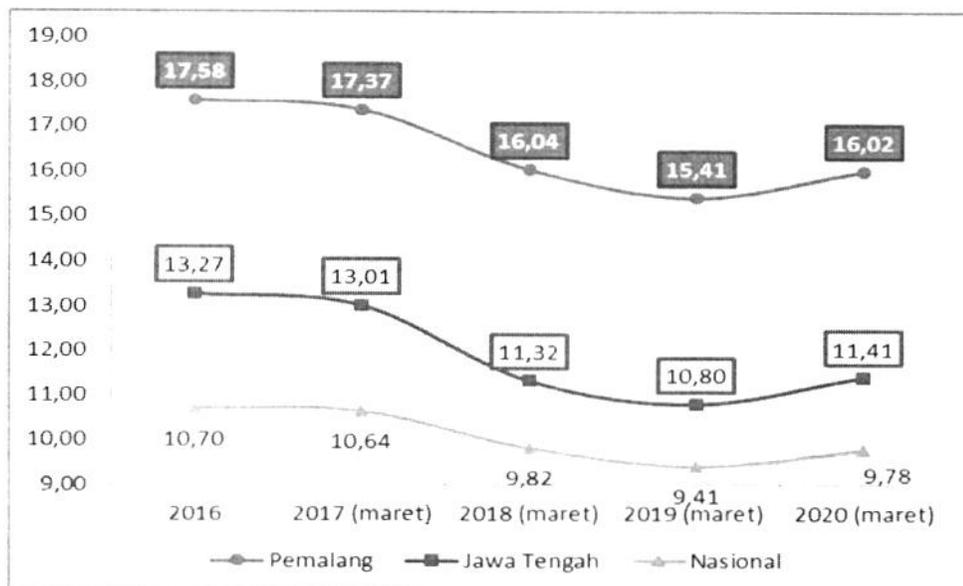
2.2.1.1. Persentase Penduduk Miskin

Kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Pemalang dapat digambarkan dengan beberapa indikator, meliputi Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

1. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 2016-2020 terus mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 17,58% menurun sampai dengan tahun 2019 mencapai 15,41%. Namun kembali meningkat menjadi 16,02% pada tahun 2020, hal ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga banyak aktifitas perekonomian terganggu. Kondisi ini relevan terhadap penurunan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

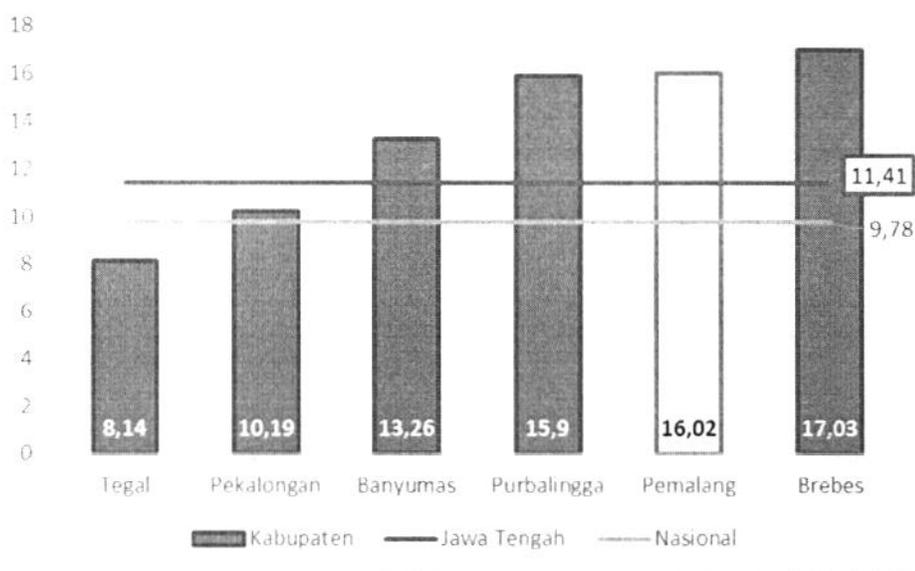
f



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.13 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan posisi relatif, persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 16,02% masih di atas capaian Provinsi Jawa Tengah (11,41%) dan Nasional (9,78%). Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah tahun 2020, Kabupaten Pemalang menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Brebes (17,03%), secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



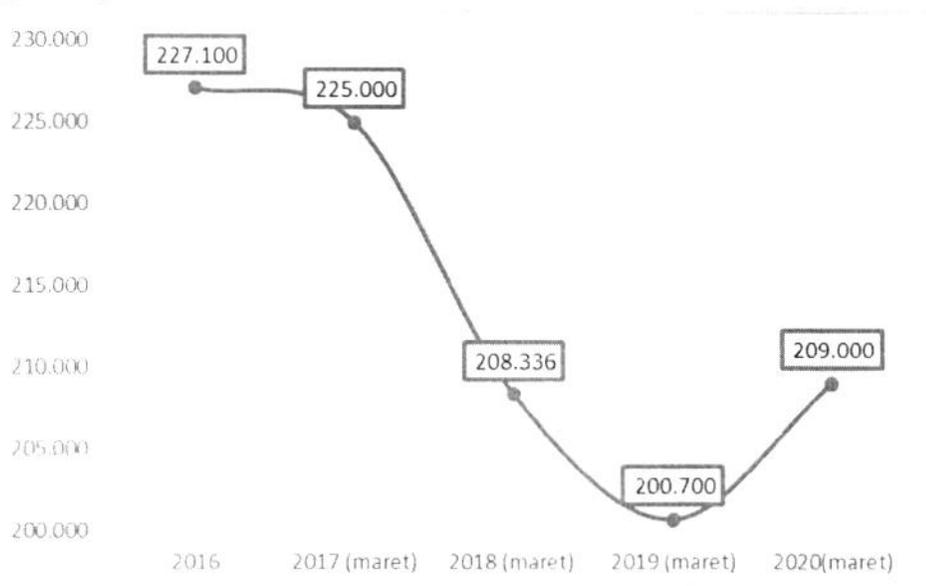
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.14 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (%)

[Handwritten mark]

2. Jumlah Penduduk Miskin

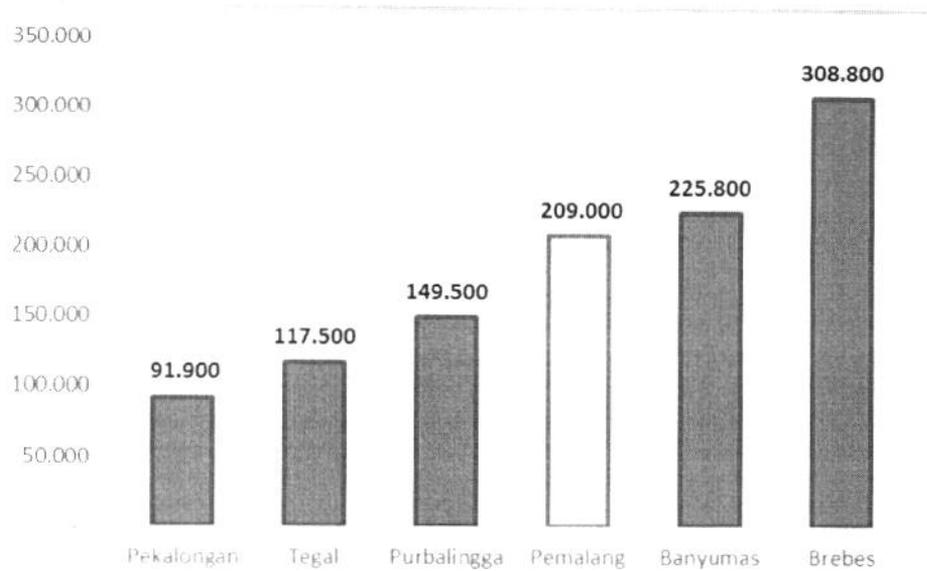
Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 227.100 jiwa dan pada tahun 2019 turun menjadi 200.700 jiwa, namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 209.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.15 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (jiwa)

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang tahun 2020 sekitar 209.000 jiwa menempati peringkat ketiga tertinggi setelah Kabupaten Brebes sebanyak 308.800 jiwa dan Kabupaten Banyumas sebanyak 225.800 jiwa, Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

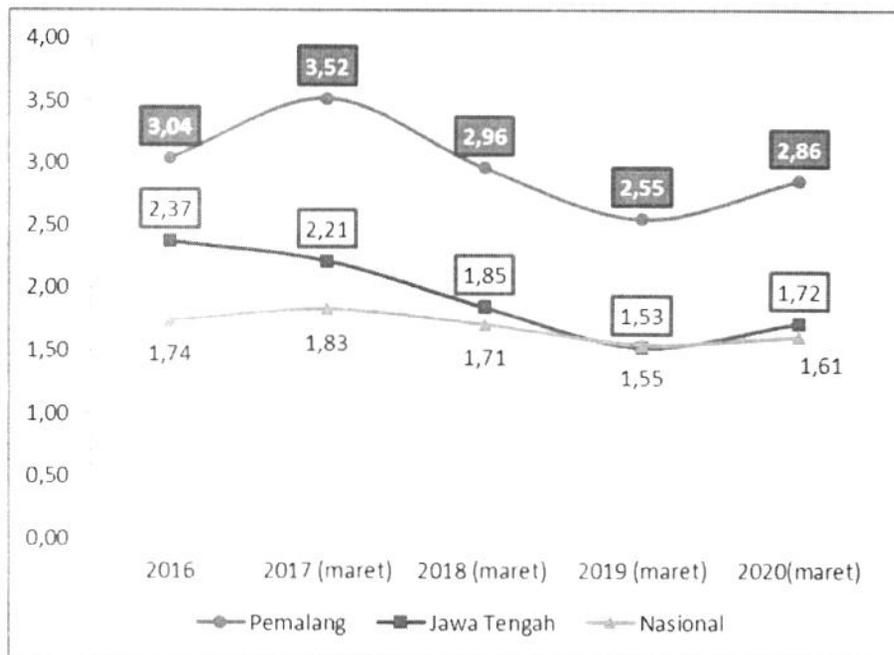
Gambar 2.16 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (jiwa)

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang terjadi fluktuasi dan cenderung turun, yaitu terjadi kenaikan pada tahun 2017 dan tahun 2020. Turunnya P1 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

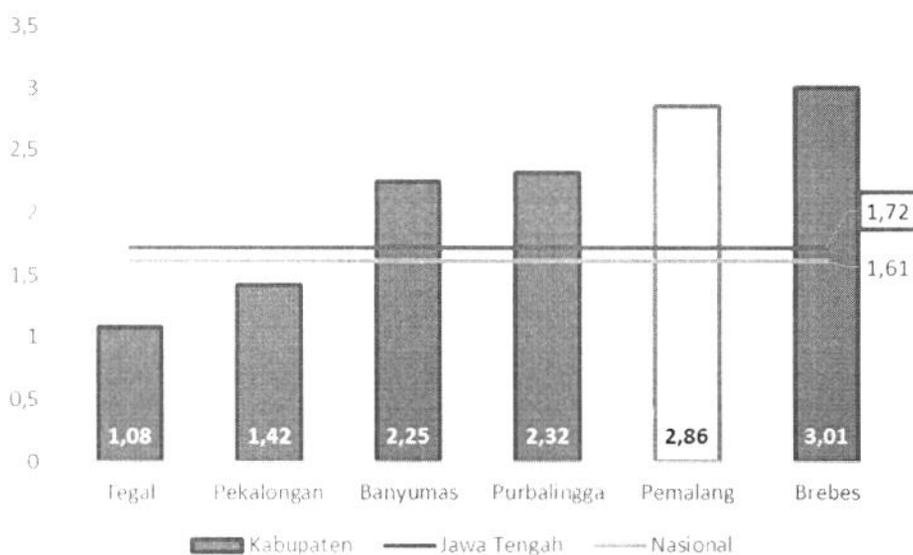
f



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 2,86 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,50 dan Nasional sebesar 1,72. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah tahun 2020, Kabupaten Pemalang menempati posisi kedua tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

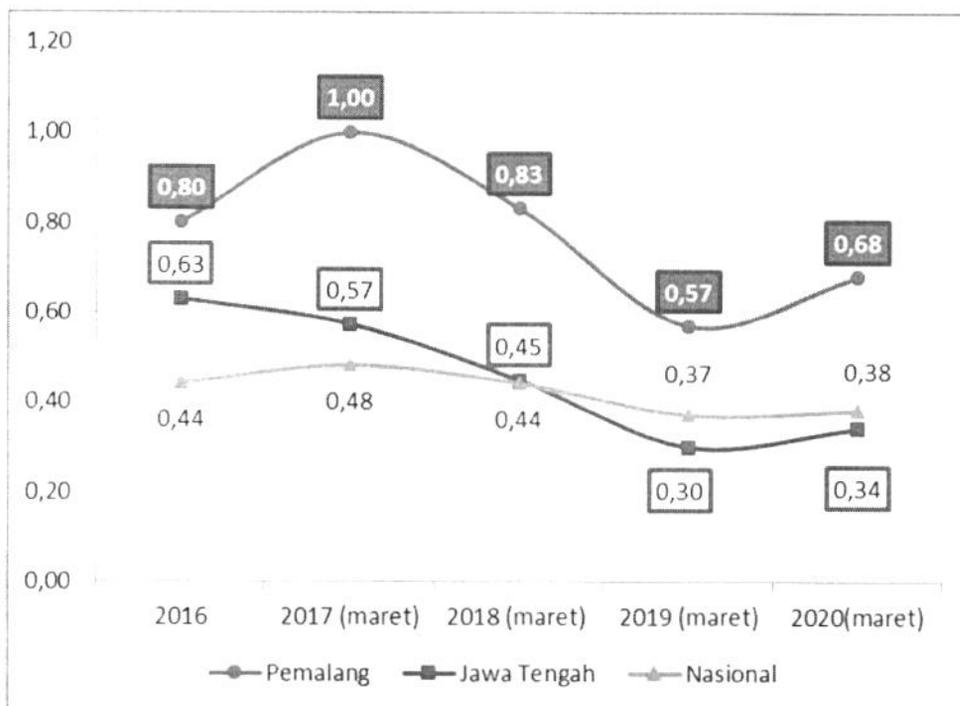


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.18 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pemalang Tahun 2020

2.2.1.2. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuasi cenderung mengalami penurunan, yaitu terjadi kenaikan pada tahun 2017 dan tahun 2020. Penurunan capaian P2 Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin rendah, kondisi selaras dengan pencapaian P2 rata-rata Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020. secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



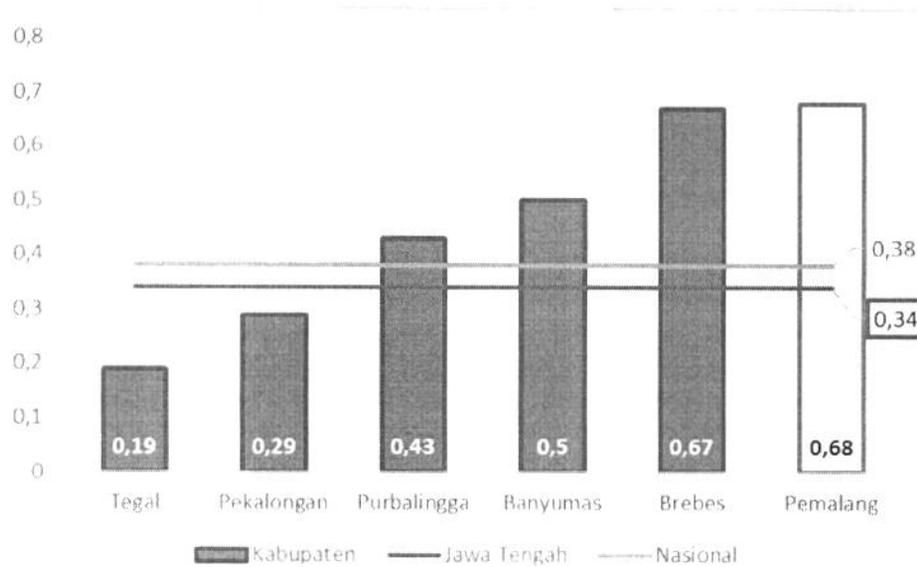
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.19 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 0,68 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,34 dan Nasional sebesar 0,38, serta menempati posisi

f

tertinggi dibandingkan kabupaten/kota sekitarnya di Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

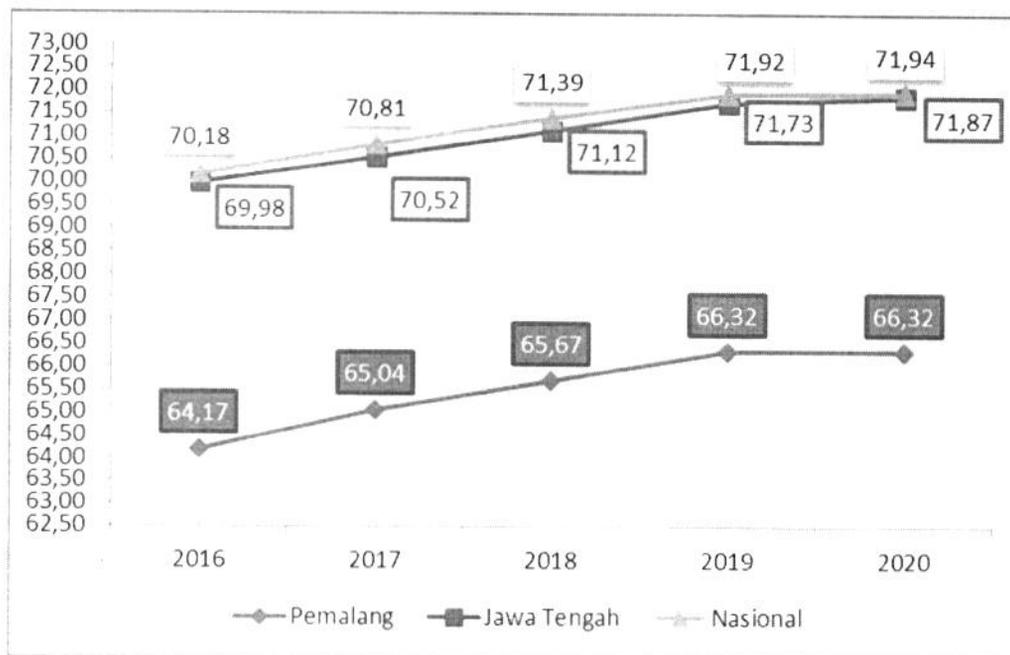
Gambar 2.20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pemalang Tahun 2020

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Besarnya nilai IPM dapat menentukan kemajuan pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

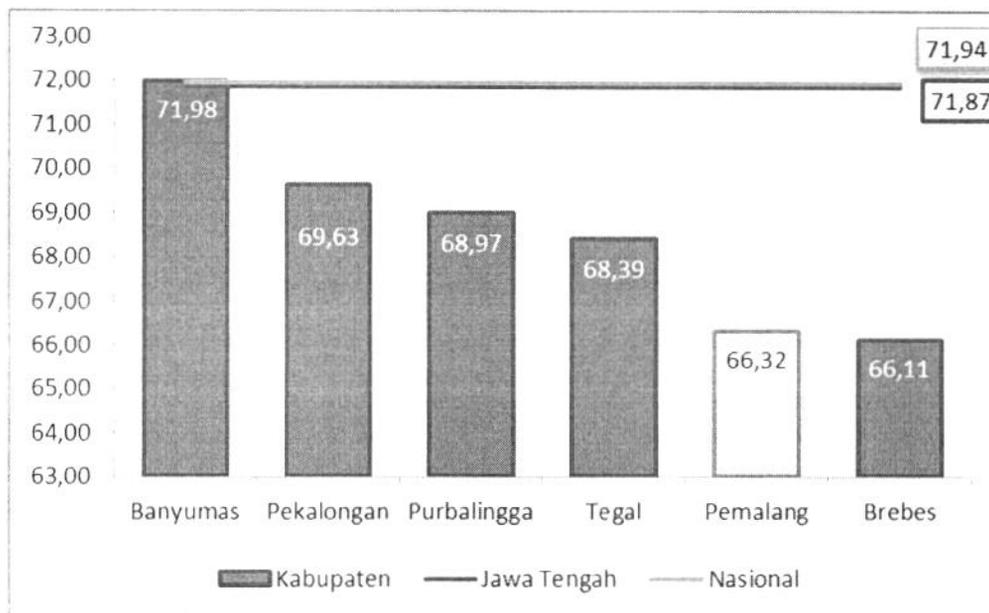
Dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Pemalang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tampak bahwa kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 64,17 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,32. Kondisi peningkatan IPM Kabupaten Pemalang tiap tahun relevan terhadap peningkatan kondisi IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.21 Perkembangan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

IPM Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 66,32 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,87 dan Nasional sebesar 71,94, serta dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah berada pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Brebes sebesar 66,11, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

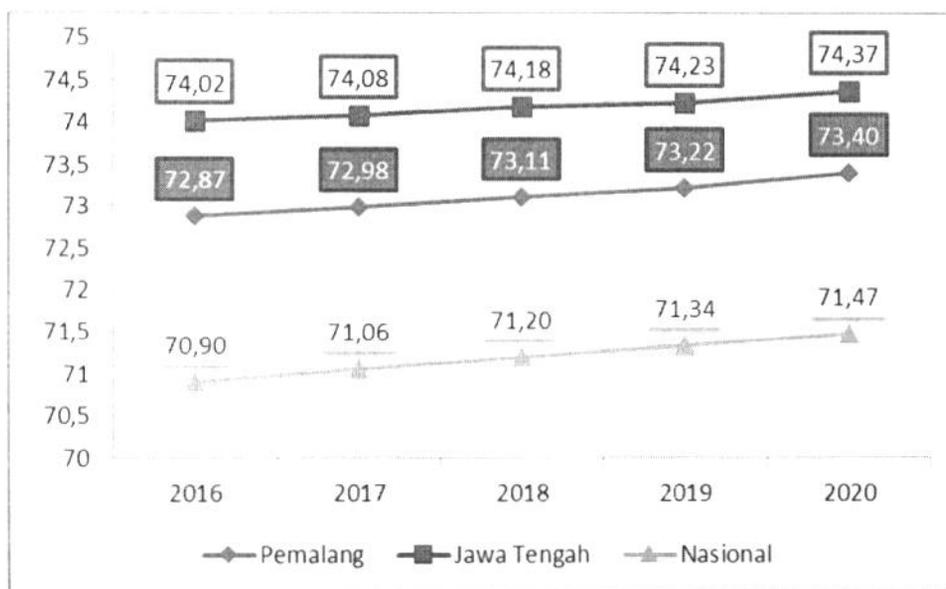
Gambar 2.22 Posisi Relatif IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Selengkapnya uraian indikator pembentuk IPM Kabupaten Pemalang di bawah ini:

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup (UHH) adalah rata-rata banyaknya tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Usia harapan hidup Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 72,87 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 73,40 tahun. Kondisi ini relevan dengan peningkatan usia harapan hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



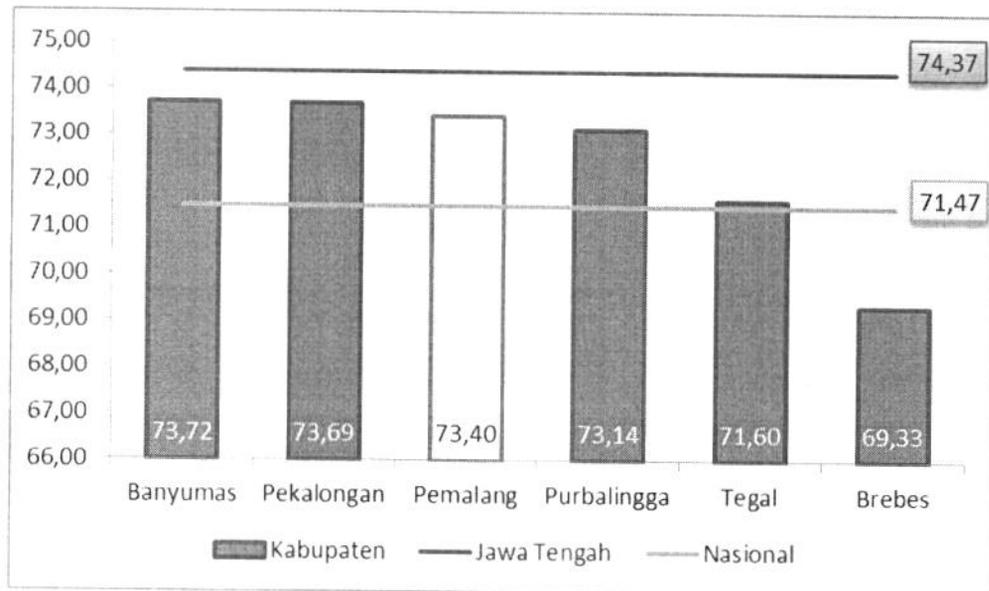
Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.23 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif UHH Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 73,40 tahun berada di bawah Provinsi Jawa Tengah 74,37 tahun dan di atas Nasional sebesar 71,47 tahun, serta menempati posisi

6

ketiga dibandingkan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

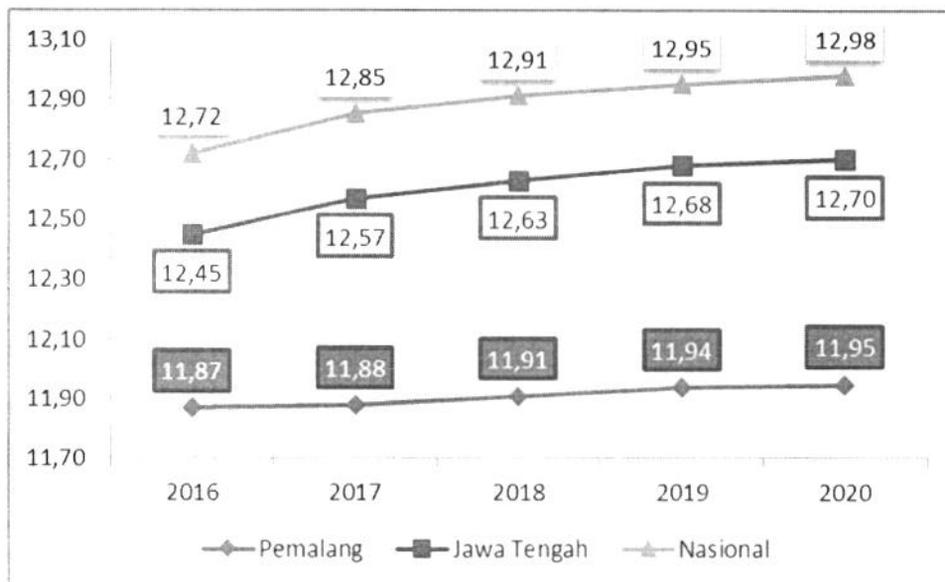
Gambar 2.24 Posisi relatif AHH Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (tahun)

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diakses oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami peningkatan dan relevan dengan peningkatan HLS Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu HLS Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sebesar 11,87 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 11,95 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

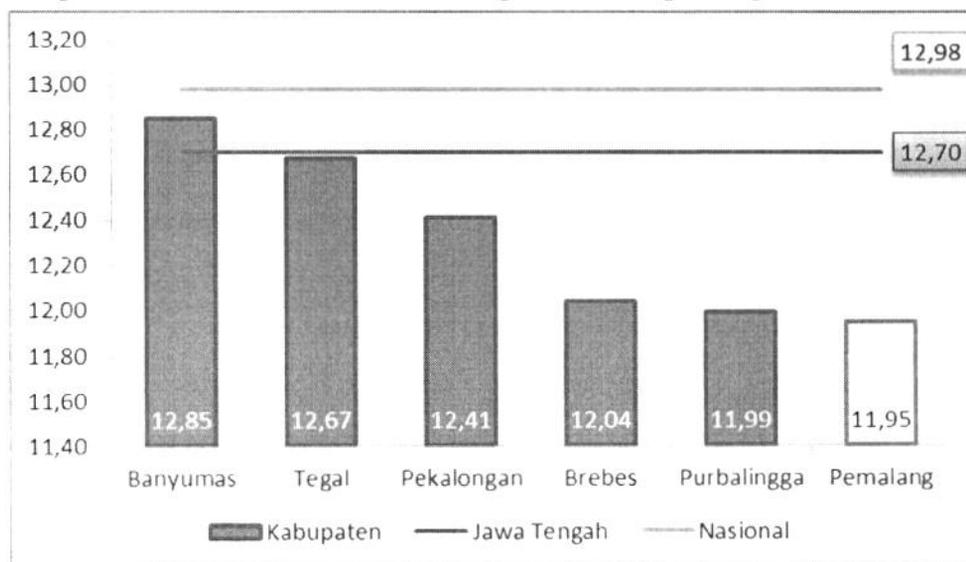
6



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.25 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif HLS Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 11,95 tahun berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,70 tahun dan Nasional sebesar 12,98 tahun. Dibandingkan dengan HLS kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah tahun 2020, Kabupaten Pemalang menempati posisi terendah dari Kabupaten sekitar. secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

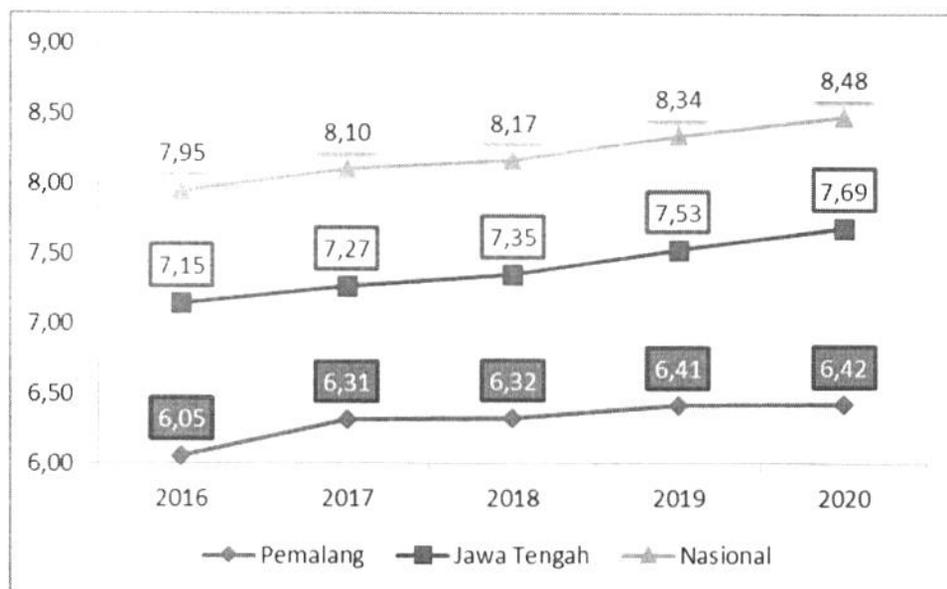
Gambar 2.26 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2020

f

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP untuk menilai keberhasilan pembangunan.

RLS Kabupaten Pemalang, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,37 menjadi sebesar 6,42. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pemalang di tahun 2020 bersekolah hanya sampai dengan tamat SD. Jadi secara umum pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional belum mencapai tujuan program wajib belajar 9 tahun dan perlu upaya keras untuk mencapai wajib belajar 12 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

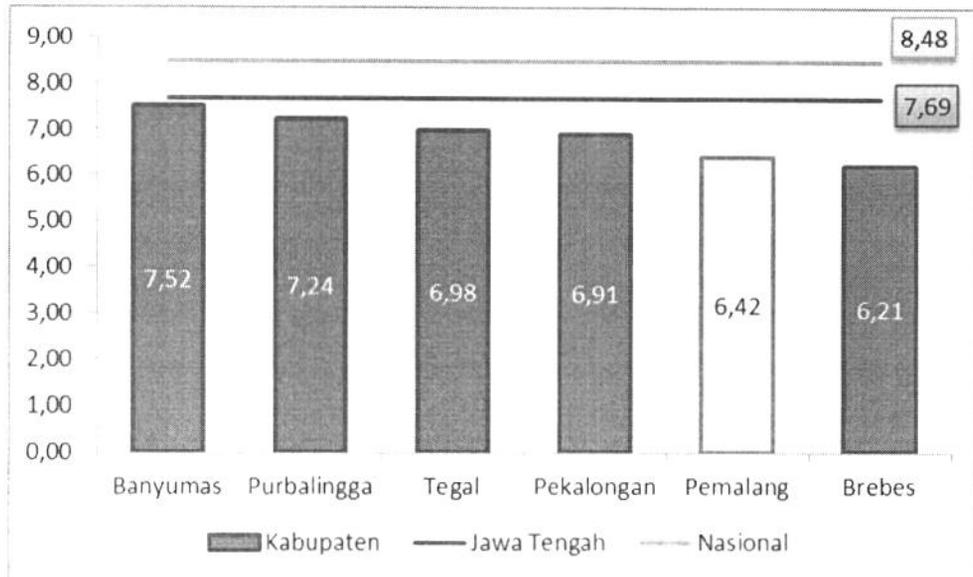


Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.27 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

1

Posisi relatif rata-rata lama sekolah Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 6,42 tahun berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,69 tahun dan Nasional 8,48 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah berada pada paling rendah kedua setelah Kabupaten Brebes (6,21 tahun), secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



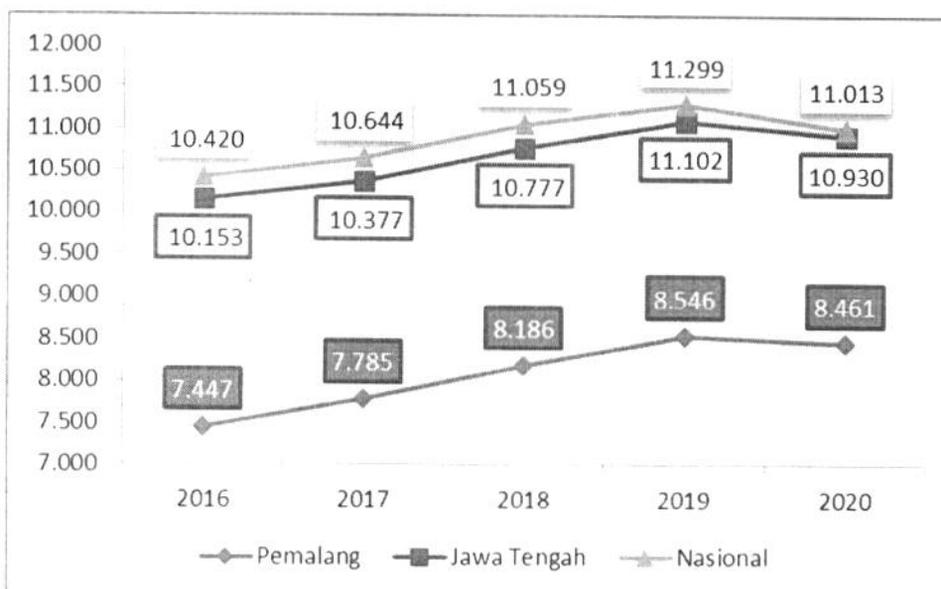
Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.28 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (tahun)

d. Pengeluaran Per Kapita

Besarnya pengeluaran per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan yang menggambarkan upaya penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun terus meningkat, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.7.447 ribu dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.8.461 ribu. Kondisi rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

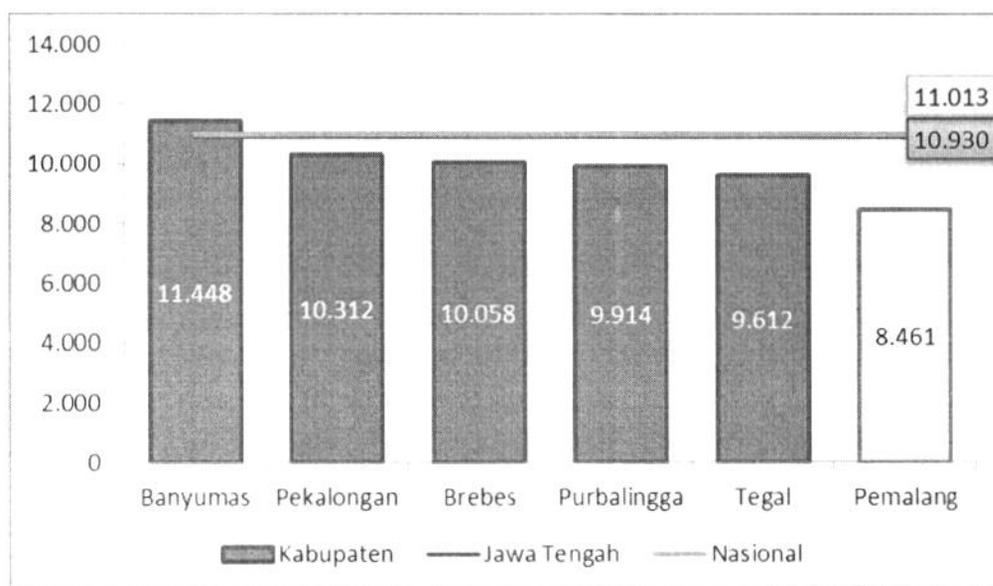




Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.29 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Posisi relatif Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar Rp.8.461 ribu masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.10.930 ribu dan Nasional sebesar Rp.11.013 ribu, serta menempati posisi paling rendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

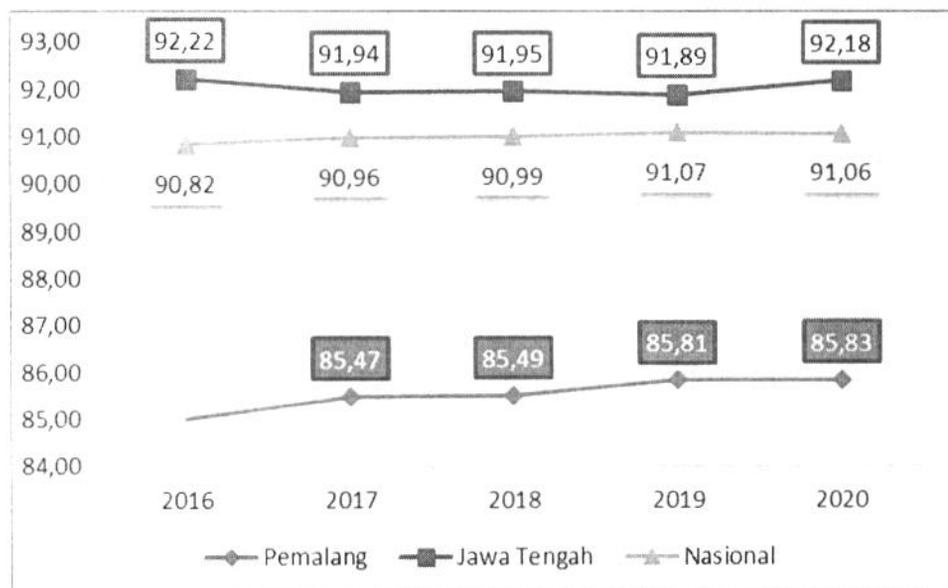
Gambar 2.30 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Ribu Rupiah)

6

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antar laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan nilai IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, capaian IPG Kabupaten Pemalang dari sebesar 85,47 terus meningkat menjadi sebesar 85,83. Kondisi ini relevan dengan peningkatan IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



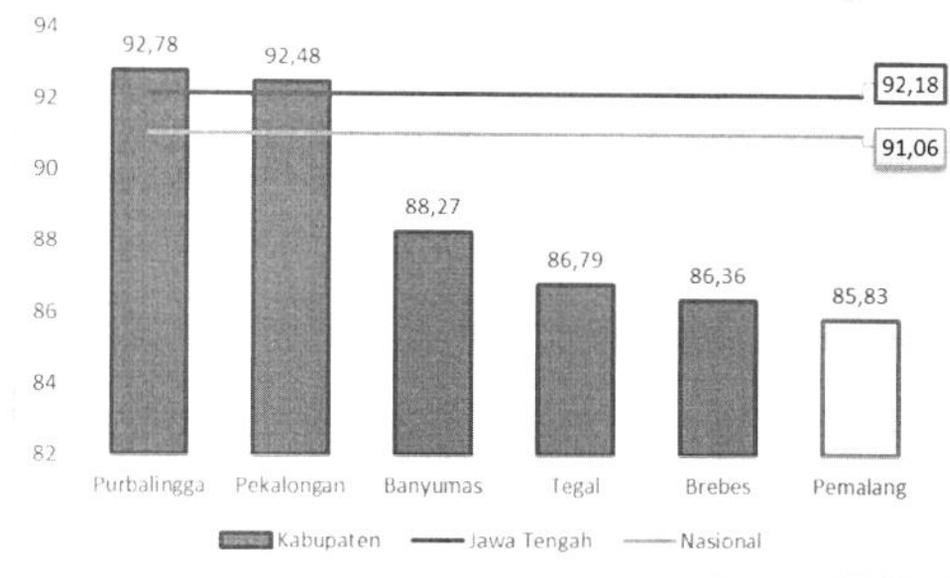
Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.31 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian IPG Kabupaten Pemalang tahun 2020 adalah 85,83 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan

f

Nasional sebesar 91,06. Dibandingkan dengan capaian IPG kabupaten/kota sekitarnya di Jawa Tengah posisi Kabupaten Pemalang berada paling rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.32 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Capaian indikator pembentuk IPG Kabupaten Pemalang tahun 2020 untuk AHH perempuan sebesar 75,24 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 71,50 tahun, HLS perempuan sebesar 11,79 tahun lebih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 12,19 tahun, RLS perempuan sebesar 5,94 tahun masih rendah dibandingkan laki-laki sebesar 6,95 tahun dan pengeluaran per kapita didominasi laki-laki sebesar Rp.12.466 ribu dan perempuan hanya sebesar Rp.5.899 ribu, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Capaian Indikator Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2020

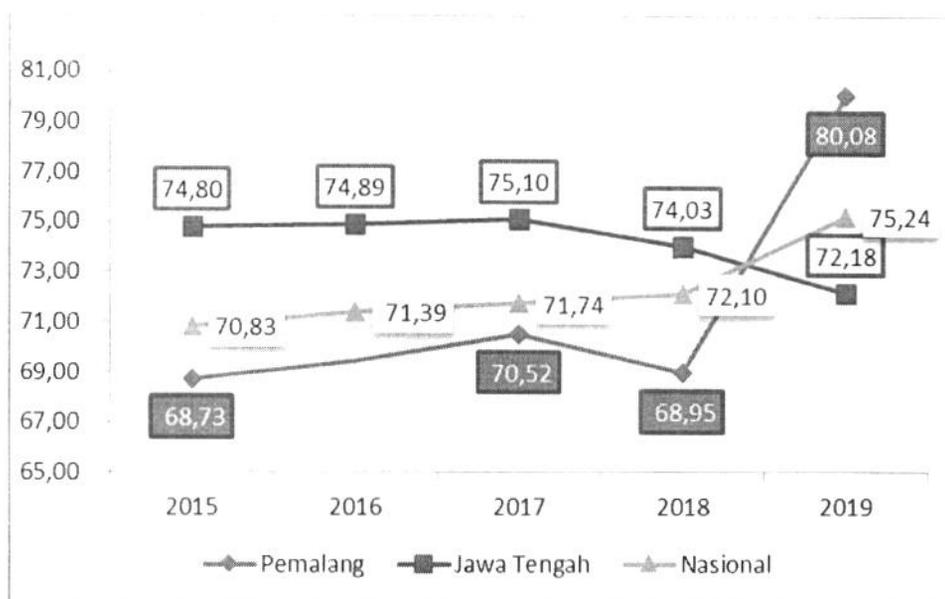
No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup(tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	
		L	P	L	P	L	P	L	p
1	Banyumas	71,80	75,55	12,92	12,85	7,97	7,24	16.609	7.901
2	Purbalingga	71,22	74,99	12,20	11,79	7,48	6,87	13.382	9.416
3	Pekalongan	71,79	75,52	12,09	12,98	7,28	6,57	14.392	8.644
4	Pemalang	71,50	75,24	12,19	11,79	6,95	5,94	12.466	5.899
5	Tegal	69,68	73,47	13,23	12,32	7,60	6,32	14.465	7.461
6	Brebes	67,40	71,23	12,14	12,03	6,77	5,45	14.725	6.943

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , Tahun 2021

8

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

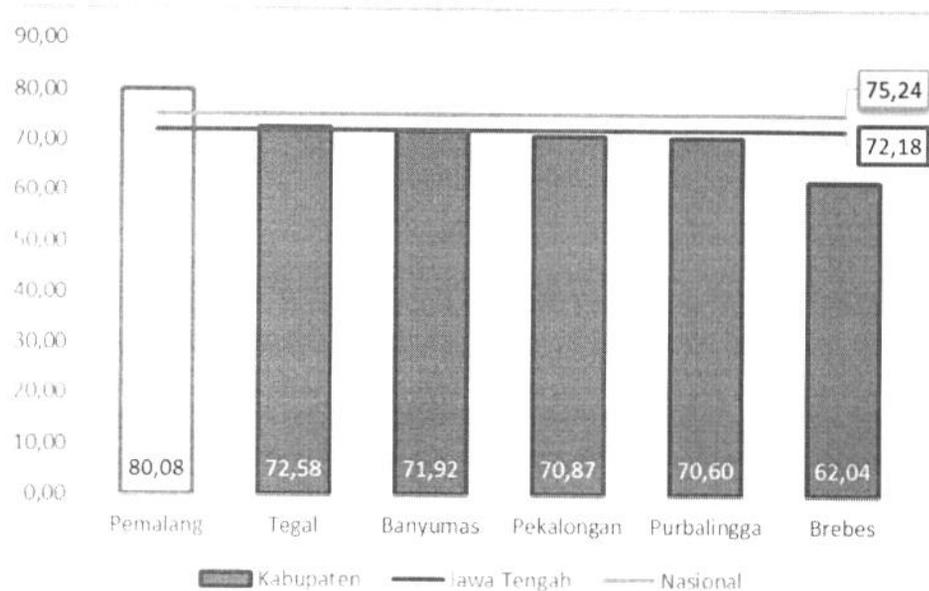
Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, IDG Kabupaten Pemalang terjadi fluktuasi dan cenderung meningkat, pada tahun 2015 mencapai 68,73 naik menjadi 70,52 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 turun menjadi sebesar 68,95. Dan kembali naik pada tahun 2019 menjadi 80,08. Hal ini relevan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang turun pada tahun 2018 sedangkan capaian Nasional terus naik tiap tahun pada periode tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , Tahun 2021

Gambar 2.33 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IDG Kabupaten Pemalang tahun 2019 sebesar 80,08 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,18 dan Nasional sebesar 75,24. Dibandingkan dengan capaian IDG kabupaten/kota sekitarnya di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , Tahun 2021

Gambar 2.34 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Capaian indikator pembentuk IDG Kabupaten Pemalang tahun 2019 untuk Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 16,00%, Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi mencapai sebesar 49,16% dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja masih sebesar 35,34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pengarusutamaan gender, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Capaian Indikator Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

No	Kabupaten	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
1	Banyumas	18,00	49,40	30,84
2	Purbalingga	31,11	47,36	30,24
3	Pekalongan	31,11	47,31	26,19
4	Pemalang	16,00	49,16	35,34
5	Tegal	20,00	50,45	29,05
6	Brebes	16,00	47,10	25,28

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , Tahun 2021

f

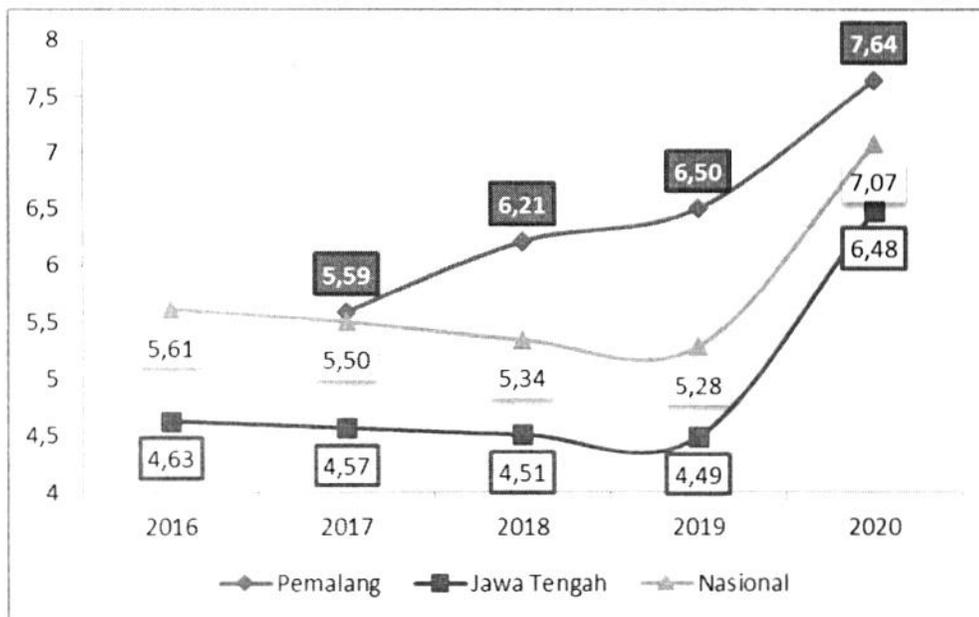
Isu gender di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 adalah :

1. Kualitas hidup manusia masih rendah yang dikontribusi besar oleh rendahnya pengeluaran perkapita dan rendahnya rata-rata lamanya sekolah perempuan;
2. Masih tingginya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki yang diindikasikan dengan rendahnya angka IPG;
3. Pengarusutmaan gender belum menjadi bagian integral dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan;
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi mencapai 89 kasus pada tahun 2020, sementara itu upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di tingkat desa/kelurahan belum berjalan secara optimal.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

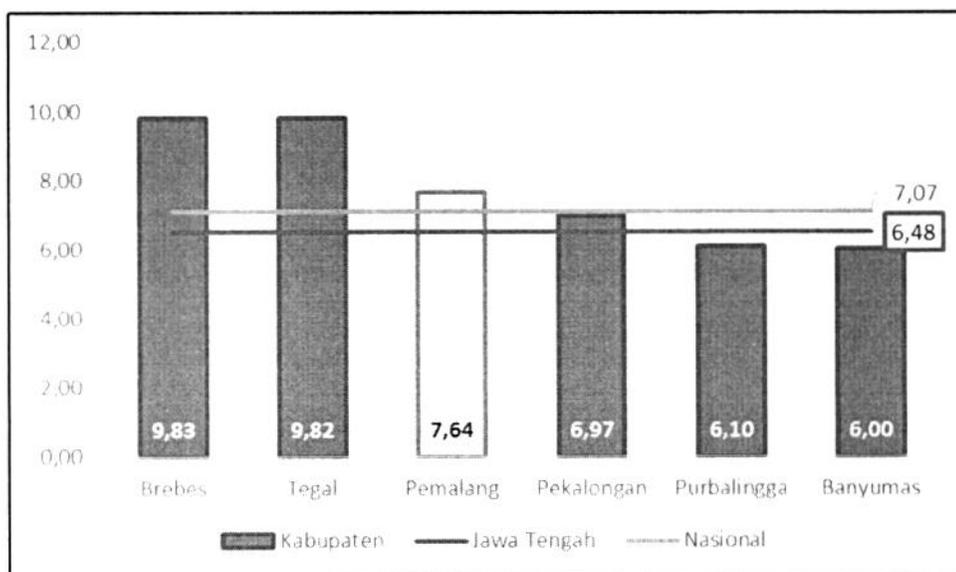
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Pemalang masih tergolong tinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 7,64% meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2018. Peningkatan TPT di Kabupaten Pemalang terjadi karena keterbatasan lapangan kerja formal sehingga mayoritas penduduk Pemalang bekerja di sektor informal atau tidak resmi dan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk menarik minat investasi yang banyak menyerap lapangan kerja formal (padat karya) di Kabupaten Pemalang, menciptakan lapangan kerja baru dan melatih tenaga kerja agar tercipta wirausaha baru.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Gambar 2.35 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020.

Pada Tahun 2020, TPT Kabupaten Pemalang sebesar 7,64%, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48% dan Nasional sebesar 7,07% serta berada di posisi ketiga dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya. Capaian TPT Kabupaten Pemalang yang di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan di atas capaian nasional menunjukkan bahwa kinerja ketenagakerjaan Kabupaten harus banya ditingkatkan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



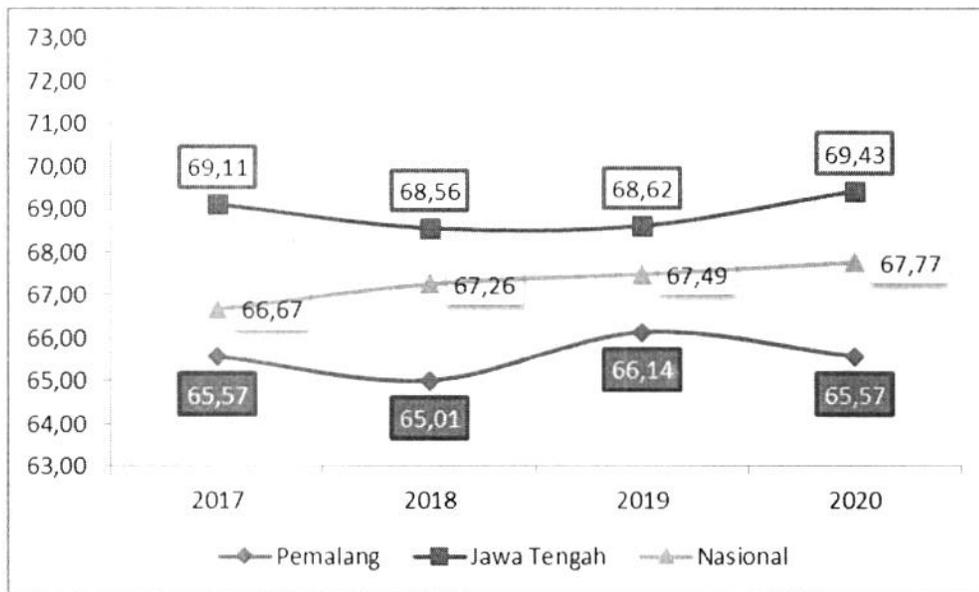
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

4

Gambar 2.36 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pemalang Tahun 2020

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

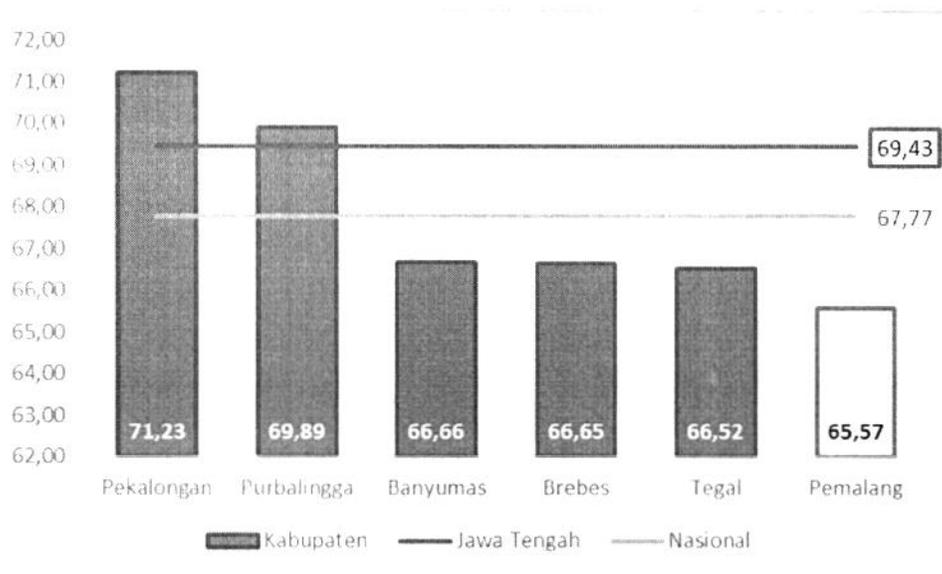
TPAK Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan fluktuasi, yaitu pada tahun 2017 sebesar 65,57% dan tahun 2020 kembali sebesar 65,57%. Kondisi tersebut selaras dengan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dan Nasional yang mengalami perkembangan meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2020

Pada Tahun 2020, TPAK Kabupaten Pemalang sebesar 65,57%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,43% dan Nasional sebesar 67,77% serta berada di posisi terendah dibandingkan dengan Kabupaten lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

Gambar 2.38 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Gender Kabupaten Pemalang Tahun 2020

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi fokus seni budaya adalah untuk melihat sejauh mana seni dan budaya berkembang di Kabupaten Pemalang. Dalam kurun waktu 2016-2020 terdapat trend peningkatan kinerja seni dan budaya meski belum optimal. Selengkapnya hal tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Kinerja Makro Seni Budaya Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	69	74	90	91,3	90,52
2	Cakupan Kelompok seni aktif	%	41	51	83	84,74	83,33

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

f

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional). Berdasarkan pengertian tersebut tugas penyelenggaraan pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Selama masa Pandemi Covid 19 tahun proses kegiatan belajar mengajar tatap muka dikurangi dan diganti dengan proses belajar melalui media daring. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring antara lain belum semua wilayah di Kabupaten Pemalang didukung dengan sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai.

Urusan pendidikan dengan perincian pembagian kewenangan sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan wajib daerah kabupaten/kota. Urusan yang wajib dilaksanakan di kabupaten/kota, meliputi Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: 1). pendidikan anak usia dini; 2). pendidikan dasar; dan 3). pendidikan kesetaraan. Capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pemalang sebagai berikut; Persentase anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD sebesar 39,1%, persentase anak usia 7-12 tahun yang sudah atau sedang belajar sebesar 89,1%, persentase anak usia 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar sebesar 31,2%, dan jumlah anak usia 7-18 tahun yang sedang dan sudah belajar pada pendidikan kesetaraan adalah 1,4%.

Selanjutnya kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pemalang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional PAUD, pendidikan anak usia dini meliputi jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini digambarkan dengan



melihat dari kondisi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Terdapat sejumlah indikator yang disusun untuk mengukur capaian kinerja pendidikan usia dini.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keikutsertaan penduduk usia sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu dimana mereka menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan batas usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan (tidak terbatas wilayah administrasi).

Perkembangan capaian APS PAUD di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu pada tahun 2016 sebesar 35,8% meningkat menjadi 70,00% pada tahun 2020.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat keikutsertaan penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan melihat batas usia peserta didik sesuai masing-masing jenjang pendidikan pada satu wilayah tertentu. Perkembangan APM PAUD menunjukkan kecenderungan meningkat. APM PAUD pada tahun 2016 sebesar 46,5% meningkat menjadi 60,15% pada tahun 2020. Kondisi perkembangan APS PAUD dan APM PAUD di Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16 APK PAUD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2020 (%)

APK	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi PAUD (%)	36,3	49,2	58,06	61,47	70,00
Angka partisipasi murni PAUD (%)	46,5	59,5	57,11	59,23	60,15

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Kondisi APS PAUD di Kabupaten Pemalang baru mencapai 70,00% dan masih tergolong rendah. Jumlah penduduk usia PAUD yang belum mengikuti pendidikan di PAUD sebesar 30,00%. Penyebab masih banyaknya penduduk usia PAUD belum mengikuti pendidikan PAUD antara lain disebabkan masih kurangnya kesadaran orangtua yang memiliki anak usia dini untuk

menyekolahkan anaknya ke PAUD, ketidakmampuan ekonomi orangtua untuk menjangkau layanan PAUD, ketersediaan dan sebaran prasarana PAUD yang belum merata di Kabupaten Pemalang.

Kelompok usia PAUD di Kabupaten Pemalang yang mendapatkan layanan PAUD baru pada jenjang TK/RA saja, artinya kelompok usia 5-6 tahun. Persoalan lain pada layanan PAUD adalah kasus-kasus identitas hukum anak, anak berkebutuhan khusus (ABK), anak belum memiliki akta kelahiran dan belum terdaftar di kartu keluarga sehingga identitas anak-anak tersebut tidak masuk pada data Dapodik yang akibatnya tidak terhitung dalam data APS maupun APM PAUD.

Persoalan lain adalah fasilitas ruang kelas pada pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Di Kabupaten Pemalang persentase ruang kelas PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai SNP selama kurun waktu 2016 – 2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Jumlah ruang kelas PAUD dan pendidikan kesetaraan sesuai SNP masih sangat sedikit yaitu pada tahun 2020 hanya sebesar 5,36%. Perkembangan persentase ruang kelas PAUD dan kesetaraan sesuai SNP terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Persentase Jumlah Ruang kelas PAUD dan Kesetaraan Sesuai SNP Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ruang Kelas jenjang PAUD dan Kesetaraan yang sesuai SNP	3,56	3,77	3,85	4,13	5,36

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar terdiri dari jenjang pendidikan SD dan SMP, yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota. Oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Persentase ruang kelas dalam kondisi baik, persentase guru sesuai kualifikasi, dan persentase guru bersertifikat profesional.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Indikator APM lebih akurat untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah dibandingkan dengan APK, karena APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Nilai APS jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB dari tahun 2016 – 2020 menunjukkan kecenderungan menurun dan APM jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB cenderung menurun.

Kondisi perkembangan nilai APS dan APM jenjang pendidikan SD/MI termasuk Paket A dan SDLB dan SMP/MTs/Paket A/SMPLB di Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Paket A/ SDLB dan SMP/MTs/Paket B/SMPLB Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi sekolah SD/MI/PAKET A	96,92	100,4	108	95	95,8
Angka partisipasi sekolah SMP/MTS/PAKET B	80,89	81,76	83,01	74,81	74,81
Angka partisipasi murni SD/MI/PAKET A	96,92	100,4	108	95	95,8
Angka partisipasi murni SMP/MTS/PAKET B	80,89	81,76	83,01	74,81	83,60

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP mengalami kecenderungan menurun. Angka Partisipasi Sekolah mencerminkan dan menjamin bahwa anak usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Pemalang benar-benar

sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB dimanapun tempatnya. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A/SDLB pada tahun 2020 sebesar 95,8%. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat 4,2% penduduk usia 7 – 12 tahun tidak sekolah pada SD/MI/Paket A/SDLB.

Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi terhadap 4,2% anak yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A/SDLB. Kemungkinan pertama adalah anak tersebut memang benar tidak sekolah, kemungkinan kedua anak tersebut sekolah namun pada jenjang pendidikan SMP/MTs (belum cukup umur namun sudah sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs), ketiga anak tersebut masih sekolah di TK/RA (usia 7 tahun masih sekolah di TK B).

Analisis yang sama berlaku untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B/SMPLB. APS SMP/MTs/Paket B/SMPLB Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar 74,81%. Selama kurun waktu 2016 – 2020 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B/SMPLB cenderung menurun.

Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi penduduk usia SMP menurun dan perlu dilakukan upaya agar APS penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) meningkat. Target SDGs pada tahun 2030 bahwa semua penduduk usia SMP harus sekolah, masih perlu upaya yang keras karena masih terdapat 25,19% penduduk usia SMP belum sekolah di SMP/MTs/Paket B/SMPLB. Partisipasi penduduk pada kelompok umur yaitu 7 – 12 tahun untuk jenjang pendidikan SD dan usia 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan SMP perlu ditingkatkan agar mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengupayakan agar semua penduduk tersebut menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Kemungkinan mencerminkan partisipasi penduduk pada kelompok umur yaitu 7 – 12 tahun untuk jenjang pendidikan SD dan usia 13 – 15 tahun untuk jenjang pendidikan SMP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mengupayakan agar semua penduduk tersebut menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Kondisi ruang kelas SD dan SMP cenderung banyak yang belum sesuai dengan SNP. Persentase jumlah ruang kelas sesuai SNP untuk jenjang pendidikan SD cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2015 - 2020. Demikian juga untuk presentase ruang kelas SMP/MTs sesuai SNP. Pada tahun 2020 persentase ruang kelas SD sesuai dengan SNP sebesar 29,54%, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 30,36%. Kondisi yang sama terjadi pada jenjang pendidikan SMP, persentase ruang kelas SMP sesuai SNP juga mengalami penurunan dari 42,97% pada tahun 2016 turun menjadi 34,08% pada tahun 2020.

Secara rinci perkembangan persentase ruang kelas sesuai SNP untuk jenjang pendidikan SD dan SMP terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Persentase Jumlah Ruang kelas SD dan SMP Sesuai SNP Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (%)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Ruang Kelas jenjang SD yang sesuai SNP	30,36	29,44	28,7	27,29	29,54
Persentase Jumlah Ruang Kelas jenjang SMP yang sesuai SNP	42,97	36,8	36,17	31,55	34,08

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Data di atas menunjukkan kondisi ruang kelas baik SD maupun SMP banyak yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu perhatian khusus agar ruang-ruang kelas pada jenjang pendidikan SD dan SMP semuanya sesuai SNP.

Kualitas penyelenggaraan pendidikan salah satunya diukur dari jumlah sekolah yang telah terakreditasi B. Sekolah yang minimal telah terakreditasi B memiliki kualitas tata kelola dan penyelenggaraan pembelajaran serta fasilitas yang memadai. Kondisi di Kabupaten Pemalang terlihat bahwa sekolah dengan akreditasi minimal B cenderung menurun.

Pada tahun 2016 SD/MI terakreditasi minimal B sebesar 93,71% dan SMP/MTs sebesar 84,66%. Pada tahun 2020 SD/MI terakreditasi minimal B sebesar 95,50% dan SMP/MTs terakreditasi minimal B sebesar 90,96%. Perkembangan persentase SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi minimal B dari tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.20 Persentase SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi B

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase SD/MI Yang Terakreditasi Minimal B (%)	93,71	92,95	93,59	87,9	95,50
2.	Persentase SMP/MTS Yang Terakreditasi Minimal B(%)	84,66	81,71	82,42	81,82	90,96
3.	Persentase sekolah yang memenuhi SNP (%)	73,33	66,24	64,87	58,84	61,54

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Data di atas juga menunjukkan bahwa sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan juga menurun. Pada tahun 2020 sekolah yang memenuhi SNP hanya sebesar 61,54%, sehingga masih banyak sekolah yang belum memenuhi kualitas minimal sesuai standar nasional pendidikan. Data di atas menunjukkan bahwa kondisi sekolah dan tata kelola sekolah cenderung turun. Adanya penurunan kualitas tatakelola sekolah tersebut perlu dicermati dan dilakukan upaya perbaikan agar ke depan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar meningkat.

c. Pendidik dan tenaga Kependidikan

Pendidik/Guru dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pendidik atau guru yang kompeten dan inovatif serta kreatif akan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Indikator kualitas atau kompetensi pendidik atau guru adalah Persentase guru sesuai kualifikasi, dan persentase guru bersertifikat profesional. Kualifikasi guru adalah minimal lulusan D IV atau Sarjana dan memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketersediaan guru sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Rasio ideal jumlah guru disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar dan siswa untuk SD/MI. SD/MI dengan 6 rombongan belajar minimal harus terdida 7 orang guru atau pendidik. Sedangkan untuk SMP/MTs jumlah guru sesuai dengan jumlah mata pelajaran, rasio ideal untuk guru SMP adalah 25 guru mapel per sekolah.

Selain rasio ketersediaan guru, kompetensi guru juga menjadi salah satu ukuran dari proses pembelajaran. Guru yang kompeten akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi

Guru diukur dengan diperolehnya sertifikasi profesi guru. Di Kabupaten Pemalang persentase guru bersertifikasi sebesar 47,86% pada tahun 2020. Perkembangan guru bersertifikasi di Kabupaten Pemalang menunjukkan kecenderungan meningkat. Adapun guru yang berpendidikan D IV atau Sarjana dan sekaligus memiliki sertifikasi di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan kecenderungan meningkat.

Gambaran rasio guru terhadap jumlah sekolah SD, SMP dan persentasi guru kompetensi dan kualifikasi guru terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21 Rasio Guru terhadap Sekolah SD, SMP dan Persentase Guru Bersertifikat Serta Sesuai Kualifikasi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (%)

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio guru terhadap jml sekolah SD	%	9,80	9,84	9,33	9,08	8,19
Rasio guru terhadap jml sekolah SMP	%	25,27	25,20	24,07	26,72	26,16
Persentase guru yang tersertifikasi	%	48,32	50,82	55,19	51,32	47,86
Pendidikan Minimal bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal D4/Sarjana dan atau bersertifikat pendidik untuk jenjang SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan kesetaraan	%	56,86	63,43	65,23	64,64	36,21
pemenuhan jumlah Guru Kelas sesuai jumlah sekolah jenjang SD	%	9,80	9,84	9,33	9,08	9,31
Pemenuhan jumlah Guru Mata Pelajaran sesuai jumlah jam pelajaran jenjang SMP	%	25,27	25,20	24,07	26,72	34,08
Pemenuhan jumlah tutor sesuai jumlah Rombongan Belajar jenjang PAUD dan Pendidikan Kesetaraan	orang	1.052	1.061	1.041	1.057	1.072
Kepala Satuan Pendidikan yang telah lulus Pelatihan Calon Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0	58,66	60,75

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa belum semua guru memenuhi kualifikasi D IV/S1 untuk guru dari TK sampai jenjang pendidikan SMP. Kondisi ini menunjukkan dari aspek pendidikan sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi mereka setara dengan pendidikan yang mereka tempuh. Sebagaimana ketentuan dalam SPM Pendidikan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pendidikan salah satu indikatornya adalah Kepala Satuan Pendidikan lulus pelatihan Calon Kepala Satuan Pendidikan baik untuk TK, SD, SMP maupun Pendidikan

Kesetaraan.

Data tahun 2020 menunjukkan bahwa Kepala Satuan pendidikan yang telah lulus Pelatihan Calon Kepala Satuan Pendidikan sebanyak 60,75%. Hal ini berarti belum semua Kepala Sekolah atau Kepala satuan Pendidikan lulus Pelatihan Calon Kepala Satuan Pendidikan.

d. Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan adalah upaya mengelola tata kelola pelayanan pendidikan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Tata kelola pendidikan diukur dengan tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pendidikan, maka pemenuhan SPM Urusan Pendidikan ini baru tersedia data tahun 2019. Sedangkan untuk pemenuhan buku ajar, karena telah dilakukan pemenuhan sesuai dengan peraturan SPM bidang Pendidikan sebelumnya maka data tersedia mulai tahun 2015.

Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan pada tahun 2020 sebesar 0,45% dan persentase penduduk usia di atas 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan sebesar 0,42%. Angka tersebut cukup baik karena ambang batasnya adalah 1%. Persentase indikator tersebut kecil karena penduduk di usia 7 – 18 tahun sebagian besar telah menempuh pendidikan formal.

Gambaran tingkat ketercapaian SPM bidang pendidikan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020 (%)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan	%	na	na	na	0,4	0,45
2.	Persentase penduduk usia diatas 18 tahun yang belum	%	na	na	na	0,49	0,42

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan						
3.	Ketersediaan buku teks pelajaran 1 Peserta Didik 1 paket per tahun pada jenjang SD	%	na	na	100	100	100
4.	Ketersediaan buku dan alat tulis 1 peserta didik 1 paket per semester pada jenjang SD	%	25,00	33,33	0,62	97,26	100
5.	Ketersediaan buku pegangan guru jenjang SD	%	100	100	100	100	100
6.	Ketersediaan buku teks pelajaran 1 Peserta Didik 1 paket per tahun pada jenjang SMP	%	na	na	100	100	100
7.	Ketersediaan buku dan alat tulis 1 peserta didik 1 paket per semester pada jenjang SMP	%	100,00	100,00	98,90	97,21	100
8.	Ketersediaan buku pegangan guru jenjang SMP	%	100	100	100	100	100
9.	Ketersediaan modul pelajaran 1 peserta didik 1 paket per tahun	%	na	na	100	100	100
10.	Ketersediaan buku dan alat tulis 1 peserta didik 1 paket per semester	%	na	na	100	100	100

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Capaian Indikator SPM untuk penyediaan buku paket dan partisipasi pada pendidikan kesetaraan cukup baik. Bahkan untuk pemenuhan buku ajar dan alat tulis pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.

2. Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi ke dalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan: (1) upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Indikator Kesehatan utama di Kabupaten Pemalang telah menunjukkan angka yang sangat baik yaitu menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi. AKI dan AKB Kabupaten pemalang telah mencapai target SDGs di tahun 2030 yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian indeks keluarga sehat Kabupaten

Pemalang masih dikategori kabupaten tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan dasar kesehatan ibu, bayi dan balita belum mencapai 100%. Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar juga belum mencapai 100%. Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar merupakan dasar surveillance dalam kesehatan di usia anak. Pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif juga masih jauh dari angka 100% dan pada tahun 2020 baru mencapai 36,81%. Penanganan TB juga masih relatif rendah yaitu 29,97%, demikian juga penanganan hipertensi, HIV AIDS, ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), tidak tercapainya pelayanan kesehatan dan penanganan penyakit pada masyarakat Pemalang pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi covid 19, dimana adanya pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah.

Dalam rangka peningkatan upaya promotif dan preventif, beberapa indikator masih belum sesuai dengan kebutuhan. Penduduk yang memiliki jamban sehat baru mencapai 68,92%, tempat umum laik sehat baru mencapai 62,90 dan desa/kelurahan STBM baru mencapai 11,26%, Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baru mencapai 81,48% dan persentase desa siaga aktif mandiri 4,95%. Kondisi ini cukup menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan. Terjadinya wabah COVID 19 dikarenakan perilaku hidup dan bersih sehat belum menjadi kebiasaan bagi sebagian penduduk.

Sarana dan prasarana kesehatan dasar maupun rujukan dalam kuantitas dan kualitas masih belum sesuai dengan kebutuhan. Puskesmas yang terakreditasi baru mencapai 92% dan rumah sakit yang terakreditasi juga 87,5%. Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat baru mencapai 84,83%. Kualitas dan kuantitas yang masih kurang akan memperparah situasi apabila terjadi pandemi seperti Covid 19 yang terjadi di tahun 2020.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.23 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	182	100	67	50	58,85
2.	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	7,43	5,57	5,83	5,58	5,14

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Persentase Balita Stunting	%	21,86	22,94	17,6	16,95	12,68
4.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	-	-	-	0,14	0,17
5.	Rata-rata Capaian SPM Kesehatan	%	-	-	-	68,2	52,95
6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	angka	0,00621	0,00619	0,00617	0,00537	0,00543
7.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	angka	0,017	0,017	0,019	0,017	0,017
8.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	-	-	-	92	100
9.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	%	-	91,49	95,78	95,97	92,60
10.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	-	98,61	96,8	98,09	98,40
11.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	-	99,27	99,21	99,46	99,60
12.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	-	93,71	99,16	99,44	68,40
13.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	-	-	41,60	23,20
14.	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	-	-	31,57	36,80
15.	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	55,04	50,22	65,55	34,90
16.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	24,44	29,12	27,00	26,40
17.	Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	-	17,06	26,73	26,28	32,70
18.	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan	%	-	100	96,64	99,51	61,70

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
19.	Persentase orang terduga tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar kesehatan jiwa sesuai standar	%	-	-	-	58,33	29,80
20.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	-	-	-	90,70	30,90
21.	Persentase Balita gizi Buruk	%	0,046	0,014	0,021	0,013	0,022
22.	Persentase desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	15,32	26,13	44,59	68,92	68,92
23.	Persentase desa/kelurahan STBM	%	0,45	0,45	1,35	11,26	11,26
24.	Persentase tempat-tempat umum laik sehat	%	87,62	87,84	85,87	69,8	62,90
25.	Persentase Tatanan/ Kawasan yang diimplementasikan	%	33,3	55	55	55	50
26.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
27.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
28.	Angka Kejadian Malaria per 1.000 penduduk	/1.000 pddk	0	0	0	0	0
29.	Angka Kesakitan Kusta Per 10.000 penduduk	/10.000 pddk	1,58	1,42	1,59	1,03	1,16
30.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 tahun	/100.000 pddk <15 th	0,57	1,73	3,2	3,59	3,1
31.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	101,85	68,53	29,91	54,71	35,43
32.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
33.	Penderita diare yang ditangani	%	137,74	88,4	91,84	67,17	99,96



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
34.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	68,61	75,24	84,36	83,05	84,83
35.	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan informasi kesehatan	%	100	100	100	100	100
36.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) terakreditasi	%	0	27,27	72,73	92	92
37.	Persentase rumah sakit terakreditasi	%	50	87,5	87,5	87,5	87,5
38.	Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar	%	95	97	97	98	98
39.	Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	30	50	60	70	75
40.	Persentase TMP yang memenuhi syarat kesehatan	%	26,7	35,27	42,82	60,13	58,60
41.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	81,03	80,51	67,98	73,63	81,48
42.	Persentase desa siaga aktif mandiri	%	1,8	2,7	4,5	7,66	4,95
43.	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	%	57,42	54,92	49,88	65,92	57,15
44.	Rata-rata hari perawatan/AV LOS (hari)	Hari	2,93	2,85	2,57	2,7	2,71
45.	Angka kematian bersih /NDR (%)	%	15,91	18,47	16,77	15,34	20,16
46.	Angka kematian kasar /GDR (%)	%	31,99	35,42	32,17	34,55	41,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang.

Kewenangan pemerintah daerah dalam sub urusan sumber daya air meliputi : 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari 35,45 di tahun 2016 menjadi 46 di tahun 2020. Untuk persentase jaringan irigasi kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 66,23% meningkat menjadi 73,04% di tahun 2020. Sementara itu persentase jaringan sungai kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 18,24% tahun 2016 meningkat menjadi 49,28% tahun 2020. Untuk persentase bangunan pengaman pantai kondisi baik menunjukkan penurunan dari 27,08% menurun menjadi 25,89%.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan air minum meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota. Persentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari 89,37% tahun 2016 menurun menjadi 86,20% tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan persampahan meliputi Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. Persentase sarana dan prasarana sampah sesuai dengan standar menunjukkan peningkatan dari 35,82% pada tahun 2016 menjadi 45,67% pada tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan air limbah meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM Bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur menggunakan indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari 73,48% tahun 2016 meningkat menjadi 92,82% pada tahun 2020

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan drainase meliputi Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota. Persentase drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari 65% di tahun 2016 meningkat menjadi 72,16% di tahun 2020

Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan sub urusan bangunan gedung meliputi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 23% menjadi 1,17% pada tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Persentase tingkat kondisi jalan mantap (baik dan sedang) menunjukkan peningkatan dari 67,29% tahun 2016, meningkat menjadi 68,66% di tahun 2020. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan perkembangan fluktuatif dari 46,06% tahun 2016 lalu di tahun 2019 meningkat mencapai 59,80% dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 56,47%. Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektivitas) di wilayah kabupaten menunjukkan penurunan dari 95,39% tahun 2016 menurun menjadi 93,70% pada Tahun 2020.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan jasa konstruksi meliputi 1) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); dan 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Sampai dengan tahun 2020 sebesar 18,01% jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan penataan ruang meliputi Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR menunjukkan kondisi baik yaitu mencapai 100% di tahun 2020. Persentase kebijakan Tata Ruang yang tersedia sampai dengan tahun 2020 mencapai 20%.

Meningkatnya kebutuhan ruang di Kabupaten Pemalang sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, disisi lain keberadaan lahan tetap dan terbatas. Sebagai bentuk upaya penataan pada ruang agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang seimbang antara kepentingan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kegiatan investasi. Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Kegiatan yang sesuai dengan penataan ruang diharapkan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun lingkungan. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam proses pemberian izin usaha di Kabupaten Pemalang salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang ada sehingga tingkat ketaatan terhadap RTR di Kabupaten Pemalang sudah 100% karena jika tidak sesuai dengan peruntukan dalam Tata Ruang tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan. Hal yang masih menjadi tantangan Pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

Capaian kinerja Persentase pemanfaatan ruang tidak sesuai RTR di Kabupaten Pemalang, untuk indikator Persentase Pemanfaatan



ruang sesuai RTR tahun 2016 – 2017 capaiannya adalah 70% karena baru 16 dari 23 Kawasan yang ditentukan peruntukannya dalam RTRW dan terjadi peningkatan dengan ditetapkannya perda RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2020 maka capaian pemanfaatan ruang sesuai RTR sudah tercapai 100%. Program pemanfaatan ruang dituangkan dalam Peraturan Zonasi dan Identifikasi Pemanfaatan Ruang.

Kabupaten Pemalang telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038. Mengamanatkan sebanyak 5 (lima) RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), antara lain Kawasan Perkotaan Pemalang, Kawasan Perkotaan Comal, Kawasan Perkotaan Randudongkal, Kawasan Perkotaan Belik, dan Kawasan Perkotaan Moga. RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Maksud kegiatan penyusunan rencana tata ruang ini untuk melakukan telaah terhadap kondisi eksisting, perencanaan yang telah ada, identifikasi potensi dan masalah dalam rangka memberikan arahan pengembangan dan penataan kawasan dan mengarahkan dan mengakomodasikan kegiatan yang akan tumbuh/ditumbuhkan dan menetapkan syarat-syarat ruang bagi kegiatan tersebut. Saat ini sedang proses finalisasi legalitas RDTR Kawasan Perkotaan Pemalang.

Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	29,93	35,45	39,64	41,02	46,00
2.	% jaringan sungai kondisi baik	%	18,24	32,86	44,23	47,08	49,28
3.	% bangunan pengaman pantai kondisi baik	%	27,08	25,00	25,29	27,97	25,89

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.	% jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66,23	68,17	69,00	70,05	73,04
5.	Persentase tingkat kondisi jalan mantap (baik dan sedang)	%	67,29	69,15	68,85	75,60	68,66
6.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	46,06	49,83	57,12	59,80	56,47
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang	%	21,23	19,32	11,73	15,80	12,18
8.	Persentase terhubungnya pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektivitas) di wilayah kabupaten	%	95,39	95,67	93,61	93,70	93,70
9.	Proporsi panjang jaringan jalan yang terhubung pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi	angka	664,77	666,77	716,79	717,49	717,49
10.	% penduduk terakses sanitasi lingkungan	%	79,46	80,49	83,53	86,46	92,69
11.	% penduduk yang memiliki akses air minum	%	89,37	90,4	93,43	96,2	86,20
12.	% penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	73,48	75,48	83,61	90,38	92,82
13.	% drainase dalam kondisi baik	%	65	66	67	69	71,12
14.	% sarpras sampah sesuai standar (kewenangan baru)	%	35,82	36,24	45,40	45,67	45,67
15.	% Ketaatan terhadap RTR	%	70	70	100	100	100
16.	% bangunan gedung dalam kondisi baik	%	23	27	30	32	1,17
17.	% kepemilikan IMB	%	Na	Na	Na	Na	0,22
18.	IMB yang diterbitkan	Jumlah	244	243	236	274	177
19.	% Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	Na	Na	100	100	100
20.	% Kebijakan TR yang tersedia	%	20	20	20	20	20
21.	% jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi (SBU)	%	0	0	0	0	18,01
22.	Jumlah IUJK yang diterbitkan	Jumlah	109	69	43	63	38

Sumber : DPU Kabupaten Pemalang Tahun 2021

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 (lima) sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2019 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum; 2) Persentase RTLH yang ditangani; 3) Persentase kawasan kumuh; 4) Persentase permukiman kumuh yang tertangani; 5) Persentase rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; 6) Persentase rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota; 7) Persentase kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 188.4/412/2018 telah menetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang seluas 326,82 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan dan 26 desa/ kelurahan. Pemerintah Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kawasan dan permukiman kumuh salah satunya adalah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Capaian indikator persentase kawasan kumuh di Kabupaten Pemalang terus menurun setiap tahunnya dari 2,43 % di tahun 2017 menurun menjadi 1,63 % di tahun 2020. Sedangkan untuk penanganan permukiman kumuh yang ditangani juga mengalami penurunan, hal ini selaras dengan kawasan kumuh yang juga kondisinya semakin menurun. Permukiman kumuh yang ditangani tahun 2017 sebesar 0,08% menjadi 1,02% di tahun 2020.

Capaian indikator cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum di Kabupaten Pemalang mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini sejalan dengan program 100-0-100 yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk persentase RTLH yang ditangani di Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan selama tahun 2016-

2020 dari 4,17 pada tahun 2016 menjadi 21,67 di tahun 2020. Penanganan RTLH ini juga merupakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi melalui anggaran APBD Provinsi.

Capaian rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota tidak bisa dihitung, hal ini karena sampai dengan tahun 2020 tidak ada program pemerintah daerah kabupaten yang memerlukan relokasi rumah penduduk.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase RTLH yang ditangani	%	4,17	11,18	12,36	17,17	21,67
2.	% Kawasan Kumuh	%	NA	2,43	2,35	2,01	1,63
3.	% permukiman kumuh yang tertangani	%	NA	0,08	0,45	1,02	1,02
4.	% rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	NA	NA	100	100	100
5.	% Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	NA	NA	NA
6.	% kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik	%	NA	NA	NA	NA	NA
7.	% rumah susun dalam kondisi baik	%	NA	NA	75,52-	75,52	79,84

Sumber : Dinperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Kebutuhan rumah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar 73.394 unit.

Tabel 2.26 Data Jumlah Backlog Kabupaten Pemalang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Backlog
1	Moga	64.026	16.007	2.604

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Backlog
2	Warungpring	39.311	9.828	2.434
3	Pulosari	56.504	14.126	1.744
4	Belik	105.503	26.376	2.286
5	Watukumpul	65.349	16.337	3.083
6	Bodeh	55.155	13.789	3.203
7	Bantarbolang	72.860	18.215	3.237
8	Randudongkal	98.780	24.695	5.501
9	Pemalang	179.088	44.772	13.236
10	Taman	163.152	40.788	10.408
11	Petarukan	148.268	37.067	8.860
12	Ampelgading	67.132	16.783	4.354
13	Comal	89.610	22.403	4.549
14	Ulujami	100.928	25.232	7.895
	Jumlah	1.305.666	326.417	73.394

Sumber : Dinperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kinerja Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator yaitu :

1) Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib akibat melanggar Perda dan Perbup sehingga mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya ketentraman umum. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 masih terjadi pelanggaran terhadap semua jenis Perda dan Perbup yang mengandung sanksi, yang berarti bahwa capaian indikator ini adalah sebesar 100%. Masih dilanggarnya semua Perda dan Perbup yang mengandung sanksi disebabkan belum optimalnya upaya pencegahan dari Satpol PP, baik berupa sosialisasi maupun patroli deteksi dini.

2) Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum

Kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum adalah kawasan yang menurun pelanggaran Perda dan Perbup-nya. Pembagian kawasan wilayah patroli Satpol PP berdasarkan wilayah kecamatan sehingga terdapat 14 kawasan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 masih terjadi pelanggaran atas semua jenis Perda dan Perbup yang mengandung sanksi di 14 kecamatan, yang berarti bahwa capaian indikator ini adalah sebesar 0%. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan luasnya jangkauan wilayah patroli yang tidak seimbang dengan sumber daya yang ada di Satpol PP.

3) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi : (1) pencegahan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; (2) penindakan berdasarkan Perda dan Perbup melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; (3) koordinasi dan kerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 55% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 75% pada tahun 2020. Meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan : (1) jumlah petugas patroli Satpol PP yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan patroli, sehingga belum semua wilayah Kabupaten Pemalang dapat dijangkau; (2) masih terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum disebabkan deteksi dini tidak dapat dilakukan karena ada wilayah yang belum terjangkau operasi wilayah; (3) masih kurangnya koordinasi antar *stakeholders* dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; (4) belum optimalnya peran linmas karena linmas hanya digunakan secara insidental pada saat-saat tertentu saja; (5) masih kurangnya kapasitas Satpol PP dan linmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai HAM; (6) masih kurangnya penguasaan teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; (7) masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh adanya sarana dan prasarana, meliputi : 1) petugas patroli Satpol PP sebanyak 7 regu dimana masing-masing regu terdiri dari 10 orang; 2) petugas perlindungan masyarakat sebanyak 11.387 orang yang berada di 222 desa/kelurahan; 3) pos keamanan polisi sebanyak 9 pos; 4) pos kamling sebanyak 5.550 pos.

4) Persentase tenaga Linmas yang memiliki kompetensi

Perlindungan masyarakat (linmas) adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam membina tenaga

linmas berupa koordinasi, kerjasama dan peningkatan kapasitas SDM linmas sehingga tersedia linmas yang berkompeten untuk mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum.

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 25% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 45% pada tahun 2020. Artinya dari 11.387 personel Linmas, hanya 5.124 personel yang berkompeten. Meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditentukan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi tenaga linmas yang harus dilakukan tidak hanya oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang tetapi juga Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

5) Persentase warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perbup

Terkait dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum terdapat 1 (satu) indikator yang merupakan amanat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perbup. Target indikator SPM ini tiap tahunnya adalah 100%, namun di Kabupaten Pemalang sampai tahun 2020 capaiannya baru sebesar 57%. Angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan yakni 100% di tiap tahunnya sehingga diperlukan upaya dari seluruh *stakeholder* terkait untuk meningkatkan capaian sesuai dengan target.

6) Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan

Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam menegakkan Perda dan Perbup, yaitu sosialisasi penegakkan Perda dan Perbup, pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup, serta penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup.

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 38% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 56% pada tahun 2020. Meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan : (1) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui muatan Perda dan Perbup yang berlaku; (2) kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup; (3) masih adanya pelanggaran atas Perda dan Perbup. Sehingga diperlukan upaya dari seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup yang berlaku.

7) Persentase personil Satpol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Pembinaan terhadap PPNS yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang adalah pengembangan kapasitas dan karir PPNS.

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 2% pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar 3% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu upaya untuk mendorong personil Satpol PP agar mempunyai kualitas sebagai PPNS. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirim personil Satpol PP untuk mengikuti berbagai pelatihan, diklat atau bimbingan teknis PPNS.

Capaian indikator kinerja sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase kawasan patuh ketenteraman dan ketertiban umum	%	0	0	0	0	0
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	55	60	66	70	75
4.	Persentase tenaga Linmas yang memiliki kompetensi	%	25	30	35	40	45
5.	Persentase warganegara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perbup	%	NA	31	31	46	57
6.	Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan	%	38	31	39	48	56
7.	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	%	2	3	3	2	3

Sumber : Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2021

b. Sub Urusan Kebencanaan

Sub urusan kebencanaan memiliki target yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal kebencanaan. Terdapat 3 (tiga) indikator yang harus dicapai targetnya, yaitu (1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; (2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Target yang dicanangkan untuk ketiga indikator SPM ini tiap tahunnya adalah 100%.

Capaian kinerja untuk ketiga indikator ini di Kabupaten Pemalang masih berada di bawah target SPM, yakni 94% untuk indikator pertama, kemudian masing-masing 94% untuk indikator kedua dan ketiga.

Kabupaten Pemalang secara tipologi wilayah terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi risiko bencana yang dihadapi berupa tanah longsor. Sedangkan di dataran rendah ancaman bencana yang ada berupa banjir, dan juga abrasi di daerah pesisir pantai. Selain itu ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Pemalang adalah bencana letusan gunung berapi. Hal ini karena letak Kabupaten Pemalang yang berada di kaki Gunung Slamet, gunung yang masih dalam kategori aktif. Berdasarkan data dari BNPB, Kabupaten Pemalang memiliki indeks risiko bencana dengan skor 165,97 termasuk kategori tinggi. Sedangkan indeks ketahanan daerahnya sebesar 0,55.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait penanganan pasca bencana, baik dalam kondisi darurat maupun pemulihan infrastruktur. Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten di Kabupaten Pemalang masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Hal tersebut dilihat dari capaiannya yang baru sampai 15% dari total infrastruktur rusak akibat bencana yang dapat ditangani.

Tabel 2.28 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Penanggulangan Bencana

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Resiko Bencana	skor	206	206	185,7	185,7	165,97
2.	Indeks Ketahanan Daerah	skor	0,25	0,27	0,27	0,48	0,55
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	85	86	87	92	94
4.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	80	84	86	90	94

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	90	90	84	90	99,71
6.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan logistik tanggap darurat	%	76	76	90	88	99,79
7.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten	%	10	0	4,65	15	15
8.	Cakupan desa/ kelurahan tangguh bencana	%	0	0	1,35	2,25	3,15

Sumber : BPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

c. Sub Urusan Kebakaran

Kinerja Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam sub urusan kebakaran ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator yaitu :

1) Rasio kejadian kebakaran

Indikator ini untuk mengukur berapa persen tingkat kerentanan kejadian kebakaran di wilayah WMK. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian indikator ini semakin menurun yang berarti bahwa tingkat kerentanan kejadian kebakaran juga menurun. Pada tahun 2016 capaian indikator ini sebesar 100% dan menjadi sebesar 90% di tahun 2020. Walaupun terus menurun tingkat kerentanan kejadian kebakaran masih tinggi. Hal tersebut disebabkan dari kebutuhan WMK di Kabupaten Pemalang sebanyak 6 WMK masih tercukupi sebanyak 3 WMK.

2) Cakupan pelayanan kebakaran

Cakupan pelayanan kebakaran untuk melihat kecepatan pelayanan di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian indikator ini semakin meningkat yang berarti bahwa pelayanan di WMK juga semakin cepat. Pada tahun 2016 capaian indikator ini sebesar 10% dan menjadi sebesar 20% di tahun 2020. Walaupun pelayanan di WMK semakin cepat namun masih jauh dari yang seharusnya. Hal tersebut disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan WMK di Kabupaten Pemalang,

dimana WMK yang tersedia hanya sejumlah 3 WMK dari kebutuhan 6 WMK.

3) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 72,22% pada tahun 2016, turun menjadi 48,05% pada tahun 2017, meningkat menjadi 69,86% pada tahun 2018, turun menjadi 63,44% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 65,52% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masih sangat rendah.

Rendahnya capaian ini disebabkan : (1) banyaknya kejadian kebakaran yang tidakimbang dengan fasilitas pemadam kebakaran, meliputi personil, mobil pemadam kebakaran beserta perlengkapannya; (2) belum tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD yang sesuai standart; (3) masih kurangnya kemampuan petugas pemadam kebakaran; (4) belum optimalnya kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan kebakaran; (5) belum optimalnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sehingga tidak maksimal ketika digunakan; (6) masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

4) Persentase warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Terkait dengan sub urusan kebakaran terdapat 1 (satu) indikator yang merupakan amanat dari SPM, yaitu persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target indikator SPM ini tiap tahunnya adalah 100%, namun di Kabupaten Pemalang sampai tahun 2020 capaiannya baru sebesar 99,57%. Angka tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan yakni 100% sehingga diperlukan upaya dari seluruh *stakeholder* terkait untuk meningkatkan capaian sesuai dengan target.

5) Persentase kejadian non kebakaran yang tertangani

Selain menangani kejadian kebakaran, pemadam kebakaran juga menangani kejadian non kebakaran, seperti gangguan ular, buaya, sarang tawon dan sebagainya. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%.

6) Persentase ketersediaan sarpras proteksi kebakaran

Untuk mencegah dan menangani kebakaran diperlukan dukungan sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang sesuai standart. Ketersediaan sarpras proteksi kebakaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 masih rendah, yaitu sebesar 30% dari kebutuhan yang seharusnya. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama, mengingat pelayanan kebakaran merupakan salah satu SPM yang harus dipenuhi.

7) Persentase desa/kelurahan tanggap kebakaran

Untuk meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ditengah kondisi kurangnya sarana prasana pemadam kebakaran yang ada, maka dibentuklah relawan kebakaran di desa/kelurahan. Relawan kebakaran akan mulai dibentuk pada tahun 2021.

Capaian indikator kinerja sub urusan kebakaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio kejadian kebakaran	%	100	98	96	94	90
2.	Cakupan pelayanan kebakaran	%	10	13	16	18	20
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	72,22	48,05	69,86	63,44	65,52
4.	Persentase warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	99,46	99,57
5.	Persentase kejadian non kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase ketersediaan sarpras proteksi kebakaran	%	40	25	20	30	30
7.	Persentase desa/kelurahan tanggap kebakaran	%	0	0	0	0	0

Sumber : Satpol PP Kabupaten Pemalang Tahun 2021

6. Sosial

Urusan sosial menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Sub urusan pemberdayaan sosial mencakup 1) kewenangan Pemberdayaan sosial Kawasan Adat Terpencil (KAT); 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; dan 4) Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.

Beberapa indikator yang menjawab kewenangan ini antara lain persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dan Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Capaian kinerja untuk indikator-indikator ini sudah baik karena trendnya meningkat, bahkan untuk indikator persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sudah mencapai 100%.

Sub urusan kedua yakni Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan kewenangan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. Indikator untuk kewenangan ini belum memiliki data pendukung yang dapat ditampilkan.

Sub urusan ketiga adalah terkait Rehabilitasi Sosial, dengan kewenangan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari kewenangan ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan

tersebut jelas indikator yang perlu dicapai targetnya adalah terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Adapun yang di dalam panti menjadi kewenangan provinsi.

Sub kewenangan keempat yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun kewenangan untuk sub urusan ini yaitu pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. Salah satu indikator yang menjawab kewenangan ini adalah persentase anak terlantar yang ditangani. Capaian kinerjanya sampai tahun 2020 mencapai 85,27%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sub kewenangan kelima yakni Penanganan Bencana. Penanganan bencana di urusan sosial ini berbeda dengan penanganan bencana pada urusan ketentraman dan ketertiban umum. Penanganan bencana di urusan social lebih diarahkan pada penanganan kondisi psikososial korban bencana. Capaian indikator untuk Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mengalami tren yang positif karena semakin meningkat dengan kondisi terakhir di tahun 2020 sebesar 54,73%.

Sub kewenangan terakhir dari urusan sosial adalah pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi segala bentuk pemeliharaan, pembangunan dan pelayanan pemakaman bagi pahlawan.

Kinerja urusan sosial di Kabupaten Pemalang dari tahun 2016-2020 dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PMKS/PPLS yang tertangani	%	18,75	64,00	75,14	87,84	80,82
2.	Persentase (%) PMKS/PPLS skala kab yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	18,41	15,95	17,71	19,66	38,28
3.	Persentase (%) PMKS/PPLS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,15	0,09	0,14	0,002	1,07
4.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	11,74	23,16	34,56	46	54,73

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,97	3,99	10,37	0,07	24,18
6.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)	%	19,33	27,63	35,92	44,22	16,04
8.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	7.66	15.32	30.18	43.69	47,30
9.	Persentase anak terlantar yang ditangani	%	15,50	28,84	42,17	55,50	85,27

Sumber : Dinsos KBP3A Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Adapun realisasi capaian SPM Bidang Sosial tahun 2020 di Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 5,1%;
2. Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 85,3%;
3. Penduduk lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 11,0%;
4. Gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 39,3%;
5. Korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten Pemalang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100%.

Berdasarkan data realisasi capaian SPM tersebut, maka permasalahan pada urusan sosial yang masih menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar dan penduduk lanjut usia terlantar yang berada di luar panti.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja;

Terdapat 4 sub urusan dalam urusan ketenagakerjaan yang termuat dalam undang-undang 23 tahun 2014. Keempat sub urusan tersebut adalah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, dan Pengawasan

Ketenagakerjaan. Namun untuk sub urusan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Kinerja untuk sub urusan ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase LPKS yang terakreditasi yang angkanya masih sangat kecil yakni 0,03% di tahun 2020. Kemudian indikator Persentase Fasilitasi pelatihan produktivitas, angkanya belum bisa ditampilkan.

Kinerja sub urusan penempatan tenaga kerja dapat dilihat dari pencapaian indikator Persentase tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Persentase Besar pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni dari 98,79% di tahun 2018 menjadi 65,57% di tahun 2020. Sedangkan pencari kerja yang terdaftar dan mampu ditempatkan di pasar kerja juga mengalami penurunan dengan capaian di tahun 2020 hanya sebesar 34,19%.

Indikator yang mewakili sub urusan hubungan ketenagakerjaan meliputi Persentase Perusahaan yang mematuhi aturan ketenagakerjaan; Persentase Perselisihan Ketenagakerjaan; dan Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek.

Capaian kinerja untuk seluruh indikator ketenagakerjaan dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97,10	94,30	98,79	66,14	65,57
2.	Persentase LPKS yang terakreditasi	%	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
3.	Persentase Fasilitasi pelatihan produktivitas	%	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Persentase Besar pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (penyesuaian data)	%	61,45	50,10	64,52	61,77	34,19
5.	Persentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	%	70,95	72,82	73,73	76,19	73,39
6.	Persentase Perusahaan yang mematuhi aturan ketenagakerjaan	%	16,50	16,88	16,75	18,43	19,04
7.	Persentase Perselisihan Ketenagakerjaan	%	87,5	100	87,5	100	100
8.	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek	%	76,14	60,81	57,89	68	92,95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2020

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki tugas sebagaimana UU 23 tahun 2014 adalah perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kewenangan pada perwujudan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terutama pada perempuan rentan di bidang ekonomi, politik sosial dan budaya, pemenuhan hak hak anak, perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan dan anak kebutuhan khusus.

Selain itu peningkatan kualitas keluarga untuk kesetaraan gender di keluarga serta perlindungan anak di keluarga, penyediaan data gender sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keberhasilan pembangunan responsif gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dalam rangka meningkatkan IPG dan IDG indikator yang akan dicapai oleh Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah peningkatan peran perempuan di lembaga pemerintah dan legislatif, penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Berdasarkan data Dinsos KBP3A Kabupaten Pemalang, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan cenderung mengalami penurunan. Pada indikator rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 rasio KDRT menurun menjadi 0,005.

Dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender perlu dilaksanakan PUG (Pengarusutamaan Gender). Sampai dengan 2020 Kabupaten Pemalang telah memiliki pokja PUG dan telah melaksanakan kebijakan PUG yaitu perencanaan responsif gender, penganggaran responsif gender.

Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Presentase kelembagaan PUG yang aktif	%	22,10	27,34	32,58	37,83	48,15
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1,172	1,166	1,160	1,154	1,149

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Rasio KDRT	angka	0,009	0,008	0,007	0,006	0,005
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
6.	Kasus kekerasan perempuan	org	(0,05)24	(0,04)18	(0,06)29	(0,08)35	(0,08)37
7.	Kasus kekerasan anak	org	(0,13)53	(0,12)49	(0,08)31	(0,08)34	(0,08)52
8.	Nilai kab layak anak	Nilai	Pratama	-	Pratama	Madya	Madya
9.	% Desa layak anak	%	-	(22,07) 49	(29,28) 65	(42,79) 95	(0,08)18
10.	% Kecamatan layak anak	%	-	(22,07) 4	(42,86) 6	(7,14) 1	78,57) 11
11.	Kasus perceraian	Jumlah	3353	3638	3971	4120	4752
12.	% Pernikahan dini	%	0,04	0,07	0,04	0,01	4,92
13.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinsos KBP3A Kabupaten Pemalang Tahun 2021

3. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. (PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan)

Untuk mengimplementasikannya Pemerintah Kabupaten Pemalang membentuk lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan pangan dan keamanan pangan di Kabupaten Pemalang. Lumbung pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Pemalang sebanyak 78 dari jumlah tersebut persentase lumbung pangan aktif sebanyak 16,20 %. Persentase lumbung pangan aktif terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase lumbung pangan aktif	%	4,5	9	13,5	14,86	16,20
2.	infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	NA	NA	NA	NA	16,21

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2020

Ketersediaan pangan di Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2016 – 2020 fluktuatif. Selama kurun waktu tersebut ketersediaan pangan mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 2016 – 2020 terjadi surplus energi namun terjadi defisit ketersediaan protein yang sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat. Kondisi perlu perhatian khusus berkaitan dengan ketersediaan pangan pada masa yang akan datang. Gambaran neraca pangan Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34 Neraca Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Skor PPH	skor	77,8	92,6	95,1	95,6	92,6
2.	Angka ketersediaan Energi (kkal/ kapita/hari)	kkal/ kapita/ hari	2.647	2.693	2.701	2.701	2.824
3.	Angka ketersediaan protein (gr/ kapita/hari)	gr/ kapita/ hari	64,2	64,3	66,1	66,1	58,85
4.	Jumlah ketersediaan cadangan pangan	ton	5	15	30	40	50
5.	Persentase Ketersediaan Pangan	%	NA	NA	NA	NA	62,5

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2021

h-

Data di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang berkaitan dengan ketersediaan energi cukup baik. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung skor PPH. PPH hasil perhitungan selanjutnya digolongkan berdasarkan empat kategori yaitu sangat kurang (< 55), kurang (55 – 69), cukup (70 – 84) dan baik (>85). Dengan Skor PPH pada tahun 2020 sebesar 92,6 termasuk dalam kategori baik.

Ada sembilan kelompok pangan yang digunakan untuk menghitung PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur serta lain-lain. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Standar Kebutuhan energi penduduk sebesar 2.000 kkal per hari dan kebutuhan protein sebesar 52 gram protein per hari. Dengan ketersediaan energi dan protein sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, kebutuhan kalori energi dan protein sudah memadai.

Di Kabupaten Pemalang terdapat beberapa desa rawan pangan. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai kondisi kontra ketahanan pangan, yaitu kondisi tidak terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutunya), tidak aman, tidak merata dan tidak terjangkau.

Kerawanan pangan dapat dilihat dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Dari aspek produksi, rawan pangan terjadi akibat kemampuan produksi yang tidak seimbang dengan kebutuhan, sehingga kekurangan pasokan dibandingkan permintaan. Dari aspek distribusi adalah ketidakseimbangan pasokan untuk memenuhi

permintaan pangan sehingga terjadi kelangkaan pangan di suatu tempat, waktu, pada jumlah dan harga yang tidak memadai atau ketidakmampuan membeli pangan karena tidak ada daya beli atau karena kemiskinan. Sedangkan dari aspek konsumsi adalah ketidakmampuan dalam memenuhi konsumsi pangan yang sesuai dengan standar kecukupan kalori dan protein, yaitu energi 2.150 kkal/kapita/hari serta protein 57 gr/kapita/hari (standar konsumsi energi dan protein berdasarkan WNPG X tahun 2012).

Beragamnya kondisi dan potensi sumberdaya, maka gangguan terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik kondisi wilayah, sosial-ekonomi, budaya, lingkungan alam serta kejadian antara lain bencana alam, serangan OPT yang mendadak, tanah longsor, kekeringan, serta penurunan nilai tukar karena jatuhnya harga komoditas yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain menurun. Dalam menghadapi hal tersebut perlu adanya antisipasi terhadap gejala-gejala yang dapat mengganggu ketahanan pangan di suatu wilayah dan menimbulkan terjadinya kerawanan pangan.

Pada tahun 2020 di Kabupaten Pemalang terdapat sebesar 15,7% desa rawan pangan. Selain itu untuk menyediakan pangan yang bergizi dan aman bagi masyarakat dilakukan uji terhadap pangan segar di kabupaten Pemalang. Komoditas pangan segar yang diuji selama kurun waktu 2016 – 2020 fluktuatif setiap tahunnya berkisar 4 – 6 komoditas setiap tahun. Secara rinci persentase daea rawan pangan dan komoditas pangan yang diuji di Kabupaten Pemalang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 Persentase Desa Rawan Pangan dan Jumlah Komoditas Segar yang diuji Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	% penurunan Desa Rawan Pangan	%	17,57	17,1	16,6	15,7	15,7
2.	Persenatase pangan segar yang aman	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	NA	NA	NA	NA	40

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Pemalang masih terdapat daerah rawan pangan namun sudah diberikan Program Desa

7
9

Mandiri Pangan. Selain itu Kabupaten Pemalang juga melakukan uji komoditas pangan segar asal tumbuhan agar menjamin keamanan dan ketersediaan pangan. Upaya-upaya tersebut merupakan kegiatan Kewaspadaan Pangan yaitu suatu kesiapan secara terus-menerus untuk mengamati, menemu kenali secara dini dan merespon kemungkinan pangan maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai akibat terjadinya bencana. Dengan kewaspadaan pangan diharapkan masalah kerawanan pangan dapat ditanggulangi secara dini serta dapat mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah seperti kelaparan, gizi buruk, gangguan kesehatan, hambatan-hambatan pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan otak yang akhirnya akan membuahkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain indikator-indikator yang telah diuraikan diatas, pada periode RPJMD saat ini urusan pangan akan menggunakan indikator baru yang sebelumnya pernah dilaksanakan yaitu Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, Persentase pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang dan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar.

4. Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada indikator persentase sengketa pertanahan yang diselesaikan. Indikator tersebut menunjukkan peningkatan dari 32% tahun 2016 meningkat menjadi 100% di tahun 2020. Sementara itu dalam rangka penataan pertanahan, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memiliki aplikasi database pertanahan di tahun 2018-2020 sebanyak 1 aplikasi.

Perkembangan kinerja indikator urusan pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sengketa pertanahan yang diselesaikan	%	32	60	70	90	100
2.	Jumlah Aplikasi data base tanah pmda	sistem	NA	NA	1	1	1
3.	Bidang tanah yang bersertifikat	%	NA	39,43	44,21	52,22	58,08

Sumber : Dinperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Program sertifikasi lahan yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam pemberian bantuan keuangan untuk Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Tahun 2020 sebesar Rp5.887.500.000 untuk 39.250 bidang. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran tanah yang dimiliki.

Tabel 2.37 Rekap bantuan keuangan PTSL Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Desa	Target		Realisasi	
			Bidang	Bantuan Keuangan	Bidang	Bantuan Keuangan
1	2018	36 Desa	46.000	6.900.000.000	32.037	4.805.550.000
2	2019	32 Desa	53.906	8.085.900.000	53.551	8.032.650.000
3	2020	26 Desa	58.000	8.700.000.000	39.250	5.887.500.000
4	2021	29 Desa	60.000	9.000.000.000	Dalam proses	Dalam proses

Sumber : Dinperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2021

5. Lingkungan hidup

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami trend peningkatan, meskipun tidak cukup signifikan. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Pemalang sebesar 66,22, meningkat tipis menjadi 68,58 pada tahun 2020. Nilai sebesar 68,58 masuk pada kategori cukup. Terdapat 3 komposit yang digunakan dalam perhitungan IKLH, yaitu: 1) Indeks kualitas/ pencemaran air; 2) Indeks kualitas/ pencemaran udara dan 3) Indeks tutupan lahan. Capaian Indeks kualitas air di Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami trend fluktuatif cenderung menurun, tahun 2016 tercatat indeks kualitas air sebesar 46,67 meningkat menjadi 47,33 pada tahun 2020. Untuk indeks kualitas udara di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 75,96 pada tahun 2016 menjadi 85,62 di tahun 2020. Indeks tutupan lahan mengalami trend meningkat selama 5 tahun terakhir, capain indeks tutupan lahan pada tahun 2016 sebesar 73,52 meningkat menjadi 75,56 di tahun 2020.

Capaian indikator jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik pencegahan pencemaran air di Kabupaten Pemalang sudah mencapai 100 % sampai dengan tahun 2019, tetapi menurun menjadi 87,50 pada tahun 2020. Indikator persentase lahan kritis memerlukan perhatian lebih di tahun yang akan datang, karena capaian tahun 2020 baru sebesar 0,0263 %. Meskipun kondisinya setiap tahun meningkat tetapi tidak cukup signifikan. Sampai dengan tahun 2020 terdapat lahan kritis dengan luas 49.978,97 Ha.

Indikator selanjutnya adalah persentase timbulan sampah yang ditangani, meskipun selama 5 tahun mengalami trend peningkatan tetapi belum cukup signifikan untuk menangani timbulan sampah di Kabupaten Pemalang. Capaian indikator persentase timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2016 sebesar 61 %, secara bertahap meningkat sehingga pada tahun 2020 menjadi 74,97%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengurangi timbulan sampah di masyarakat, salah satunya adalah pengurangan sampah melalui program 3R. Capaian indikator persentase jumlah sampah terkurangi melalui 3R tahun 2016-2020 perkembangannya cukup bagus, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sadar untuk mengelola sampahnya sendiri. Capaian tahun 2016 sebesar 4 % meningkat cukup signifikan ditahun 2020 menjadi 22 %.

Selengkapnya capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	IKLH	Indeks	66,22	65,71	68,51	68,88	68,58
2.	Indeks kualitas Air	Indeks	46,67	48,33	45,83	47,06	47,33
3.	% Pengujian Kualitas Air	%	100	100	100	100	100
4.	% Mata Air yang dilindungi	%	50,61	50,61	50,61	50,61	50,61
5.	% Jumlah Usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknik	%	100	100	100	100	87,50

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	pengegasan pencemaran air						
6.	% Dokumen Rencana pembangunan kabupaten terintegrasi RPPLH	%	N/A	100	100	100	100
7.	Indeks kualitas Udara	Indeks	75,96	89,53	86,24	89,27	85,62
8.	% Pengujian Kualitas Udara	%	100	100	100	100	100
9.	% Ketaatan Kegiatan Usaha sumber tidak bergerak yang memenuhi administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	84,21
10.	% data yang tersedia tentang emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	N/A	100	100	100
11.	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	73,52	69,74	73,52	69,95	75,56
12.	% Terwujudnya RTH skala Kabupaten	%	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07
13.	% Penanganan Lahan Kritis	%	0,0081	0,0126	0,0159	0,0263	0,0263
14.	jumlah kampung iklim (Proklam) yang terbentuk	kampung	N/A	N/A	1	2	3
15.	Nilai Adipura	skor	62	64	72,45	72,45	72,45
16.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	%	29	32	37	52	64
17.	% limbah B3 yang terkelola	%	48	52	57	61	65
18.	% Timbulan sampah yang ditangani	%	61	65	67	67,5	74,97
19.	% Jumlah Sampah yang berkurang melalui 3R	%	4	4,5	18	20	22
20.	% terselenggaranya pembinaan pengelolaan lingkungan hidup (Adiwiyata, LBS)	%	100	100	100	100	100

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Indikator kinerja Disdukcapil Kabupaten Pemalang pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 14 (empat belas) indikator yaitu :

a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator ini didapat dari hasil survei kepada masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kantor Disdukcapil Kabupaten Pemalang dan 14 Tempat

Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan. Adapun hal yang dinilai berupa persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 73% pada tahun 2016 menjadi sebesar 77,02% pada tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 berada pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus terus ditingkatkan agar kepuasan masyarakat juga akan terus meningkat.

b. Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disediakan berupa layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, data serta informasi kependudukan dan pencatatan sipil. Capaian indikator ini selama tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 17,97% pada tahun 2016 menjadi sebesar 67,80% pada tahun 2020. Walaupun terus meningkat, capaian indikator ini masih relatif rendah sehingga perlu upaya lebih dari Disdukcapil Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan

Dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh warganegara adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 59,86% pada tahun 2016 menjadi sebesar 73,11% pada tahun 2020.

d. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil

Dokumen pencatatan sipil yang wajib dimiliki oleh warganegara antara lain akta nikah, akta cerai, akta kelahiran dan akta kematian. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 30,86% pada tahun 2016 menjadi sebesar 88,98% pada tahun 2020.

e. Persentase kepemilikan KTP

Realisasi indikator ini sejak tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 83,5% pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 99,87% pada tahun 2020. Pencapaian tersebut karena adanya upaya dari Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang melakukan terobosan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelayanan KTP elektronik secara jemput bola dan home visit bagi lansia dan difabel.

Capaian persentase kepemilikan KTP pada tahun 2020 sebesar 99,87% dari target sebesar 92 %, realisasi ini meningkat pesat karena adanya pelaksanaan moyan (mobil pelayanan) yang diintensifkan karena ada Pilkada dan Pilkadaes. Status capaian indikator kinerja persentase kepemilikan KTP pada tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 telah tercapai. Pada akhir RPJMD 2016-2021, indikator ini ditargetkan sebesar 96,35% dan dapat direalisasikan sebesar 99,87%.

f. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kepemilikan KK di Kabupaten Pemalang dari tahun 2016-2020 semakin meningkat, yaitu sebesar 96,09% pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 98,44% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki KK.

g. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kepemilikan KIA baru dilaksanakan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2018. Pelaksanaan di Kabupaten Pemalang melalui tahapan sosialisasi, pemenuhan sarana prasarana dan penganggaran blanko KIA. Capaian kepemilikan KIA selama kurun waktu tahun 2018-2020 terus meningkat, yaitu sebesar 0,05% pada tahun 2018 dan menjadi sebesar 21,01% pada tahun 2020. Adapun hambatan terkait penerbitan KIA adalah terbatasnya sarana prasarana yang tersedia, seperti *ribbon* dan *scanner*.

h. Persentase anak memiliki akta kelahiran

Akta kelahiran sangat penting agar anak memperoleh pelayanan publik dari pemerintah maupun non pemerintah kedepannya.

Persentase anak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Pemalang sejak tahun 2018 telah mencapai target Nasional (di atas 85%), yaitu tahun 2018 sebesar 87,29% dan tahun 2020 sebesar 94,21%. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target berupa : sosialisasi, pelayanan akte kelahiran bayi secara jemput bola, pelaksanaan isbat nikah bagi masyarakat di desa dan keluarga yang kurang mampu, serta kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, PKK dan jalur pendidikan.

i. Kepemilikan akta nikah

Akta nikah yang diterbitkan oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang adalah akta nikah untuk penduduk non muslim. Sedangkan untuk penduduk muslim, surat nikah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kepemilikan akta nikah selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 6,8% dan menjadi sebesar 15,6% pada tahun 2020.

j. Kepemilikan akta kematian

Kepemilikan akta kematian selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 35,15% dan menjadi sebesar 61,72% pada tahun 2020. Meskipun capaian setiap tahun meningkat namun masih perlu didorong agar lebih meningkat lagi pencapaiannya. Kendala yang dialami yaitu masih adanya penduduk yang kurang memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen akta kematian sehingga baru mengurus jika ada kepentingan.

k. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

OPD yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang akan diberikan hak akses untuk pemanfaatan data kependudukan melalui web portal. Namun, tidak semua OPD yang telah melakukan perjanjian kerjasama akan diberikan hak akses, karena harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum

dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, meliputi tersedianya jaringan tertutup (VPN), sudah melakukan kerjasama (PKS) dengan Disdukcatpil dan sudah menyusun juknis (PoC). Pada tahun 2020, ada 4 (empat) OPD atau sebesar 10,26% OPD yang sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

l. Persentase data kependudukan yang mutakhir

Mengingat perkembangan jaman yang semakin maju, diperlukan tata kelola yang ringkas, aman dan valid. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggungjawab pemerintah sehingga perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Capaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 98,85% yang mengindikasikan bahwa kualitas data kependudukan yang dilayani oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang sudah tinggi.

m. Persentase informasi kependudukan yang tersedia

Strategi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pemalang adalah dengan pemutakhiran dan peningkatan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan kualitas informasi kependudukan sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dapat mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Guna peningkatan kualitas informasi kependudukan telah dilakukan kegiatan entry data manual akte-akte pencatatan sipil yang telah diterbitkan sebelum terbangunnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pada tahun 2020 baru tercapai 31,47% entry data guna melengkapi elemen biodata penduduk.

n. Persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) yang tersedia

Indikator persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) merupakan indikator SDG's. Registrasi tersebut didukung oleh kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil dan kegiatan peningkatan pelayanan akta kematian dengan capaian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 capaiannya sebesar 54,16% dan menjadi sebesar 71,64% pada tahun 2020.

Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pemalang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	73	74	75	76	77,02
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	17,97	18,83	20,28	21,56	67,80
3.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	59,86	60,65	65,09	66,92	73,11
4.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	30,86	33,52	36,32	40,90	88,98
5.	Persentase Kepemilikan KTP	%	83,5	85,50	98,55	99,79	99,87
6.	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	96,09	96,44	96,68	97,71	98,44
7.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0	0	0,05	3,27	21,01
8.	Persentase anak memiliki akta kelahiran	%	81,50	83,15	87,29	90,8	94,21
9.	Kepemilikan akta nikah	%	6,8	9,1	12,06	14,2	15,6
10.	Kepemilikan akta kematian	%	35,15	41,84	45,91	59,33	61,72
11.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	0	0	0	0	10,26
12.	Persentase data kependudukan yang mutakhir	%	NA	NA	NA	NA	98,85
13.	Persentase informasi kependudukan yang tersedia	%	NA	NA	NA	NA	31,47
14.	Persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) yang tersedia	%	54,16	58,39	61,69	69,44	71,64

Sumber :Dindukcatpil Kabupaten Pemalang Tahun 2021

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator yaitu :

a. Indeks Desa Membangun (IDM)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, IDM Kabupaten Pemalang terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,627 pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 0,7167 pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata desa di Kabupaten Pemalang berada pada status Desa Maju yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

b. Persentase Desa Mandiri

Indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya sesuai dengan indikator SDG's (Sustainable Development Goal's) adalah persentase desa dengan status mandiri. Capaian selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebesar 0% atau sebanyak 0 desa pada tahun 2016, sebesar 2,370% atau sebanyak 5 desa pada tahun 2017, sebesar 2,844% atau sebanyak 6 desa pada tahun 2018, sebesar 2,844% atau sebanyak 6 desa pada tahun 2019 dan sebesar 4,265% atau sebanyak 9 desa pada tahun 2020. Capaian indikator persentase desa dengan status mandiri masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya bersama-sama dari semua *stakeholders* terkait untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

c. Persentase desa berdaya

Desa berdaya adalah desa yang mampu mengelola potensi dan masalah untuk meningkatkan PADes melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kelembagaan dan

pemberdayaan lembaga desa serta masyarakat desa sesuai kewenangan secara partisipatif maupun kerjasama desa. Suatu desa dinyatakan berdaya bila memiliki batas desa, sarpras kewenangan desa dalam kondisi baik, PADes-nya meningkat dari hasil kerjasama desa, buku administrasi pemerintahan desa-nya lengkap, penyusunan dokumen pemerintahan desa-nya tepat waktu, mendigitalisasikan administrasi pemerintahan desa dan layanan masyarakat, serta mempunyai LKD dan LEM yang berdaya. Sampai dengan tahun 2020, belum ada desa yang memenuhi kategori desa berdaya, sehingga capaian indikator ini sebesar 0%.

d. Persentase desa tertata

Suatu desa dinyatakan tertata apabila memenuhi salah satu unsur dari : (1) merupakan hasil pemekaran desa, (2) mempunyai batas desa, (3) mempunyai rencana tata ruang wilayah desa, dan (4) mempunyai sarana dan prasarana desa dalam kondisi baik. Pada tahun 2020, hanya ada 1 (satu) desa yang tertata atau sebesar 0,47% yaitu Desa Sikasur Kecamatan Belik. Penataan desa yang dilaksanakan adalah pemekaran desa, dimana Desa Sikasur mekar menjadi Desa Sikasur dan Desa Sodong Basari.

e. Persentase desa yang meningkat Pendapatan Asli Desa (PADes) nya dari hasil kerjasama desa

Kerjasama desa yang dapat dilakukan berupa :(1) kerjasama antar desa, (2) kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, dan (3) kerjasama dalam kawasan perdesaan. Dinpermasdes Kabupaten Pemalang memfasilitasi kerjasama desa tersebut agar mendapatkan hasil yang dapat menambah PADes.

Pada tahun 2020, sebanyak 36,49% atau sebesar 77 desa yang PADes-nya bertambah dari hasil kerjasama desa. Belum semua kerjasama desa yang dilaksanakan mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga dibutuhkan dukungan dari *stakeholders* terkait untuk meningkatkan hasil capaian kerjasama desa

f. Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik

Suatu desa dinyatakan beradministrasi pemerintahan baik

apabila buku administrasi pemerintahan desa-nya terisi lengkap, dokumen-dokumen pemerintahan desa-nya tersusun tepat waktu, layanan pemerintahan desa-nya dilaksanakan secara digital dan data desa tersaji secara digital.

Pada tahun 2020 belum terdapat desa yang mempunyai administrasi pemerintahan desa baik, sehingga capaian indikator ini sebesar 0%. Capaian indikator ini sangat rendah sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dari Dinpermasdes Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan fasilitasi kepada desa.

g. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya

LKD berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. LKD meliputi rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, posyandu dan lembaga pemberdayaan masyarakat. LEM merupakan lembaga yang mengatur fungsi konsumsi, produksi dan distribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. LEM yang dibina oleh Dinpermasdes Kabupaten Pemalang meliputi BUMDesa, BUMDes Bersama, pasar desa, UPK.

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2017-2020 adalah sebesar 5,63% pada tahun 2017, sebesar 10,97% pada tahun 2018, sebesar 13,11% pada tahun 2019 dan sebesar 15,61% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya keberdayaan LKD dan LEM sehingga perlu pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dari instansi terkait.

Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pemalang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.40 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,627	0,6699	0,6835	0,6962	0,7167
2.	Persentase desa mandiri	%	0	2,370	2,844	2,844	4,265
3.	Persentase desa berdaya	%	0	0	0	0	0
4.	Persentase desa tertata	%	NA	NA	NA	NA	0,47
5.	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa	%	NA	NA	NA	NA	36,49
6.	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	%	NA	NA	NA	NA	0
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya	%	NA	5,63	10,97	13,11	15,61

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Tahun 2021

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi memadukan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan pengendalian penduduk . Selain itu juga mengatur kelahiran melalui pengendalian TFR (Total Fertility Rate). TFR adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas saat TFR dihitung (Kasto, 1995).. TFR Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah 2,3 artinya rata rata perempuan di Jawa Tengah memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan TFR maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran supaya menurunkan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang pada anak.

Sampai dengan tahun 2020 cakupan peserta KB Aktif mencapai angka 70,84% angka ini relatif cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65%). Namun demikian Kabupaten Pemalang memiliki Unmet Need (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) mencapai 10,12%. Capaian ini juga cukup baik dibandingkan rata-rata capaian jawa Tengah (9,6%).

Tabel 2.41 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan peserta KB aktif	%	81,51	81,53	81,55	81,57	70,84
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO)	%	8,47	8,42	8,37	8,32	10,12
3.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	51,85	51,8	51,75	51,73	77,63
4.	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	2,47	2,46	2,45	2,45	2,45
5.	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja aktif	%	100	100	100	100	100
6.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	88,30	88,48	88,66	88,83	89,19
7.	Presentase Kecamatan Yang Memiliki PIK KRR	%	100	100	100	100	100
8.	Angka Drop out KB	%	12,51	12,03	11,55	11,07	10,59
9.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84,91	84,98	85,048	85,115	85,18
10.	TFR	%	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51

Sumber : Dinsos KBP3A Kabupaten Pemalang Tahun 2021

9. Perhubungan

Capaian kinerja indikator urusan perhubungan di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan yang baik, yaitu persentase perlengkapan jalan (APILL dan rambu) mencapai 85% pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017 sebesar 355 sedangkan Tahun 2020 jumlah Laka 461 artinya ada peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (trend negatif) yang seharusnya setiap Tahun ada penurunan (trend positif) dikarenakan berbagai faktor sebagai berikut :

1. Faktor Human Error merupakan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian manusia seperti mengantuk, lelah, melamun/ tidak fokus;
2. Faktor Jalan dimana kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak, jalan berlubang, jalan tikungan dan jalan naik turun

3. Faktor Kendaraan berupa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kondisi kendaraan tidak baik seperti rem kendaraan blong, mesin kendaraan mati, dan rantai kendaraan putus;
4. Faktor Lingkungan dimana kecelakaan lalu lintas karena lingkungan sawah, lingkungan pasar (keramaian);
5. Faktor Alam, kecelakaan lalu lintas disebabkan karena adanya bencana alam, pohon tumbang, kabut, hujan deras, angin kencang;
6. Faktor Minimnya Sarana Perlengkapan Jalan seperti rambu-rambu jalan, penerangan jalan, pagar pengaman jalan.

Dilihat dari segi Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dan kerugiannya pada tahun 2020 terdapat data sebagai berikut;

Tabel 2.42. Tabel 2.42. Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dan kerugiannya pada tahun 2020

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	36	5	0	41	Rp 8.000.000	
2	PEBRUARI	41	8	0	50	Rp 14.500.000	
3	MARET	42	8	0	47	Rp 20.600.000	
4	APRIL	25	6	0	21	Rp 5.000.000	
5	MEI	39	8	0	42	Rp 11.400.000	
6	JUNI	40	14	0	51	Rp 25.300.000	
7	JULI	34	11	0	33	Rp 19.700.000	
8	AGUSTUS	36	8	1	41	Rp 37.500.000	
9	SEPTEMBER	53	11	0	50	Rp 26.300.000	
10	OKTOBER	35	9	0	38	Rp 37.900.000	
11	NOVEMBER	41	2	0	51	Rp 22.750.000	
12	DESEMBER	39	10	0	42	Rp 19.600.000	
	TOTAL	461	100	1	507	Rp 248.550.000	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Sesuai SK Bupati Nomor 188.4/108/Tahun 2021 tentang Penetapan tipe dan lokasi terminal penumpang di Kabupaten Pemalang, Menyebutkan bahwa jumlah terminal penumpang sebanyak 8 terminal penumpang tipe C yaitu terminal Randudongkal, terminal Belik, terminal Moga, terminal Angkutan Kota, terminal Petarukan, terminal Warungpring, terminal Grosir Comal dan terminal Pasar Comal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik

f

Indonesia Nomor PM 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas terminal meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Kondisi fasilitas utama pada terminal tipe C di Kabupaten Pemalang di sampaikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.43. Kondisi fasilitas utama pada terminal tipe C di Kabupaten Pemalang

No	Fasilitas	Terminal							
		Randu dongkal	Belik	Moga	Warung pring	Angkot PML	Grosir Comal	Peta rukan	Pasar Comal
1	Jalur Keberangkatan	√	√	√	X	√	√	√	√
2	Jalur Kedatangan	√	√	√	X	√	√	√	√
3	Ruang Tunggu Penumpang / Pengantar dan / atau penjemput	√	√	√	X	√	√	√	√
4	Tempat naik turun penumpang	√	√	X	X	√	√	√	√
5	Tempat Parkir Kendaraan	√	√	√	X	√	√	√	√
6	Fasilitas Pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	X	√	√	√	√
7	Perlengkapan Jalan	√	√	√	X	√	√	√	√
8	Media informasi	√	√	X	X	√	X	X	√
9	Kantor penyelenggara terminal	√	√	√	√	√	√	√	√
10	loket penjualan tiket	√	√	X	X	X	√	X	X

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Ket :

- √ Ada
- X Tidak ada

Belum optimalnya pemanfaatan terminal tipe C di Kabupaten Pemalang, sehingga Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pemenuhan fasilitas utama dan pengembangan terminal.

Indikator data load factor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44 . Tabel Load Factor trayek angkutan tahun 2020

Trayek A	50 %	Trayek F	50 %
Trayek B	50 %	Trayek G	24 %
Trayek C	0	Trayek G1	39 %
Trayek D	0	Trayek H	24 %
Trayek E	24 %	Trayek I	47 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Berdasarkan hasil kajian evaluasi jaringan trayek angkutan perkotaan yang dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, untuk data load factor sebesar 50% adalah trayek A, B dan F untuk trayek yang lainnya di bawah 50%. Sedangkan trayek yang melayani angkutan perdesaan belum pernah dilakukan kajian, sehingga data load factornya belum diketahui. terjadi karena adanya pandemi Covid 19 sehingga angkutan umum belum semuanya mengurus perpanjangan ijin trayek.

Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terakreditasi B pada tahun 2018 dan tahun 2020. Jumlah Kendaraan Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebanyak 8.930 kendaraan jumlah kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 4.916 kendaraan yang lulus uji kir sebanyak 4.821 kendaraan Persentase kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan menunjukkan perkembangan cenderung menurun yang di akibatkan karena adanya edaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pencegahan penularan Covid-19, dan pada tahun 2020 capaian indikator tersebut sebesar 55,05%, bila di dibandingkan dengan tahun 2016 persentase kendaraan yang melakukan uji kir sebanyak 117 % pada tahun 2016 masih banyak kendaraan di luar KBWU yang melakukan uji kir di Kabupaten Pemalang. Hal ini menyebabkan tingginya potensi kecelakaan karena rendahnya kendaraan umum yang memenuhi aspek/ standar keselamatan, salah satu faktor ini di karenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kir kendaraan bermotor.

Persentase zona parkir yang sudah terkelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 74,04% pada tahun 2016 menjadi sebesar 78,73% dari jumlah potensi parkir sebanyak 446 titik parkir yang telah di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebanyak 351 titik di tahun 2020. Di Kabupaten Pemalang terdapat 2 stasiun Kereta Api dengan jumlah perlintasan tidak sebidang 1 titik, perlintasan sebidang sebanyak 48 titik dan 14 titik sudah dilengkapi dengan pos dan palang pintu kereta api. Sedangkan data Data V/C Ratio/Level of Services di ruas jalan kewenangan kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 2.45 . Tabel V/C ratio di ruas jalan kewenangan kabupaten

No	Nama Jalan	Seksi	Arah	Volume Lalin (V)	Kapasitas Jalan (C)	Derajat Kejenuhan	Level Of Service
1	JL. Ahmad Yani			885,5 smp/jam	2757,865 smp/jam	0,31	B
2	JL. Dr. Wahidin			973 smp/jam	2104,68 smp/jam	0,4	B
3	JL. Kolonel Sugiono			985,5 smp/jam	3141,442 smp/jam	0,31	B
4	JL. Jendral Sudirman	Seksi 1	Barat	503,15 smp/jam	1383,6 smp /jam	0,36	B
			Timur	508,65 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,37	B
		Seksi 2	Barat	772,5 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,56	C
			Timur	678,9 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,49	C
		Seksi 3	Barat	710,4 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,51	C
			Timur	617,35 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,45	C

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Perkembangan urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.46 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	kasus	NA	355	343	424	461
2.	Rasio Konektivitas	Angka	NA	NA	NA	NA	81,82
3.	% perlengkapan jalan (APILL dan rambu) dalam kondisi baik	%	77	79	81	83	85

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.	% angkutan umum yang memiliki ijin trayek	%	58,5	77,24	87,71	94,02	97,84
5.	% Terminal C sesuai standar	%	25	25	25	25	25
6.	persentase pengguna moda transportasi umum diperkotaan	%	NA	NA	NA	41	25
7.	% kendaraan bermotor (angkutan penumpang dan barang) melakukan uji kendaraan	%	117	79,7	81,25	71,149	55,05
8.	% zona parkir yang sudah terkelola dengan baik	%	74,04	74,27	74,93	76,42	78,73
9.	% angkutan barang yang dilayani terminal bongkar muat	%	NA	NA	NA	NA	NA
10.	% kelengkapan pelabuhan pengumpan sesuai ketentuan	%	NA	NA	NA	NA	5
11.	V/C rasio	rasio	NA	NA	NA	NA	0,44

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

10. Komunikasi dan informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika terutama terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan capaian indikator kinerja untuk tahun 2016-2020 berdasarkan indeks keterbukaan informasi publik menunjukkan perkembangan yang baik, tahun 2016 sebesar 49% meningkat menjadi sebesar 74,5% pada tahun 2020. Sedangkan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2018 sebesar 3,11 dan tahun 2020 menjadi sebesar 3,34, menunjukkan pengembangan pelaksanaan SPBE yang baik. Sedangkan capaian kinerja bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2020 dapat dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks	49	70	70,8	74,83	74,5
2.	Persentase badan publik (OPD) yang menjalankan kewajiban dalam rangka keterbukaan informasi publik	%	Na	50	70	66	72
3.	Persentase penduduk yang mengakses media milik pemerintah daerah	%	Na	Na	Na	5	9,1
4.	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik pemerintah daerah	%	Na	Na	Na	0,4	7,2
5.	Persentase opini, aspirasi, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	Na	40	52	46	72

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6.	Persentase SDM ASN yang memiliki kompetensi dibidang informasi dan komunikasi	%	Na	Na	50	60	60
7.	Indeks SPBE	Indeks	Na	Na	3,11	2,91	3,34
8.	proporsi penduduk terlayani layanan mobile broadband	%	75	80	92	93,5	94
9.	proporsi individu yang menggunakan internet	%	Na	Na	Na	50,5	53,5
10.	Persentase network terintegrasi	%	10	20	25	30	70,73
11.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Na	Na	11	11	41,17

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2021

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Capaian kinerja urusan koperasi dan UKM terutama capaian persentase KSP/USP yang sehat menunjukkan perkembangan meningkat dari 2016 sebesar 11,81% menjadi 27,56% pada tahun 2020. Sedangkan persentase koperasi yang aktif dan patuh pada tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan dari 72,66% menurun menjadi 25,68% pada tahun 2020. Permasalahan ini akan difasilitasi dan dilakukan pengembangan di kemudian hari. Adapun jumlah usaha mikro dan kecil yang meningkat menjadi usaha menajasi usaha kecil mengalami penurunan dari 0,47% pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar -7,66% yang disebabkan menurunnya kinerja perekonomian daerah akibat pandemic Covid 19. Adapun kinerja urusan koperasi dan UKM selengkapnya dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ksp/usp sehat	%	11,81	11,81	13,38	10,23	27,56
2.	Persentase koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	%	100	275	100	114,28	100
3.	Persentase Koperasi Aktif dan patuh	%	72,66	72,99	73,28	73,62	25,68
4.	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih	%	23,43	34,17	26,85	29,29	0,4

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Persentase koperasi yang dibina	%	35	37	38	39	6,42
6.	Persentase usaha mikro yang berijin	%	22	23	24	25	34,16
7.	Persentase pertumbuhan Usaha mikro	%	6,57	6,85	7,05	7,15	17,5
8.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,83	99,86	99,86	99,87	99,29
9.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	0,047	0,053	0,04	0,053	-7,66
10.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	22	23	24	25	34,16
11.	Persentase UMKM yg dibina	%	1,14	0,7	0,73	1,35	1,18
12.	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	NA	NA	NA	NA	23,79

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang Tahun 2021

12. Penanaman modal

Realisasi nilai investasi di Kabupaten Pemalang menunjukkan angka yang fluktuatif, dari tahun 2016 sebesar Rp. 255.359.969.835, sedangkan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 166.492.408.001. Kondisi fluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2017 belum ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanaman Modal (LKPM) secara online, angka investasi Rp. 28.890.500.000 diperoleh hanya dari data pada saat pengurusan perizinan. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan investasi yang cukup signifikan yang diperoleh dari adanya kewajiban melaporkan kegiatan penanaman modal secara online.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi nilai investasi (PMDN dan PMA)	Rp	255.359.969.835	28.890.500.000	93.634.691.900	1.753.353.206.637	166.492.408.001
2.	Jumlah investor yang berskala nasional	Jumlah	7	13	10	53	34
3.	investor yang diberi insentif	%	0	0	12,5	0	0

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.	realisasi nilai investasi	%	5.107,19	577,81	1.872,69	35.067,00	3.329,84
5.	perijinan yang terintegrasi dalam MPP (Mall Pelayanan Publik)	jenis	0	0	0	0	0
6.	realisasi perijinan investasi	%	118,30	93,48	152,78	119,92	128,32
7.	Persentase peningkatan jumlah investor	%	40	85,71	-38,48	562,5	-35,87
8.	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	%	0	100	100	100	100
9.	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal	%	95,82	99,73	98,95	97,44	98,02
10.	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	%	36	38,64	59,57	43,84	27,61

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2021

13. Kepemudaan dan olahraga

Capaian indikator persentase organisasi kepemudaan yang aktif menunjukkan angka yang stagnan dari tahun 2016-2020 capaian sebesar 70 % dari 20 organisasi kepemudaan. Sedangkan indikator jumlah atlet berprestasi di tingkat regional menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 27 atlet menjadi 50 atlet pada tahun 2019 dan tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga event olahraga ditiadakan. Gambaran selengkapnya dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.50 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan olah Raga

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase atlet yang berprestasi	%	9,0	0,0	7,0	16,7	0
2.	Persentase pemuda menjadi wirausaha pemula	%	NA	NA	NA	NA	0,05

+

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Angka	NA	NA	NA	NA	28,08
4.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Angka	NA	NA	NA	NA	0,05
5.	Persentase gugus depan/SAKA PRAMUKA yang dibina	%	NA	NA	NA	NA	0
6.	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat regional	atlet	27	0	21	50	0
7.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	70	70	70	70	70
8.	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat regional	Atlet	27	0	21	50	0
9.	Persentase anggota pramuka yang berprestasi	%	3,57	10,71	28,57	3,57	0
10.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	28	30	32	34	36
11.	Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kali	7	7	7	7	7
12.	Jumlah Organisasi Pemuda	Kelompok	14	14	14	14	14
13.	Jumlah klub olahraga	Kelompok	15	15	15	15	15
14.	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	Rasio	0	0	0	0	0
15.	Rasio Lapangan olahraga	Rasio	0	0	0	0	0
16.	Persentase prestasi Olahraga	%	NA	NA	NA	NA	47,83

Sumber : Disparpora Kabupaten Pemalang Tahun 2021

14. Statistik

Urusan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang diukur melalui 2 indikator yakni 1) Persentase metadata indikator pembangunan; dan 2) Persentase statistik sektoral sesuai standar. Capaian indikator Persentase metadata indikator pembangunan dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang positif dari 33% ditahun 2017 menjadi 100% ditahun 2020. Indikator Persentase statistik sektoral sesuai standar capaiannya dari tahun 2016-2020 0,02%.

Tabel 2.51 Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase metadata indikator pembangunan	%	Na	33	66	100	100

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Persentase statistik sektoral sesuai standar	%	0	0	0	0	0,02

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Saat ini Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menyusun draft Roadmap Statistik Sektoral dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Pemalang.

15. Persandian

Urusan persandian dapat dilihat dari 2 indikator yaitu: 1) indeks keamanan informasi; dan 2) Persentase konten informasi yang telah diamankan. Capaian indeks keamanan informasi memiliki capaian stagnan 1% dari tahun 2018-2020. Capaian Persentase konten informasi yang telah diamankan pada tahun 2020 sebesar 41,07%.

Tabel 2.52 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks keamanan Informasi	Indeks	Na	Na	1	1	2
2.	Persentase konten informasi yg telah diamankan	%	Na	Na	Na	0,85	41,07

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Pemalang Tahun 2021

16. Kebudayaan

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang dalam urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 8 (delapan) indikator yaitu :

a. Indeks Kebudayaan

Merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran pengembangan kebudayaan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan. Indeks kebudayaan merupakan indikator baru yang merupakan komposit dari dimensi ekonomi budaya, dimensi pendidikan, warisan budaya dan budaya literasi, yang akan mulai dihitung pada tahun 2021.

b. Persentase cakupan kelompok seni yang aktif

Realisasi cakupan kelompok seni aktif pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 41% di tahun 2016 menjadi sebesar 84,75% di tahun 2019. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 83,33%. Kelompok seni aktif tersebut diberi pembinaan dan diberikan kesempatan untuk tampil dalam berbagai event kebudayaan, baik event lokal di kabupaten maupun di provinsi, nasional bahkan internasional. Penurunan realisasi cakupan kelompok seni aktif pada tahun 2020 disebabkan terbentuknya kelompok seni baru sebanyak 30 kelompok sehingga menambah jumlah kelompok seni yang harus dibina.

c. Persentase warisan budaya yang ditetapkan

Warisan budaya terdiri dari warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya. Sedangkan warisan budaya tak benda berupa bahasa, manuskrip, adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Capaian indikator ini selama tahun 2018-2020 adalah sebesar 1,805% pada tahun 2018, meningkat menjadi sebesar 3,57% pada tahun 2019 dan konstan di tahun 2020. Untuk warisan budaya tak benda belum ada yang ditetapkan. Sedangkan untuk warisan budaya benda ada 6 obyek yang sudah ditetapkan.

d. Persentase warisan budaya yang dilestarikan

Capaian indikator ini selama tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 34,5% pada tahun 2016 menjadi sebesar 57,77% pada tahun 2019. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 54,35%. Hal tersebut disebabkan bertambahnya obyek warisan budaya yang harus dilestarikan.

e. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Perkembangan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu 69% di tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 91,3% pada tahun 2019, namun turun menjadi sebesar 90,52% pada tahun 2020. Penurunan realisasi pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya pada tahun 2020 disebabkan ditemukannya benda, situs dan kawasan cagar budaya baru sebanyak 9 unit sehingga menambah jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang harus dilestarikan.

f. Persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2018-2020 selalu 100% karena semua warisan budaya tak benda yang berhasil diinventarisasi pada tahun berkenaan langsung diregistrasikan. Jumlah warisan budaya tak benda yang sudah diregistrasi sebanyak 59 obyek. Walaupun capaian indikator ini selalu 100% Dindikbud Kabupaten Pemalang harus terus melakukan inventarisasi warisan budaya tak benda di Kabupaten Pemalang.

g. Persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2018-2020 selalu 100% karena semua sejarah Pemalang yang berhasil diinventarisasi pada tahun berkenaan langsung diregistrasikan. Jumlah sejarah Pemalang yang sudah diregistrasi sebanyak 7 obyek. Walaupun capaian indikator ini selalu 100% Dindikbud Kabupaten Pemalang harus terus melakukan inventarisasi sejarah asli Pemalang.

h. Persentase warisan budaya benda yang diregistrasi

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 selalu 100% karena semua warisan budaya benda yang berhasil diinventarisasi pada tahun berkenaan langsung diregistrasikan. Jumlah warisan budaya benda yang sudah diregistrasi sebanyak 92 obyek. Walaupun capaian indikator ini selalu 100% Dindikbud Kabupaten Pemalang harus terus melakukan inventarisasi warisan budaya benda di Kabupaten Pemalang.



Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kebudayaan	Indeks	0	0	0	0	0
2.	Persentase cakupan kelompok seni yang aktif	%	41	51	83	84,74	83,33
3.	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	NA	NA	1,805	3,57	3,57
4.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	34,5	37	56,36	57,77	54,35
5.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	69	74	90	91,3	90,52
6.	Persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi	%	NA	NA	100	100	100
7.	Persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi	%	NA	NA	100	100	100
8.	Persentase warisan budaya benda yang diregistrasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang Tahun 2021

17. Perpustakaan

Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusarda) Kabupaten Pemalang pada urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 9 (sembilan) indikator, yaitu :

a. Nilai budaya literasi

Nilai budaya literasi dihitung dari 3 (tiga) komponen, yaitu persentase penduduk yang baca cetak/elektronik, persentase penduduk yang akses internet dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2016-2019 capaian nilai budaya literasi Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, yaitu sebesar 2,97% pada tahun 2016 menjadi sebesar 3,68% pada tahun 2019. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,24%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19 yang melarang adanya kerumunan banyak orang.

b. Indeks pembangunan literasi masyarakat



Indeks pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 2 unsur yaitu pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Pada tahun 2020, indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Pemalang sebesar 7,033 sehingga perlu upaya keras dari Dinpusarda Kabupaten Pemalang untuk meningkatkannya.

c. Persentase perpustakaan terstandarisasi

Standarisasi perpustakaan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan perpustakaan desa/kelurahan. Pada tahun 2020, terdapat 0,59% perpustakaan sudah sesuai standart nasional atau sebanyak 7 perpustakaan.

d. Nilai tingkat kegemaran membaca

Tingkat kegemaran membaca dihitung berdasarkan hasil survei dengan indikator berupa : frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah bahan bacaan. Pada tahun 2020, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 55,25 atau masuk pada kategori sedang. Perlu upaya lebih lanjut dari Dinpusarda Kabupaten Pemalang agar tingkat kegemaran membaca masyarakat bisa meningkat. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah kondisi perpustakaan, sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan.

e. Peningkatan angka kunjungan perpustakaan

Perkembangan realisasi indikator ini selalu mengalami peningkatan dari sebesar 3,78% di tahun 2016 meningkat menjadi 4,82% di tahun 2019. Peningkatan angka kunjungan perpustakaan tersebut dapat dicapai karena adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinpusarda Kabupaten Pemalang, berupa : 1) pengoptimalan pelayanan perpustakaan keliling, baik ke sekolah, desa, kecamatan maupun ruang publik lainnya; 2) dibangunnya pojok baca di Ruang Terbuka Publik (RTP), 3) diadakannya berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca, seperti sosialisasi budaya baca dan literasi, penghargaan gerakan budaya gemar membaca, pelatihan

literasi berbasis inklusi sosial, dan pemilihan duta baca. Namun, pada tahun 2020 realisasi capaian angka kunjungan ke perpustakaan turun menjadi sebesar 1,53% dengan target tahun 2020 sebesar 4,50%, ketidaktercapaian target ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Selama tahun 2020 semua kegiatan pembudayaan gemar membaca dan perpustakaan keliling tidak dilaksanakan.

f. Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia

Capaian persentase koleksi perpustakaan selama kurun waktu tahun 2016-2020 selalu meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 50,72%, naik menjadi sebesar 53,57% pada tahun 2017, naik menjadi sebesar 56,51% pada tahun 2018, naik menjadi sebesar 59,62% pada tahun 2019 dan naik menjadi sebesar 77,89% pada tahun 2020.

g. Persentase perpustakaan aktif

Pada tahun 2016 jumlah perpustakaan sekolah, desa dan masyarakat yang dibina sebanyak 30 unit, sementara yang aktif sebesar 93,33% atau sebanyak 28 perpustakaan. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah perpustakaan yang dibina yaitu menjadi sebanyak 45 unit dengan persentase perpustakaan yang aktif sebesar 93,33% atau sebanyak 42 perpustakaan.

h. Peningkatan pengunjung iPemalang;

Upaya peningkatan budaya baca masyarakat tidak hanya dilakukan dengan kunjungan langsung pada tempat-tempat layanan perpustakaan. Dinpusarda Kabupaten Pemalang melakukan inovasi baru di tahun 2018 yaitu cara baca dengan digital melalui iPemalang. iPemalang merupakan perpustakaan digital berbasis media sosial yang memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Pemalang membaca ribuan buku tanpa batasan ruang dan waktu. Pada tahun 2020 capaian peningkatan pengunjung iPemalang adalah sebesar 1,5%.

i. Persentase naskah kuno dan koleksi etnis daerah yang dilestarikan

9

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Naskah kuno milik daerah yang dilestarikan melalui Dinpusarda Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 8 eksemplar.

Sedangkan koleksi budaya etnis nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 8 (delapan) unsur kebudayaan:

- 1) Bahasa, mencakup 784 bahasa daerah termasuk di dalamnya tata bahasa/aksara, kamus, dan hasil kajian bahasa daerah.
- 2) Peralatan hidup/teknologi (arkeologi, pra-sejarah)
- 3) Mata pencaharian hidup/ekonomi, meliputi : sistem bercocok tanam; sistem berburu; sistem berdagang;
- 4) Organisasi sosial; organisasi adat; tata cara adat dan upacara adat.
- 5) Sistem pengetahuan, meliputi: ilmu obat-obatan tradisional; ilmu transformasi ajaran
- 6) Religi, meliputi : sistem religi; semua ritual keagamaan
- 7) Kesenian, meliputi antara lain : seni tekstil tradisional, seni relief/ukir, seni arsitektur, seni tari, seni suara tradisional, seni beladiri, seni drama, seni masak, seni sastra, seni sastra lisan/folklor.
- 8) Budaya Melayu meliputi: bahasa, seni, budaya, sastra, dan adat istiadat.

Koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan di Dinpusarda Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 50 eksemplar. Capaian indikator ini selama tahun 2016-2020 sebesar 55,50%.

Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai budaya literasi	%	2,97	2,17	2,75	3,68	1,24
2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	NA	NA	NA	NA	7,033
3.	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%	NA	NA	NA	NA	0,59
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	55,25
5.	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan	%	3,78	3,78	4,07	4,82	1,53
6.	Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia	%	50,72	53,54	56,51	59,62	77,89
7.	Persentase perpustakaan aktif	%	93,33	93,33	93,33	93,33	93,33
8.	Peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang	%	NA	NA	0	100	1,5
9.	Persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

18. Kearsipan.

Kinerja Dinpusarda Kabupaten Pemalang pada urusan kearsipan ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu:

a. Indeks kearsipan

Indikator ini diperoleh dari pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal diperoleh dari hasil penilaian Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Pengawasan kearsipan internal diperoleh dari hasil penilaian Dinpusarda kepada OPD meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Capaian indeks kearsipan pada tahun 2020 adalah sebesar 42%. Hasil yang masih rendah ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan OPD dalam mengelola arsip sehingga Dinpusarda Kabupaten Pemalang perlu berupaya keras dalam pendampingan pengelolaan arsip di OPD.

b. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja

Capaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 7,12%. Hasil yang masih rendah ini disebabkan masih rendahnya arsip aktif dan in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dan belum ada arsip yang dimasukkan ke dalam JIKD karena belum mempunyai aplikasi SIKD.

c. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

Capaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 5,45%. Capaian yang rendah ini disebabkan pada tahun 2020 tidak ada bencana, perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan sehingga tidak ada arsip yang diselamatkan serta tidak ada penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

d. Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik masih sangat rendah, yaitu sebanyak 5,77% pada tahun 2016. Namun, turun menjadi sebanyak 4,81% pada tahun 2017, hal ini disebabkan adanya SOTK yang menyebabkan perubahan jumlah total OPD. Selanjutnya meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi sebanyak 6,41% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebanyak 9,75% atau sebanyak 4 OPD. Dinpusarda Kabupaten Pemalang harus lebih intens dalam membina dan mendampingi pengelolaan arsip OPD.

e. Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 belum ada pengajuan ijin penggunaan arsip tertutup sehingga capaian persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup sebesar 0%.

f. Cakupan penanganan arsip tersimpan

Arsip statis menjadi tanggungjawab Dinpusarda Kabupaten Pemalang untuk mengelolanya. Salah satu tahapan pengelolaan arsip adalah penyimpanan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian cakupan penanganan arsip tersimpan konstan yaitu sebesar 66,67%. Hal ini disebabkan belum tersedianya depo arsip di Kabupaten Pemalang sebagai tempat penyimpanan arsip. Untuk tempat yang ada sekarang hanya mampu menampung arsip sebanyak 66,67%.

Ketersediaan depo arsip merupakan prasyarat penyimpanan arsip yang harus dipenuhi.

g. Persentase sarana dan prasarana arsip yang tersedia

Agar pengelolaan arsip dapat berjalan, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana arsip yang mencukupi. Secara kuantitas, sarana dan prasarana arsip yang tersedia sudah mencapai 100%, namun secara kualitas sarana prasarana tersebut belum sesuai standart yang diperlukan. Untuk mendukung pengelolaan arsip yang sesuai ketentuan dibutuhkan pengadaan sarana dan prasarana arsip yang sesuai dengan standart.

Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks kearsipan	%	NA	NA	NA	NA	42
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	NA	NA	NA	NA	7,12
3.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	NA	NA	NA	NA	5,45
4.	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	5,77	4,81	6,41	6,41	9,75
5.	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup	%	0	0	0	0	0
6.	Cakupan Penanganan arsip tersimpan	%	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
7.	Persentase sarana dan prasarana arsip yang tersedia	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Kinerja perikanan tangkap terutama dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap yang menunjukkan penurunan kinerja dari sebesar 27.092.348 kg pada tahun 2016 menjadi 18.096.881 kg pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya larangan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (cantrang) . Namun demikian jika dilihat dari Rata-rata pendapatan nelayan menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp 1.177.500,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 1.267.639,00 pada tahun 2020. Dilihat dari



prasarana perikanan, persentase TPI yang memenuhi standar menunjukkan peningkatan dari sebesar 54% pada tahun 2016 menjadi 64% pada tahun 2020. Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap menghadapi tantangan berkaitan penurunan kualitas perairan dan persaingan dengan nelayan dari daerah lain dalam penangkapan ikan.

Terkait Perikanan budidaya, kinerja terutama ditunjukkan indikator produksi perikanan budidaya yang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya dari sebesar 13.921.419 kg pada tahun 2016 menjadi 17.800.168 kg pada tahun 2020. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya juga menunjukkan peningkatan dari 16,5% pada tahun 2016 menjadi 48,2% pada tahun 2020. Peningkatan produksi perikanan ini sejalan dengan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan yang juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1.161.645 pada tahun 2016 menjadi Rp1.369.911,00 pada tahun 2020.

Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan dari sebesar 27,96 kg/kapita/tahun menjadi 34,46 kg/kap/th. Angka konsumsi ikan ini masih jauh dari capaian nasional yang telah mencapai 55,95 kg/kapita/tahun dan Jawa Tengah sebesar 33,8 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Tentunya perlu upaya peningkatan melalui pembudayaan gemar makan ikan pada masyarakat sejak usia dini. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, tentunya perlu dikembangkan unit pengolahan dan pemasaran ikan yang memenuhi aspek keamanan pangan. Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan capaiannya masih rendah, pada tahun 2020 baru mencapai 48,87%. Tentunya perlu upaya pembinaan pada unit pengolahan dan pemasaran ikan dalam pemenuhan aspek keamanan pangan.

Selengkapnya capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi perikanan tangkap	Kg	27.092.348	26.511.707	21.890.350	16.973.640	18.096.881
2.	Produksi perikanan budidaya	Kg	13.921.419	14.642.375	15.714.500	16.918.064	17.800.168
3.	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/th	27,96	29,60	30,60	31,01	34,46
4.	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	16,94	5,86	3,37	1,33	11,12
5.	Rata-rata pendapatan nelayan	Rp	1.177.500	1.155.845	1.205.845	1.227.182	1.267.639
6.	persentase TPI yang memenuhi standar	%	54	55	59	63	64
7.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	15,93	5,18	7,32	7,66	5,21
8.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,78	-2,14	-17,43	-22,46	6,62
9.	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan	Rp	1.161.645	1.185.080	1.197.615	1.295.094	1.369.911
10.	Prosentae pembinaan untuk kelestarian sumberdaya ikan	%	10	10	10	20	30
11.	persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	%	41,51	43,40	45,28	47,17	48,87

Sumber :Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

2. Pariwisata

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Pemalang dari tahun 2016-2020 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1.011.317 orang meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1.217.205 orang, namun kembali menurun menjadi 866.223 orang pada tahun 2020. Jumlah obyek wisata unggulan di kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 tahun tidak ada penambahan, stagnan hanya 1 obyek wisata unggulan saja. Sehingga mengakibatkan belum optimalnya kontribus

pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Pemalang, terlihat dari menurunnya Jumlah retribusi pariwisata. Dalam jangka waktu 5 tahun, jumlah retribusi pariwisata cenderung fluktuatif dengan tingkat capaian menurun, pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.716.079.950 meningkat menjadi Rp 3.214.657.000 pada tahun 2018 dan tahun 2020 menurun menjadi sebesar Rp 1.256.533.000. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah kunjungan pariwisata yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Peran Pokdarwis belum optimal dalam meningkatkan kontribusi pariwisata di Kabupaten Pemalang, terlihat dari Desa wisata yang terbentuk di Kabupaten Pemalang hingga tahun 2020 sebesar 11,11%. Pada indikator penunjang pariwisata lainnya yaitu SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/memenuhi standar kompetensi juga belum optimal, hal ini terlihat dari jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi baru mulai ada pada tahun 2019 sebanyak 19 orang, namun tahun 2020 menjadi 0.

Indikator persentase usaha pariwisata (biro perjalanan) yang memiliki sertifikasi atau memenuhi standar usaha pariwisata pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 0%, hal ini dikarenakan belum adanya biro perjalanan yang lulus sertifikasi. Pada tahun 2018 dinas pariwisata, pemuda dan olahraga mengadakan pelatihan dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas biro perjalanan pariwisata sebanyak 20 peserta dan pada tahun 2020 sebanyak 28 peserta, dari kedua pelatihan tersebut belum ada peserta yang lulus.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan wisata	orang	1.011.317	1.066.539	1.118.657	1.217.205	866.223
2.	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	5,24	5,46	4,89	8,81	-28,84
3.	Jumlah kontribusi retribusi pariwisata pada PAD	Rp	2.716.079.950	3.293.021.500	3.214.657.000	2.799.187.100	1.256.533.000
4.	Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0,99	0,79	1,07	0,80	0,40
6.	Persentase usaha pariwisata (biro perjalanan) yang memiliki sertifikasi/ memenuhi standar usaha pariwisata	%	0	0	0	0	0
7.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100
8.	persentase sarana prasarana Ekraf yang dimanfaatkan	%	0	0	0	0	20
9.	Persentase Pengembangan ekonomi kreatif	%	0	0	0	16,67	40
10.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	0	0	0	19	0
11.	Tingkat Hunian Akomodasi (Hunian)	Angka	NA	NA	NA	NA	24,17
12.	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang teregistrasi	%	NA	NA	NA	NA	45,60
13.	Persentase desa wisata maju	%	NA	NA	NA	NA	11,11
14.	Rata Rata Lama tinggal	Malam	1	1	1	1	1
15.	Persentase kunjungan wisata	%	152	155	159	169	118
16.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	NA	NA	NA	NA	0

Sumber : Disparpora Kabupaten Pemalang Tahun 2021

3. Pertanian

Kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produksi sektor pertanian selama kurun waktu 2016-2020. Produksi sektor pertanian ini terdiri dari produksi komoditas tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (bawang merah, cabe merah besar, nanas, mangga, durian), perkebunan (cengkeh, teh, tebu, kopi arabika, kopi robusta, tembakau rakyat, kelapa dalam), peternakan (sapi potong, kambing, domba)..

Kinerja terkait prasarana pertanian dari tahun ke tahun semakin meningkat karena kebutuhan prasarana fisik dapat terbangun dan terpelihara dengan baik, antara lain pembangunan jalan usaha tani, irigasi tanah dangkal, dam parit, jalan usaha tani, embung, pemeliharaan gedung kantor, BPP, RPH dan Puskesmas. Meski



anggaran yang digunakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian, bukan berasal dari APBD Kabupaten Pematang Jaya.

Kinerja dari sektor peternakan dapat dilihat dari persentase pengendalian kesehatan hewan yang angkanya semakin tahun semakin naik. Ini artinya semakin banyak hewan/ternak yang dapat terobati, sehingga dapat menekan angka kesakitan (morbiditas) ternak

Kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas padi dan jagung selama kurun waktu tahun 2016-2020. Produktivitas padi menunjukkan penurunan dari sebesar 68,63 kw/ha pada tahun 2016 menjadi sebesar 61,54 kw/ha pada tahun 2019 dan meningkat 63,20 kw/ha pada tahun 2020. Produktivitas jagung juga fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar 60,96 kw/ha pada tahun 2017 menjadi 57,31 kw/ha pada tahun 2020. Produksi komoditas perkebunan cenderung menurun dari sebesar 17.435,32 ton menjadi 10.830,52 ton.

Kinerja terkait prasarana pertanian dapat dilihat dari jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 0,53% pada tahun 2015 menjadi 0,16% pada tahun 2019; dan kesesuaian pemanfaatan luas lahan LP2B 99% selama kurun waktu 2015-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan jaringan irigasi tersier untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Kinerja terkait pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terlihat dari indikator Persentase bencana pertanian yang tertangani. Realisasi persentase bencana pertanian yang tertangani menurun dari 21,4% pada tahun 2017 menjadi 7,6% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu upaya peningkatan penanganan bencana pertanian.

Kinerja terkait penyuluhan pertanian, dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase kelompok tani aktif menunjukkan penurunan dari 44% pada tahun 2016 menjadi 30% pada tahun 2020, Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ditingkatkan

pembinaan terhadap kelompok tani dan peningkatan kuantitas serta kualitas bagi penyuluh pertanian.

Kinerja terkait peternakan dapat dilihat dari populasi ternak dan produksi hasil peternakan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 populasi sapi menunjukkan peningkatan dari sebanyak 9.708 ekor menjadi 9.747 ekor; Populasi kerbau meningkat dari 8.225 ekor menjadi 8.265 ekor; populasi kambing /domba meningkat dari 211.793 ekor menjadi 172.928 ekor; Populasi ayam pedaging meningkat dari 815.500 ekor menjadi 9.354.800 ekor, populasi ayam petelur meningkat dari 165.300 ekor menjadi 221.800 ekor, populasi itik (ekor) meningkat dari 322.986 ekor menjadi 336.166 ekor, Produksi daging meningkat dari 7.658.135 ton pada tahun 2016 menjadi 13.014.011 ton pada tahun 2020; Produksi telur meningkat dari 7.129.949 ton pada tahun 2018 menjadi 7.973.248 ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum ada peningkatan kinerja dibidang peternakan.

Kinerja urusan pertanian pada indikator kinerja Produksi peternakan utama terdapat perbedaan jumlah realisasi kinerja pada indikator lama dan indikator baru, karen apada indikator lama semua produksi pada peternakan utama ditampilkan meliputi jumlah produksi daging sapi, domba, kambing, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik serta telur ayam petelur, telur ayam buras dan telur itik sedangkan pada indikator yang baru hanya menghitung 3 produksi peternakan yang dianggap sebagai penyumbang utama dalam inflasi sesuai dengan arahan dari dinas peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Jawa Tengah meliputi, daging sapi, daging ayam dan telur ayam.

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produktivitas padi (kw/ha)	kw/ha	57,96	62,21	62,51	61,54	63,20
2.	Produktivitas jagung	kw/ha	60,96	60,38	62,54	59,51	57,31
3.	Produktivitas kedelai	kw/ha	15,12	11	13,6	14,05	14,95

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	688.337	612.515	689.069	644.655	671.918
5.	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama	ton	289.289,15	303.062,14	75.793,25	57.157,02	50.113,70
6.	Produksi komoditas perkebunan utama	ton	17.435,32	10.429,21	10.935,16	10.286,12	10.830,52
7.	Populasi komoditas peternakan utama	ekor	12.852.031	12.869.094	12.925.655	12.994.703	13.057.280
8.	Angka kesakitan ternak	ekor	5,39	5,18	5,16	5,16	5,15
9.	Kelompok tani tanaman pangan/perkebunan	kelompok	1.298	1.321	1.276	1.449	1.175
10.	Kelompok tani peternakan	kelompok	119	138	154	192	131
11.	Persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan	%	53	55	55	58	60
12.	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	50	60	65	65	65
13.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	7,98	8,21	9,03	10,21	10,30
14.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	N/A	21,4	12,4	8,0	7,6
15.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase kelompok tani aktif	%	44	38,6	34	29	30
17.	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	kg	3.963.142	3.159.540	7.688.920	8.068.995	8.531.069
18.	Produksi peternakan utama (daging sapi,kambing,domba, ayam pedaging, ayam telur, ayam buras, itik, telur ayam, petelur,telur ayam buras, telur itik)	Kg	18.704.534	19.883.743	20.051.883	20.464.499	20.887.259
19.	Produksi Kopi	Kg	507	522	529	539	499
20.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2021

4. Perdagangan

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program urusan perdagangan memiliki kinerja yang belum maksimal. Dilihat dari indikator Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK) dalam kurun waktu 5 tahun fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 7,74% kemudian menurun pada tahun 2017 sebesar 6,33% kembali naik pada tahun 2019 sebesar 7,11%, dan Tahun 2020 pertumbuhannya negatif menjadi -3,49%. Jika dilihat dari Persentase kenaikan nilai ekspor non migas, Kabupaten Pemalang cenderung menurun. Terlihat dari capaian

tahun 2016 sebesar 77%, terus menurun pada tahun 2017-2019 dan tumbuh negatif pada tahun 2020 sebesar -34%

Dalam hal perlindungan konsumen, Kabupaten Pemalang masih belum bisa mengoptimalkan karena terlihat dari presentase UTTP yang ditera pada tahun 2019 yaitu sebesar 22,74% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 3,16% hal ini dikarenakan belum mampu melayani tera ulang UTTP secara mandiri dan masih bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tegal sehingga capaiannya tidak maksimal. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.59 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK)	%	7,74	6,33	7,08	7,11	-3,49
2.	Persentase pelaku usaha yang diawasi perizinannya	%	NA	NA	NA	NA	0,5
3.	Persentase retribusi pasar dalam PAD	%	2,08	1,5	2,35	2,58	2,67
4.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
5.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	44	43	40	40	38
6.	Persentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase realisasi kinerja pupuk	%	NA	NA	NA	NA	99
8.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	20,514	27,682	36,324	39,839	26,359
9.	Persentase pertumbuhan nilai ekspor	%	77	35	31	10	-34
10.	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera ulang	%	NA	NA	NA	22,74	3,16
11.	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	28	34	30	30	30
12.	Jumlah Pasar Rakyat yang Memenuhi Kriteria Pasar Sehat	Unit	NA	NA	NA	NA	1

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
13.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat	%	NA	NA	NA	NA	0
14.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan.	%	NA	NA	NA	NA	43,75
15.	Persentase pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber :Diskoperindag Kabupaten Pemalang Tahun 2021

5. Perindustrian

Sejalan dengan salah satu fokus kerja Kabinet Indonesia Maju), Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya memacu pertumbuhan wirausaha industri baru khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM). IKM berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bahkan IKM mampu bertahan dalam kondisi ekonomi global sedang tidak stabil. IKM merupakan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia. Selama ini, aktivitasnya konsisten membawa efek berganda yang luas dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Persentase pertumbuhan IKM di Kabupaten Pemalang tahun 2019 sebesar 6,92% namun pada tahun 2020 menurun menjadi 0,25%. Pertumbuhan IKM ini mengindikasikan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri secara keseluruhan. Pertumbuhan IKM ini menjadi langkah strategis dalam merebut peluang dari bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia hingga 2030. Namun penerapan industri 4.0 dan ekonomi digital perlu menjadi perhatian dalam pertumbuhan IKM kedepan dalam mendorong PDRB Kabupaten Pemalang.

Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pemalang tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.60 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	5,87	6,13	6,68	6,92	0,25
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	20,7	20,7	20,6	21,0	2,1
3.	Persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK	%	NA	NA	NA	NA	0
4.	Persentase Industri yang mendapat fasilitas Izin Usaha Industri	%	NA	NA	NA	NA	100
5.	Persentase kelengkapan data industri yang masuk dalam SIINAS	%	NA	NA	NA	NA	23,8
6.	Presentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	NA	NA	NA	NA	0
7.	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	NA	0

Sumber :Diskoperindag Kabupaten Pemalang Tahun 2021

6. Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi diukur berdasarkan 1 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : Persentase transmigran yang ditempatkan.

Capaian persentase transmigran yang ditempatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data persentase transmigran yang ditempatkan pada tahun 2016 sebesar 0,62 %, mengalami peningkatan sebesar 0,42 % sehingga pada tahun 2019 capaian menjadi 0,87% namun tahun 2020 tidak ada transmigran yang ditempatkan. Selengkapanya capain kinerja urusan Transmigrasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	0,62	0,23	0,55	0,87	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021

2.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang perencanaan ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu:

a. Nilai SAKIP komponen perencanaan

Dalam penilaian SAKIP, komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot sebesar 30%. Capaian indikator ini selama tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan yaitu sebesar 17,75 pada tahun 2016 menjadi sebesar 22,22 pada tahun 2020. Walaupun terus meningkat Bappeda Kabupaten Pemalang harus terus berupaya mendampingi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar dapat mencapai nilai maksimal.

b. Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik

Dokumen perencanaan perangkat daerah dinyatakan baik apabila mempunyai nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja lebih dari 21 (BB). Pada tahun 2020 terdapat 5 perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan baik atau sebesar 12,19% yaitu Dishub (22,51), BPKAD (23,19), Dinkes (23,42), DPMPSTSP (21,81) dan Dispertan (23,55). Masih rendahnya perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan baik menuntut Bappeda Kabupaten Pemalang agar lebih intens dalam melaksanakan pendampingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

c. Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Seluruh program yang ada dalam RKPD Kabupaten Pemalang ada dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, kecuali ada 1 (satu) program tambahan yang mulai ada sejak Tahun 2019 untuk



mengakomodir dana kelurahan di Kecamatan yaitu Program Pengembangan Kewilayahan, sehingga tingkat keselarasan antara program RKPD dan RPJMD pada tahun 2016-2018 sebesar 100% dan pada tahun 2019-2020 sebesar 99,49%.

d. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, sehingga Renja seharusnya selaras dengan RKPD. Begitu pula dengan Renstra seharusnya selaras dengan RPJMD. Namun, selama tahun 2016-2020 masih ada Renja yang tidak selaras dengan RKPD dan Renstra yang tidak selaras dengan RPJMD. Capaian indikator ini semakin meningkat yaitu sebesar 67,86% di tahun 2016 menjadi sebesar 82,14% di tahun 2020. Bidang PPM pada Bappeda Kabupaten Pemalang harus meningkatkan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar dapat mencapai nilai maksimal.

e. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Ekonomi dan SDA (EkoSDA) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, sehingga Renja seharusnya selaras dengan RKPD. Begitu pula dengan Renstra seharusnya selaras dengan RPJMD. Namun, selama tahun 2016-2020 masih ada Renja yang tidak selaras dengan RKPD dan Renstra yang tidak selaras dengan RPJMD. Capaian indikator ini semakin meningkat yaitu sebesar 71,43% di tahun 2016 menjadi sebesar 85,71% di tahun 2020. Bidang Ekosda pada Bappeda Kabupaten Pemalang harus meningkatkan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar dapat mencapai nilai maksimal.

f. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, sehingga Renja seharusnya selaras dengan RKPD. Begitu pula dengan Renstra seharusnya selaras dengan RPJMD. Namun, selama tahun 2016-2020 masih ada Renja yang tidak selaras dengan RKPD dan Renstra yang tidak selaras dengan RPJMD. Capaian indikator ini semakin meningkat yaitu sebesar 66,67% di tahun 2016 menjadi sebesar 83,33% di tahun 2020. Bidang IPW pada Bappeda Kabupaten Pemalang harus meningkatkan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar dapat mencapai nilai maksimal.

g. Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

Salah satu pendekatan dalam penyusunan RKPD adalah dari bawah ke atas atau bottom-up, yang artinya program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam RKPD ada yang berasal dari masyarakat melalui forum musrenbang. Musrenbang dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Usulan hasil musrenbang kabupaten akan menjadi salah satu masukan dalam RPKD. Selama tahun 2016-2020 semua prioritas usulan hasil musrenbang diakomodir di dalam RKPD atau artinya capaian indikator ini sebesar 100%. Walaupun capaian per tahun 100%, Bappeda Kabupaten Pemalang harus tetap menjaga keselarasan ini di tahun-tahun mendatang.

Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai sakip komponen perencanaan	%	17,75	17,75	19,83	21,85	22,22
2.	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	%	0	0	0	0	12,19
3.	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	99,49	99,49
4.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	67,86	71,43	75	78,57	82,14

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	71,43	71,43	71,43	85,71	85,71
6.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	66,67	66,67	66,67	83,33	83,33
7.	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber :Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari Rasio PAD terhadap total pendapatan, meningkat dari sebesar 13,04% pada tahun 2016 menjadi sebesar 12,72% pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target APBD, Persentase Realiasi PAD terhadap target cenderung fluktuatif dari 111,6% pada tahun 2016 menjadi sebesar 117,98% pada tahun 2019, dan menurun menjadi 106,42% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD menunjukkan kinerja yang baik. Rasio pajak daerah terhadap PAD menunjukkan peningkatan dari sebesar 16,54% pada tahun 2016 menjadi 25,87% pada tahun 2020.

Secara rinci kinerja unsur keuangan daerah terkait pendapatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Keuangan (Bapenda)

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio PAD terhadap total pendapatan	Angka	13,04	17,86	12,36	13,30	12,72
2.	Persentase wajib pajak tertagih (persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	%	74,19	76,29	73,92	77,16	68,33
3.	Persentase Realiasi PAD terhadap target	%	111,6	103,4	108,97	117,98	106,42



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Angka	16,54	15,33	25,31	25,00	25,87
5.	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	%	Na	Na	100	100	100

Sumber : Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Kinerja terkait pengelolaan keuangan daerah terutama dapat dilihat dari Hasil Opini BPK RI atas LKD Kab Pemalang yang menunjukkan kinerja WDP pada tahun 2016, dan WTP pada tahun 2017-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan menunjukkan kewajaran dalam sisi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pencapaian WTP didukung oleh pencapaian beberapa indikator seperti Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sebesar 100%; Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar 100%; Ketepatan Waktu Penyampaian LKD ke BPK RI sebesar 100%; Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D sebesar 100%.

Dari pemanfaatan aset daerah 90 % perlu ditingkatkan lagi agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara optimal.

Secara rinci indikator kinerja unsur keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Keuangan (BPKAD)

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hasil Opini BPK RI atas LKD Kab Pemalang	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKD ke BPK RI	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	%	90	90	90	90	90
7.	Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	NA	NA
8.	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	%	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	%	NA	NA	NA	NA	NA
10.	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA
11.	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	NA	NA	NA	NA	90

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat menyelenggarakan pengembangan karier ASN dan peningkatan kompetensi ASN. Keberhasilan pelaksanaan Urusan penunjang Kepegawaian diukur melalui beberapa indikator indeks Profesionalitas ASN; Persentase penempatan ASN pelaksana dan Fungsional sesuai kualifikasi; Tingkat Kedisiplinan ASN; Persentase jabatan struktural yang sesuai kompetensi; Persentase fungsional yang sesuai kompetensi; Persentase memiliki kinerja baik.

Kewenangan uruasn penunjang bidang kepegawaian memiliki fungsi antara lain penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pelaksanaan tugas dukungan teknis

bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Gambaran capaian indikator urusan penunjang Bidang Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian (BKD)

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	-	83,45	80,00	65,10	64,35
2.	Persentase penempatan ASN pelaksana dan Fungsional sesuai kualifikasi	%	0,2	0	1	1	84,17
3.	Tingkat Kedisiplinan ASN	%	14,69	18,4	18,62	18,87	62,5
4.	Persentase jabatan struktural yang sesuai kompetensi	%	25	0	8	12	8,75
5.	Persentase fungsional yang sesuai kompetensi	%	Na	Na	5	10,53	100
6.	Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	%	100	100	100	100	95,14

Sumber : BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan mencakup pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Data kepegawaian secara rinci terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan (BKD)

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ASN yang meningkatkan kualifikasi	%	3,93	4,3	3,69	3,69	2,87
2.	Persentase ASN yang memiliki kompetensi	%	0,2	0	1,00	1,00	7,24

Sumber : BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

4. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong penciptaan inovasi-inovasi yang termuat dalam sistem inovasi daerah (SIDa) sebagai salah satu strategi utama yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Hasil-hasil inovasi di daerah ini akan menjadi salah satu penilaian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini akan menjadi sarana bagi pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

Terdapat perubahan dalam penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dimana pada tahun 2019 range antara 0-12 dan nilai sebesar 4,6420 masuk dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2020 range antara 1-5 dan nilai sebesar 3,0630 masuk dalam kategori tinggi.

Hasil kegiatan inovasi daerah Kabupaten Pemalang yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut

Tabel 2.67 Hasil Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Inovasi Pelayanan Publik	Kegiatan	NA	1	2	12	14
2.	Indeks inovasi daerah	indeks	NA	NA	NA	170	796
3.	Indeks daya saing daerah	indeks	NA	NA	NA	4,6420	3,0630
4.	Inovasi Masyarakat	Kegiatan	NA	NA	NA	37	14

Sumber : Bappeda Kab. Pemalang 2021

Pemerintah Kabupaten pemalang telah menyusun Roadmap SIDa yang dalam rencana kerja/aksinya melibatkan Perguruan Tinggi Mitra. Kerja sama dengan Perguruan tinggi ini dilaksanakan melalui Tridharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain :

- a) mendapatkan bantuan penyelesaian isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang,

- b) peningkatan sumber daya manusia khususnya di pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat,
- c) transfer knowledge dalam penerapan inovasi dan teknologi berbasis potensi lokal.

Bentuk kerja sama antara Pemkab Pemalang dengan Perguruan Tinggi diantaranya adalah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Penelitian/Validitas/Survei, PKL, dan Pengabdian Masyarakat.

Kegiatan kelitbangan lainnya adalah kegiatan penelitian, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji beberapa hal terkait upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Tabel di bawah menggambarkan kegiatan-kegiatan KKN dan penelitian yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penelitian, mengingat alokasi anggaran untuk penelitian dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Tabel 2.68 Kegiatan Penelitian dan KKN di Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kegiatan Pengabdian Masyarakat						
	-Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kegiatan	8	14	11	14	16
	-PKL/ Izin Penelitian	Kegiatan	317	367	403	467	432
2.	Penelitian/Validitas/Survei	Kegiatan	5	7	5	3	-

Sumber : Bappeda Kab. Pemalang 2021

Kinerja Bappeda Kabupaten Pemalang pada urusan penelitian dan pengembangan ditunjukkan dengan 4 (empat) indikator, yaitu :

1. Indeks kepuasan layanan kelitbangan

Indikator ini didapat dari hasil survei kepada masyarakat pengguna layanan kelitbangan Bappeda Kabupaten Pemalang berupa layanan pengurusan surat ijin penelitian dan layanan penggunaan hasil litbang. Adapun hal yang dinilai pada layanan pengurusan surat ijin penelitian berupa persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan

prasarana. Sedangkan yang dinilai dalam layanan penggunaan hasil litbang berupa persyaratan, mekanisme dan prosedur, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kelengkapan koleksi, kemudahan akses, topik penelitian. Selama kurun waktu tahun 2018-2020 capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 75% pada tahun 2018 menjadi sebesar 85% pada tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 berada pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Pelayanan kelitbangan harus terus ditingkatkan agar kepuasan masyarakat juga akan terus meningkat.

2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan

Suatu hasil penelitian dapat dinyatakan bermanfaat apabila hasilnya dapat digunakan oleh pihak lain. Hasil penelitian Bappeda Kabupaten Pemalang terbuka untuk perangkat daerah maupun masyarakat yang hendak memanfaatkannya. Hasil penelitian dirangkum dalam buletin dan dipublikasikan secara umum. Capaian indikator ini selama tahun 2018-2020 adalah sebesar 80%. Untuk meningkatkan ketermanfaatan hasil kelitbangan, dalam mencari topik kajian, hendaknya Bappeda Kabupaten Pemalang agar lebih selektif sehingga hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan 100%.

3. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Capaian indikator ini selama tahun 2018-2020 adalah sebesar 80%. Untuk meningkatkan ketermanfaatan hasil kelitbangan, dalam mencari topik kajian, hendaknya Bappeda Kabupaten Pemalang agar lebih selektif sehingga hasil penelitiannya dapat dimanfaatkan 100%.

4. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan pada Mendagri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi indeks inovasi daerah adalah sebagai himpunan inovasi daerah, wadah pelaporan inovasi daerah, komponen variabel pengungkit indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, instrumen pengukuran inovasi daerah dan sarana informasi serta pembelajaran. Indeks inovasi daerah di Kabupaten Pemalang diukur mulai tahun 2019 dengan nilai 170 dan meningkat pada tahun 2020 dengan nilai 796.

Adapun keempat indikator lainnya belum terdapat realisasi kinerja, salah satunya terkendala pada Unit Litbang pada Bappeda Kabupaten Pemalang belum memiliki Tenaga Fungsional Peneliti. Hal ini menyebabkan implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah belum optimal.

Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan layanan kelitbangan	%	NA	NA	75	80	85
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	%	NA	NA	80	80	80
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	%	NA	NA	80	80	80
4	Indeks Inovasi daerah	Indeks	NA	NA	NA	170	796
5	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	NA	NA	NA	NA
7	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA
8	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Bappeda Kab. Pemalang 2021

5. Pengawasan

Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang pada urusan pengawasan ditunjukkan dengan 11 (Sebelas) indikator, yaitu :

a. Manajemen Resiko Indeks (MRI)

MRI menilai praktik dan struktur yang dapat diamati yang terkait dengan tata kelola organisasi, proses pengambilan keputusan manajemen, dan manajemen resikonya. Penilaian MRI dilakukan oleh BPKP dan nilai MRI Kabupaten Pemalang sebesar 1,53 atau berada pada level 1 yang berarti instansi Pemerintah Kabupaten Pemalang belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko. Perlu upaya keras dari Inspektorat Kabupaten Pemalang agar pencapaian MRI dapat meningkat di tahun-tahun mendatang.

b. Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 mencapai level 3 dan konstan sampai dengan tahun 2020. Hal ini berarti bahwa Inspektorat Kabupaten Pemalang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Sehingga perlu upaya dari Inspektorat Kabupaten Pemalang agar capaian maturitas SPIP dapat meningkat di tahun-tahun mendatang.

c. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM. Pencapaian kinerja kapabilitas APIP Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sudah mencapai pada level 3, meningkat dalam lima tahun terakhir dengan kondisi pada tahun 2016 masih dilevel 1. Kapabilitas APIP Kabupaten Pemalang pada level 3 ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome berupa APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Inspektorat Kabupaten Pemalang harus terus meningkatkan kapabilitas APIP-nya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

d. Cakupan penyelenggaraan pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan meliputi pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, yaitu sebesar 96,5% pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 80,54% pada

tahun 2020. Hal ini disebabkan dilaksanakannya pengawasan diluar PKPT.

e. Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terlaksana

PKPT merupakan perencanaan pengawasan tahunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan selama 1 tahun. Dukungan pencapaian APIP berkaitan dengan PKPT selama tahun 2016-2019 mampu terlaksana 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengawasan yang direncanakan dalam PSKPT sejumlah 144 pengawasan, namun yang dapat terealisasi tepat waktu hanya sebanyak 110 pengawasan atau sebesar 76,39%. Hal tersebut disebabkan Inspektorat Kabupaten Pemalang selain melaksanakan pengawasan sesuai PKPT juga melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain pengawasan atas pelayanan publik yang disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat yang sifatnya insidental (kasus) dan pengawasan dengan tujuan tertentu (khusus). Sehingga pengawasan sesuai PKPT yang telah direncanakan dialihkan untuk melaksanakan pengawasan kasus dan khusus tersebut. Pengawasan yang dilaksanakan diluar PKPT sebanyak 31 pengawasan.

f. Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan

Tindaklanjut atas temuan hasil pengawasan mengalami perubahan capaian realisasi karena terkendala pada aplikasi sistem pengawasan, pada tahun 2017 temuan hasil pengawasan 100% sudah ditindaklanjuti, namun mengalami penurunan capaian pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 86% dan terus menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 85%. Inspektorat segera mengambil upaya penanganan, yaitu dengan lebih aktif melaksanakan pemantauan tindaklanjut, sehingga pada tahun 2020 terdapat 93% temuan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti. Temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah temuan dari

pemeriksa internal (Inspektorat Kabupaten) juga dari pemeriksa eksternal (Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP).

g. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Selain melaksanakan pengawasan reguler yang sudah terencana, Inspektorat Kabupaten Pemalang juga melaksanakan pengawasan tertentu yang berasal dari pengaduan masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100% yang artinya semua pengaduan masyarakat yang masuk sudah ditindaklanjuti.

h. Cakupan pendampingan dan asistensi

Capaian indikator ini selama tahun 2016-2020 cenderung meningkat yaitu sebesar 10% pada tahun 2016 menjadi sebesar 70% pada tahun 2020. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi disebabkan dilaksanakannya kegiatan *mandatory* dan pendampingan diluar PKPT.

i. Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP

Untuk mengetahui sejauh mana perangkat daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, dan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Capaian indikator persentase OPD yang dievaluasi SAKIP selama kurun waktu tahun 2018-2020 cenderung mengalami peningkatan, sebesar 31,70% OPD pada tahun 2018 hingga menjadi sebesar 100% OPD pada tahun 2020. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

j. Persentase dokumen perencanaan yang direview

Dokumen perencanaan yang direview meliputi Renja, Renstra, RKA, RKPD dan RPJMD. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian indikator persentase dokumen perencanaan yang direview cenderung masih rendah, yaitu sebesar 20% pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar 40% pada tahun 2017, terus meningkat

menjadi sebesar 60% pada tahun 2018, namun turun menjadi sebesar 20% pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi sebesar 40% pada tahun 2020. Review dokumen perencanaan sangat penting untuk dilaksanakan karena perencanaan yang berkualitas akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula.

k. Peningkatan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan IPAK. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*), transparansi (*transparency*) dan lain sebagainya. Nilai IPAK di Kabupaten Pemalang didapatkan dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun Nilai IPAK Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 sebesar 3,55 dan turun ditahun 2020 menjadi 3,5.

Kinerja fungsi pengawasan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pengawasan

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Manajemen Resiko Indeks	Angka	NA	NA	NA	NA	1,53
2.	Maturitas SPIP	Level	1	2	3	3	3
3.	Kapabilitas APIP	Level	1	2	2	3	3
4.	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	96,5	100	96,5	96,25	80,54
5.	Persentase PKPT yang terlaksana	%	100	100	100	100	76,39
6.	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan	%	86	100	86	85	93
7.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
8.	Cakupan pendampingan dan asistensi	%	10	20	45,85	39,27	70
9.	Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP	%	0	0	31,70	58,54	100
10.	Persentase dokumen perencanaan yang direview	%	20	40	60	20	40

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	0	0	0	3,55	3,5

Sumber :Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021

6. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan 15 lima belas) indikator, meliputi :

a. Persentase penurunan konflik sosial

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 5%. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya penurunan konflik sosial adalah : (1) mengadakan pendidikan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; (2) mengadakan pendidikan politik; (3) berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (4) mengadakan peningkatan kapasitas kewaspadaan dini dan deteksi dini; (5) berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); (6) berkoordinasi antar Forkompimda.

b. Jumlah konflik sosial

Konflik sosial adalah pertikaian antar warga (antar etnis, antar wilayah desa, antar simpatisan parpol, antar pelajar) dan unjuk rasa (politik, ekonomi) yang terjadi akibat perbedaaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kabupaten. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Pemalang tidak terjadi konflik sosial, hal ini menunjukkan adanya kehidupan yang harmonis dan kondusif antar masyarakat di Kabupaten Pemalang.

c. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 100% atau semua potensi konflik sosial yang ada dapat tertangani sehingga tidak pecah menjadi konflik sosial. Upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan deteksi dini adanya konflik sosial di masyarakat dengan menempatkan personil Bakesbangpol Kabupaten Pemalang yang mempunyai kapasitas di bidang kewaspadaan dini di

kecamatan. Personel tersebut bertugas sebagai intelijen yang melaporkan adanya potensi konflik sosial di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

d. Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 75%. Indikator ini bersifat kumulatif dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang harus diberi pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, maka pelaksanaan pemberian pendidikan bertahap tiap tahunnya.

e. Persentase masyarakat yang paham politik

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 40%. Indikator ini bersifat kumulatif dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang harus diberi pendidikan politik, maka pelaksanaan pemberian pendidikan bertahap tiap tahunnya.

f. Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 50%. Indikator ini bersifat kumulatif dikarenakan banyaknya organisasi kemasyarakatan yang harus diberi pendidikan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, maka pelaksanaan pemberian pendidikan bertahap tiap tahunnya

g. Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 50%. Indikator ini bersifat kumulatif dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang harus diberi pendidikan kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial, maka pelaksanaan pemberian pendidikan bertahap tiap tahunnya.

h. Jumlah konflik agama

Konflik agama adalah pertikaian antar agama dan unjuk rasa terkait agama yang terjadi akibat perbedaaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kabupaten. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 di Kabupaten Pemalang tidak terjadi konflik agama, hal ini menunjukkan adanya kehidupan yang harmonis dan kondusif antar umat beragama di Kabupaten Pemalang.

i. Persentase potensi konflik agama yang tertangani

Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 100% atau semua potensi konflik agama yang ada dapat tertangani sehingga tidak pecah menjadi konflik agama. Upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan keterlibatan semua elemen umat beragama dan penghayat dalam menjaga kerukunan umat beragama.

j. Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 45%. Indikator ini bersifat kumulatif dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang harus diberi pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, maka pelaksanaan pemberian pembinaan bertahap tiap tahunnya.

k. Persentase Kader Bela Negara yang terbentuk

Tujuan pembentukan kader bela negara adalah untuk mendisiplinkan anak-anak muda. Dari pribadi yang disiplin dapat membentuk disiplin kelompok dan membentuk disiplin nasional. Hanya negara yang disiplin yang akan menjadi negara yang besar. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 kader bela negara yang terbentuk di 222 desa/kelurahan adalah sebesar 25,22% atau sebanyak 56 desa/kelurahan.

l. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik adalah penggunaan hak pilih dalam Pemilu. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, capaian indikator ini cenderung fluktuatif, yaitu

sebesar 0% pada tahun 2016 dan 2017 dikarenakan pada tahun tersebut tidak ada kegiatan Pemilu, selanjutnya meningkat menjadi sebesar 55% pada tahun 2018 dan semakin meningkat menjadi sebesar 80% pada tahun 2019. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 50,71%. Perlu upaya lebih lanjut dari Bakesbangpol Kabupaten Pemalang untuk mengadakan pendidikan politik sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

m. Persentase Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang berdaya

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung rendah, yaitu sebesar 57% pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 57,54% pada tahun 2020. Diperlukan upaya dari Bakesbangpol Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan partisipasi ormas dalam kegiatan kemasyarakatan.

n. Persentase pembinaan narkoba bagi aparatur dan elemen masyarakat

Bakesbangpol Kabupaten Pemalang mengadakan pembinaan narkoba dengan mengadakan sosialisasi dan tes urine. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang meningkat, yaitu sebesar 35% pada tahun 2016 dan mencapai 75% pada tahun 2020. Diharapkan dengan adanya pembinaan narkoba yang intens akan menurunkan kasus penyalahgunaan narkoba.

o. Persentase partai politik yang dibina

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung rendah, yaitu sebesar 53,33% pada tahun 2016 konstan hingga tahun 2018 atau sebanyak 8 partai politik (Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan

Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat). Namun terus menurun hingga sebesar 40% pada tahun 2020 atau sebanyak 6 partai politik (Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera).

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2016 – 2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.71 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	5	5	5	5
2.	Jumlah konflik sosial	Kasus	0	0	0	0	0
3.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	NA	NA	NA	NA	75
5.	Persentase masyarakat yang paham politik	%	NA	NA	NA	NA	40
6.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	%	NA	NA	NA	NA	50
7.	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	%	NA	NA	NA	NA	50
8.	Jumlah konflik agama	kasus	0	0	0	0	0
9.	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	NA	NA	NA	NA	45
11.	Persentase Kader Bela Negara yang terbentuk	%	25,22	25,22	25,22	25,22	25,22
12.	Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu	%	0	0	55	80	50,71
13.	Persentase Ormas/LSM/LNL yang berdaya	%	57	58	48	42	57,45
14.	Persentase pembinaan narkoba bagi aparatur dan elemen masyarakat	%	35	45	55	65	75
15.	Persentase partai politik yang dibina	%	53,33	53,33	53,33	46,67	40

Sumber :Kembangpol Kabupaten Pemalang Tahun 2021`

h.

7. Sekretariat DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang ditunjukkan dengan 13 (tiga belas) indikator yaitu :

a. Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD

Indikator ini didapat dari hasil survei kepada anggota DPRD Kabupaten Pemalang terhadap layanan Sekretariat DPRD. Selama kurun waktu tahun 2016-2020 capaian indikator ini terus meningkat, yaitu sebesar 75% pada tahun 2016 menjadi sebesar 81,25% pada tahun 2020. Capaian pada tahun 2020 berada pada kategori baik (antara rentang 76,61-88-30). Pelayanan kepada DPRD harus terus ditingkatkan agar kepuasannya akan terus meningkat.

b. Cakupan layanan Sekretariat DPRD

Indikator ini menggambarkan kualitas layanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD. meliputi layanan terhadap tugas fungsi pokok, layanan terhadap tugas fungsi lain dan layanan pendukung. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 76,54% pada tahun 2016 hingga menjadi sebesar 84,22% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 84,08% dan menjadi sebesar 75,01% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan belum dilaksanakannya tugas DPRD dalam pembahasan kerjasama daerah.

c. Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia

Layanan pendukung DPRD berupa layanan terhadap keuangan, kesejahteraan dan administrasi. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebesar 100%.

d. Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia

Layanan terhadap tugas dan fungsi pokok DPRD adalah layanan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pengawasan

kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 77,46% pada tahun 2016 hingga menjadi sebesar 91,99% pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 82,33%. Hal tersebut disebabkan rendahnya capaian Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu.

- e. Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia

Layanan terhadap tugas dan fungsi lain DPRD adalah layanan dalam peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan, yaitu sebesar 52,17% pada tahun 2016 hingga menjadi sebesar 64,26% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 60,26% pada tahun 2019 dan terus turun menjadi sebesar 56,93% pada tahun 2020. Rendahnya capaian ini disebabkan belum dilaksanakannya tugas pembahasan kerjasama daerah.

- f. Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan tepat waktu

Kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : penyusunan dan pembahasan program pembentukan Perda, pembahasan Raperda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan tata tertib DPRD. Raperda yang dibahas dapat berasal dari eksekutif maupun inisiatif dari legislatif.

Capaian indikator persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 83,80% pada tahun 2016, sebesar 65,71% pada tahun 2017, sebesar 85,71% pada tahun 2018, sebesar 95,16% pada tahun 2019 dan sebesar 55,55% pada tahun 2020. Hal ini

menunjukkan bahwa pembahasan Raperda masih belum tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Propemperda.

g. Persentase kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu

Pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : pembahasan KUA PPAS, pembahasan perubahan KUA PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD perubahan, pembahasan laporan semesteran dan pembahasan pertanggungjawaban APBD.

Capaian indikator persentase kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu selama kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung rendah, yaitu sebesar 49,78% pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar 67,97% pada tahun 2017, turun menjadi sebesar 64,36% pada tahun 2018, meningkat menjadi sebesar 84,21% pada tahun 2019 dan turun menjadi sebesar 75,57% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi keterlambatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan.

h. Persentase hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infratraktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, pengawasan penggunaan anggaran dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Capaian indikator persentase hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 57,85% pada tahun 2016, meningkat menjadi sebesar 66,55% pada tahun 2017, terus meningkat menjadi sebesar 94,82% pada tahun 2018, namun

turun menjadi sebesar 82,43% pada tahun 2019 dan terus turun menjadi sebesar 81,4% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah terkait belum menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD.

i. Persentase anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya

Peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : orientasi DPRD, bimbingan teknis DPRD, publikasi dan dokumentasi Dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, , Penyusunan laporan kinerja DPRD dan penyusunan program kerja DPRD. Bimbingan teknis DPRD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas DPRD terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok pakar dan tim ahli dimaksudkan untuk membantu DPRD terkait penyusunan Naskah Akademik Raperda dan apabila terdapat kasus hukum yang melibatkan anggota DPRD. Tenaga ahli fraksi dimaksudkan untuk membantu tugas dan kegiatan fraksi.

Capaian indikator persentase DPRD yang meningkat kapasitasnya selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 91,66% pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 91,63% pada tahun 2020. Meskipun capaian indikator persentase DPRD yang meningkat kapasitasnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan kapasitas DPRD masih perlu terus dilakukan, karena adanya peraturan perundang-undangan baru yang terus diterbitkan.

j. Persentase jenis aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi Sekretariat DPRD meliputi : penyelenggaraan hubungan masyarakat (kegiatan hearing), kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok DPRD dan pelaksanaan reses. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, kunjungan kerja dalam daerah dan reses dilakukan untuk menyerap dan menghimpun aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya menjadi bahan dalam pelaksanaan tugas pokok DPRD yaitu membentuk Perda,

membahas anggaran dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian indikator persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 64,84% pada tahun 2016, terus meningkat menjadi sebesar 96,22 pada tahun 2018, namun turun menjadi sebesar 82,09% pada tahun 2019 dan semakin turun menjadi sebesar 79,15% pada tahun 2020. Masih rendahnya capaian indikator jenis aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan.

k. Persentase kode etik DPRD yang diimplementasikan

Kode etik DPRD adalah suatu ketentuan yang mengatur sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan yang ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD. Kode etik DPRD ditetapkan dengan Peraturan DPRD. Capaian indikator ini selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100% yang artinya semua butir yang diatur dalam Kode Etik DPRD dilaksanakan dan dipatuhi.

l. Persentase fasilitasi tugas DPRD yang tersedia

Fasilitasi tugas DPRD oleh Sekretariat DPRD meliputi : koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah DPRD dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Capaian indikator persentase fasilitasi tugas DPRD selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 95,89% pada tahun 2016 terus meningkat hingga sebesar 99,12% pada tahun 2020. Belum tercapainya target sesuai rencana disebabkan keterbatasan anggaran yang dialokasikan.

m. Persentase kerjasama yang disetujui

Salah satu tugas DPRD adalah membahas rencana kerjasama daerah yang akan dijalin oleh Pemerintah Daerah. Kerjasama

daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Namun, selama kurun waktu tahun 2016-2020 tugas ini belum dilaksanakan sehingga capaian indikator ini sebesar 0%

Capaian indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan fungsi Sekretariat DPRD dari tahun 2016 – 2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	75	78	80	83	81,25
2.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	76,54	79,23	84,22	84,08	75,01
3.	Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	%	77,46	79,27	88,4	91,99	82,33
5.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	%	52,17	58,42	64,26	60,26	56,93
6.	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	83,80	65,71	85,71	95,16	55,55
7.	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu	%	49,78	67,97	64,36	84,21	75,57
8.	Persentase hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	%	57,85	66,55	94,82	82,43	81,4
9.	Persentase anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	%	91,66	91,41	96,56	98,69	91,63
10.	Persentase jenis aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	%	64,84	83,85	96,22	82,09	79,15
11.	Persentase kode etik DPRD yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100
12.	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang tersedia	%	95,89	96,14	97,11	98,18	99,12
13.	Persentase kerjasama daerah yang disetujui	%	0	0	0	0	0

Sumber :Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

8. Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Pada bagian pemerintahan diunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain nilai EKPPD, Persentase Kecamatan yang memiliki tertib administrasi, persentase laporan SPM tepat waktu dan nilai rata rata SPM Kabupaten. Dari beberapa indikator tersebut, indikator yang menunjukkan kinerja sampai tahun 2020 dan kinerjanya termasuk baik meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian ditahun 2020 sebesar 81,75 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 80,91, dan Nilai Rata Rata SPM Kabupaten dengan capaian sebesar 80% berturut-turut selama tahun 2018 dan 2019.

Untuk koordinasi dan penyusunan kebijakan dibagian sosial, terdapat tiga indikator yang menjadi ukuran kinerja, yaitu persentase tempat ibadah yang aktif, persentase rekomendasi proposal bantuan sosial yang tepat sasaran, persentase program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Namun sampai dengan tahun 2020, ketiga indikator kinerja tersebut belum terlihat kinerjanya dikarenakan hasilnya masih belum tercatat. Pada bagian ekonomi, kinerja dalam lima tahun terakhir cukup baik dalam upaya koordinasi dan kebijakan pengendalian ekonomi, yaitu pada pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan kontribusi laba Perusda terhadap PAD dan persentase meningkatnya peran TPID. Namun ada satu indikator kinerja yang masih belum menunjukkan ketersediaan data yaitu ketaatan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan.

Kinerja dibagian organisasi ditunjukkan dengan indikator Nilai SAKIP Setda, indeks kepuasan masyarakat pada Setda Kab. Pemalang, persentase peningkatan inovasi pelayanan publik, dan persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional. Indikator nilai SAKIP Setda menunjukkan kinerja meningkat dari skor sebesar 9,43 ditahun 2018 menjadi 10,86 ditahun 2019, dan kaitannya dengan persentase peningkatan inovasi pelayanan publik kinerjanya pada tahun 2019 sebesar 17% lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Dari bagian protokoler dan bagian umum,

kinerjanya masih belum terlihat dilihat dari indikator penggunaan SOP keprotokoleran dan Indeks dokumentasi KDH dan WKDH yang datanya belum tersedia.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah secara umum digambarkan melalui indikator berikut di bawah ini.

Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks	Na	Na	Na	Na	Na
2.	Nilai EKPPD	Skor	2,9	2,9	3,18	3,18	3,18
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	77,05	75,85	78,53	80,91	81,75
4.	Nilai Rata Rata SPM Kabupaten	%	60	75	80	80	80
5.	Persentase Pengelolaan Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Tepat Waktu	%	Na	Na	Na	Na	100
6.	Persentase Kecamatan yang memiliki tertib administrasi	%	Na	Na	Na	Na	100
7.	Persentase Laporan SPM tepat waktu	%	Na	Na	Na	Na	66,67
8.	Persentase peningkatan dokumen kerjasama yang diterbitkan	%	6	17	30	23	21,73
9.	Persentase usulan Raperda yang dimasukkan dalam prolegda	%	88,5	79,31	79,71	100	100
10.	Persentase pengaduan dan perkara yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase Peraturan dan Keputusan Bupati yang diterbitkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100
12.	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase tempat ibadah yang aktif	%	100	100	100	100	100
14.	Persentase Rekomendasi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	proposal bantuan sosial yang tepat sasaran						
15.	Persentase program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	%	Na	Na	Na	Na	Na
16.	INFLASI	%	2,33	3,64	2,95	2,71	2,36
17.	Pertumbuhan kontribusi deviden Perusda terhadap PAD	%	12,07	129,80	0,03	30,66	5,67
18.	Persentase meningkatnya peran TPID	%	Na	45,45	78,57	87,5	87,5
19.	Persentase Ketaatan Perusahaan Dalam Pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan	%	Na	Na	Na	94,12	85,71
20.	Nilai SAKIP Setda	Skor	Na	55,22	60,84	61,20	61,20
21.	Persentase pengadaan secara elektronik	%	20	25	33	33	55,37
22.	Kualifikasi dan kompetensi SDM pengadaan PBJ	Orang	16	10	10	10	8
23.	Tingkat kematangan UKPBJ	Indeks	NA	NA	Level 2(esensi)	Level 2(esensi)	Level 2(esensi)
24.	Nilai SAKIP Pemda	Skor	55,06	58,69	63,63	65,81	65,81
25.	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Setda Kab. Pemalang	Skor	Na	Na	Na	Na	82,33
26.	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	100%	95%	100%	100%	100
27.	Nilai SAKIP Pemda Komponen Pelaporan	Skor	Na	9,15	9,43	10,86	10,86
28.	Inovasi Pelayanan Publik	%	Na	33	27	17	10
29.	Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan SOP	%	Na	Na	Na	Na	100
30.	Indeks dokumentasi KDH dan WKDH	Skor	Na	Na	Na	Na	100
31.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Na	Na	Na	Na	60,2

Sumber :Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020

9. Kewilayahan

Kinerja kecamatan di Kabupaten Pemalang secara umum ditunjukkan oleh 9 (sembilan) indikator. Namun untuk 4 (empat) kecamatan yang memiliki kelurahan, yaitu Pemalang, Taman, Petarukan dan Comal ditunjukkan oleh 10 (sepuluh) indikator. Capaian indikator kinerja di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Persentase capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kecamatan mempunyai peran yang strategis dalam merealisasikan pemungutan PBB sesuai target yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan Kecamatan untuk meningkatkan realisasi pemungutan PBB antara lain sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat agar taat pajak, rapat evaluasi pencapaian target pemungutan PBB secara rutin, monitoring pelaksanaan pemungutan PBB ke desa/kelurahan dan pendampingan kepada desa/kelurahan yang tingkat realisasi pemungutan PBB nya rendah.

Berikut capaian indikator persentase capaian PBB selama kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2.74 Persentase Capaian PBB (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	65,25	80,04	70,69	66,93	55,74
2	Warungpring	70	70	70	70	66,67
3	Pulosari	100	100	100	100	75
4	Belik	74,58	92,00	82,58	92,30	80,3
5	Watukumpul	80	80	80	80	88,72
6	Bodeh	67,21	73,46	56,23	65,27	72
7	Bantarbolang	75,03	80,48	80,39	79,86	56,44
8	Randudongkal	64	58	59	58	68
9	Pemalang	75,09	80,7	72,4	67,36	68,88
10	Taman	73,59	76,73	76,55	77,72	75,16
11	Petarukan	75	75	75	75	65,78
12	Ampelgading	82,3	73,24	80,59	86,35	78
13	Comal	55,26	68,53	71,32	75,72	65,62
14	Ulujami	69,32	64,37	65,32	66,09	68
	Rata-rata	73,33	76,61	74,29	75,76	70,31

Sumber : Kecamatan, 2021

Rata-rata persentase capaian PBB dalam kurun waktu tahun 2016-2020 berfluktuasi yaitu sebesar 73,33% pada tahun 2016 dan

menjadi sebesar 70,31% pada tahun 2020. Meskipun persentase capaian PBB cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditentukan, sehingga diperlukan upaya dari Kecamatan untuk meningkatkan realisasi pemungutan PBB sesuai dengan target.

Beberapa kendala dalam pemungutan PBB antara lain :

- 1) Belum tertibnya administrasi perpajakan dimana sering terjadi kesalahan administrasi, baik yang menyangkut objek pajak maupun subyek pajak.
- 2) Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang baku dan target yang harus dicapai setiap tahunnya.
- 3) Masih kurangnya koordinasi antara kecamatan dengan desa/kelurahan dalam melakukan penagihan terhadap wajib pajak.
- 4) Penyampaian SPPT yang terhambat disebabkan adanya SPPT ganda untuk satu wajib pajak/satu objek pajak dan masih banyak alamat wajib pajak yang tidak diketahui.

Pada tahun 2020 capaian PBB turun menjadi sebesar 68,96%, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, sehingga kemampuan membayar PBB juga menurun.

b. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani

Pengaduan masyarakat penting bagi Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan kekurangan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berikut capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2.75 Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	100	100	100	100	100
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	100	100	100	100	100



No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	100	100	100	100	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	100	100	100	100	100
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	100	100	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan, 2021

Rata-rata capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

c. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, terdapat 30 (tiga puluh) kewenangan yang dilimpahkan. Berikut capaian indikator persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2.76 Persentase Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
2	Warungpring	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
3	Pulosari	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4	Belik	100	76,67	76,67	80,00	80,00
5	Watukumpul	100	80	80	80	80
6	Bodeh	63,33	63,33	70	70	70
7	Bantarbolang	100	73,33	73,33	76,66	76,67
8	Randudongkal	80	76,67	80	83,33	80
9	Pemalang	66,67	36,67	40	40	43,33
10	Taman	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67
11	Petarukan	40	50	76,67	76,67	73,33
12	Ampelgading	36,67	43,33	53,33	66,67	66,67
13	Comal	63,33	63,33	53,33	53,33	23,33
14	Ulujami	40	46,67	53,33	66,67	86,67

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
	Rata-rata	62,62	56,90	60,24	62,86	61,90

Sumber : Kecamatan, 2021

Rata-rata capaian indikator persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 62,62% pada tahun 2016 dan menjadi sebesar 61,90% pada tahun 2020. Meskipun capaian indikator persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari perangkat daerah terkait.

Pelayanan publik yang tersedia di Kecamatan adalah penyediaan dan informasi pemerintahan, pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan pelayanan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati terhadap Camat. Adapun capaian pelayanan publik yang tersedia di kecamatan selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 54,21% pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 53,3% pada tahun 2017, meningkat menjadi sebesar 53,41% pada tahun 2018, meningkat menjadi sebesar 87,62% pada tahun 2019 dan turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 87,30%. Rendahnya capaian pada tahun 2016 sampai 2018 disebabkan belum adanya data pemerintahan dipublikasi.

d. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, agar aspirasi masyarakat dapat terserap dan pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut capaian indikator tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2.77 Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	74	82	85	89	91,2
2	Warungpring	93	93	93	94	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	63	65	70	75	85
7	Bantarbolang	99,25	99,01	98,52	99,10	90
8	Randudongkal	100	100	100	100	100
9	Pemalang	99,34	99,43	100	100	100
10	Taman	80	80	80	80	80
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	90	95	97	97	97
13	Comal	93,75	100	100	100	100
14	Ulujami	85	85	90	90	82,5
	Rata-rata	91,24	85,94	93,82	94,58	94,69

Sumber : Kecamatan, 2021

Rata-rata capaian indikator tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 91,24% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 94,69% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan.

e. Persentase lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina

Adapun jenis Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). Mengingat pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan tersebut maka perlu adanya pembinaan oleh kecamatan.

Berikut capaian indikator persentase Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina selama kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.78 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Dibina (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	66,67	66,67	83,33	83,33	83,33
2	Warungpring	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
3	Pulosari	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4	Belik	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
5	Watukumpul	50	50	66,67	66,67	66,67
6	Bodeh	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
7	Bantarbolang	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
8	Randudongkal	66,67	100	83,33	83,33	83,33
9	Pemalang	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
10	Taman	50	50	50	50	50
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	33,33	66,67	66,67	83,33	83,33
13	Comal	83,33	83,33	83,33	83,33	50
14	Ulujami	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
	Rata-rata	72,62	77,38	78,57	79,76	77,38

Sumber : Kecamatan, 2021

Rata-rata capaian indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dibina selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 72,62% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 77,38% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Semua kecamatan pada dasarnya sudah membina Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan karena masih ada beberapa kecamatan yang capaiannya dibawah 70%.

f. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi

Adapun jenis lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan meliputi RT, RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K. Agar dapat berperan secara optimal, lembaga kemasyarakatan perlu mendapat fasilitasi dari kecamatan.

Berikut capaian indikator persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi selama kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.79 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Difasilitasi (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	66,67	66,67	66,67	83,33	83,33
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
5	Watukumpul	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
6	Bodeh	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
7	Bantarbolang	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
8	Randudongkal	66,67	100	83,33	83,33	66,67
9	Pemalang	66,67	83,33	83,33	100	100
10	Taman	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	50	50	50	50	50
	Rata-rata	76,19	79,76	78,57	80,95	79,76

Sumber : Kecamatan, 2021

Rata-rata capaian indikator persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 76,19% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 79,76% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Semua kecamatan pada dasarnya sudah memfasilitasi lembaga kemasyarakatan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan karena masih ada beberapa kecamatan yang capaiannya dibawah 70%

g. Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik

Berdasar Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Dengan adanya alokasi dana kelurahan sangat membantu dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan di kelurahan. Kondisi jalan lingkungan di kelurahan masih banyak yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas. Berikut capaian

indikator persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik selama kurun waktu tahun 2016-2020 :

Tabel 2.80 Persentase Jalan Kewenangan Kelurahan Kondisi Baik (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemalang	52,28	54,98	56,73	59,84	65,22
2	Taman	46	52	56	60	64
3	Petarukan	10	15	30	25	25
4	Comal	65	65	70	75	90
	Rata-rata	43,32	46,74	53,18	54,96	61,06

Sumber : Kecamatan 2021

Rata-rata capaian indikator jalan kewenangan kelurahan kondisi baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 43,32% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 61,06% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya dana kelurahan yang dialokasikan dan masih kurangnya dukungan dari perangkat daerah terkait.

h. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani

Salah satu tugas Camat adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi : (1) sinergitas dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), dan instansi vertikal tingkat kecamatan, (2) harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan (3) sinergitas dengan Satpol PP. Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui rapat maupun koordinasi secara langsung.

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum. Berikut capaian indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.81 Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	87	90	96	96	98
2	Warungpring	80	80	90	90	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	90	85	92	97	97
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	94	96	98	98	98
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	90	90	90	90	95
13	Comal	62,5	75	100	95	100
14	Ulujami	90	90	90	90	100
	Rata-rata	92,39	93,29	96,86	96,86	99,14

Sumber : Kecamatan 2021

Rata-rata capaian indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 92,39% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 99,14% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, Camat selalu berkoordinasi dengan Polsek, Koramil, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Satpol PP.

i. Jumlah potensi konflik

Camat selaku kepala kecamatan harus dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dengan baik dan efektif. Adapun penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan meliputi : (1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, (2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (3) pembinaan kerukunan, (4) penanganan konflik sosial, (5) pengembangan kehidupan demokrasi, dan (6) pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Camat berkoordinasi dengan Bakesbangpol dan Forkompimcam (Kapolsek

dan Danramil) baik lewat rapat koordinasi maupun dengan koordinasi langsung. Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi ancaman konflik yang ada agar tidak pecah menjadi konflik. Konflik adalah pertikaian antar warga (antar etnis, antar wilayah desa, antar simpatisan parpol, antar pelajar, antar umat beragama) dan unjuk rasa (politik, ekonomi, agama) yang terjadi akibat perbedaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kecamatan. Berikut jumlah potensi konflik yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.82 Jumlah Potensi Konflik (kasus)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	0	0	0	0	0
2	Warungpring	0	0	0	0	0
3	Pulosari	2	2	2	2	3
4	Belik	0	0	0	0	6
5	Watukumpul	0	0	0	0	0
6	Bodeh	0	0	0	0	0
7	Bantarbolang	0	0	0	0	0
8	Randudongkal	2	2	2	2	2
9	Pemalang	2	0	1	2	0
10	Taman	0	0	0	0	0
11	Petarukan	2	2	2	3	3
12	Ampelgading	0	0	0	0	0
13	Comal	0	1	0	0	0
14	Ulujami	0	0	0	0	0
	Jumlah	8	7	7	9	14

Sumber : Kecamatan 2021

Pada tahun 2020, di Kecamatan Pulosari, Belik, Randudongkal dan Petarukan masih terdapat potensi konflik. Potensi Konflik ini terjadi antar desa akibat adanya perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Namun, potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.

j. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Suatu desa dikategorikan bertata kelola pemerintahan baik apabila : (1) penetapan dokumen perencanaan desa tepat waktu, (2)



ketersediaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (3) keterisian buku administrasi pemerintahan desa, (4) laporan keuangan desa yang tepat waktu, (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas sesuai ketentuan, (6) terjaganya ketenteraman dan ketertiban. Berikut capaian indikator persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik selama kurun waktu tahun 2016-2020:

Tabel 2.83 Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik (%)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Moga	50	50	60	60	70
2	Warungpring	50	50	66,67	66,67	66,67
3	Pulosari	50	58,33	58,33	66,67	75
4	Belik	66,67	75	75	75	75
5	Watukumpul	60	60	66,67	66,67	73,33
6	Bodeh	57,89	57,89	63,16	63,16	63,16
7	Bantarbolang	58,82	64,71	64,71	70,59	88,24
8	Randudongkal	50	50	75	75	88
9	Pemalang	46,15	46,15	53,84	53,84	53,84
10	Taman	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
11	Petarukan	57,89	63,16	68,42	73,68	80
12	Ampelgading	56,25	62,5	68,75	75	75
13	Comal	70,59	76,47	82,35	88,23	52,94
14	Ulujami	55,56	55,56	61,11	61,11	61,11
	Rata-rata	52,88	55,74	62,47	64,72	66,63

Sumber : Kecamatan 2021

Rata-rata capaian indikator persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung meningkat, yaitu sebesar 52,88% pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga sebesar 66,63% pada tahun 2020. Meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari perangkat daerah terkait.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari indikator jumlah nilai investasi berskala nasional, di Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 255.359 Juta, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 438.206 juta. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (dalam Juta)	255.359	28.890	93.634	1.753.353	166.492

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Pemalang, 2021

2. Perhubungan

Capaian kinerja urusan Perhubungan dalam aspek daya saing daerah di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari indikator ketersediaan rambu-rambu lalu lintas, capaian kinerja pada tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan yang meningkat yaitu pada tahun 2014 sebesar 34% meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 56,23%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85 Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	37	44,50	46,47	54,4	56,23

Sumber : Dishub Kabupaten Pemalang, 2020

2.5. Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran untuk masing-masing Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Capaian Pembangunan Misi ke 1

Misi ke 1 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong” keberhasilan pelaksanaan misi ke 1 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 3 sasaran serta diukur melalui 3 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 seluruh indikator tercapai.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2020 sudah baik. Dari sebanyak 3 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya sudah tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86 Capaian Indikator Misi Ke 1 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
Misi 1 : Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong																
Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah																
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	83	100	85	99,49	87	99,49	90,00	114,36	Tercapai	110,54	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Bappeda	
	Nilai Lkjlp	nilai	CC	B	B	B	B	B	B	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Setda	
	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	90	100	90	100	95	100	95,00	105,26	Tercapai	105,26	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Bappeda	

*) Tercapai $X \geq 100\%$, Tidak Tercapai $100\% > X$,

**) Sangat Tinggi $X > 90\%$, Tinggi $90\% \geq X > 86,67\%$, Sedang $86,67\% \geq X > 83,33\%$, Rendah $83,33\% \geq X > 80\%$, Sangat Rendah $X \leq 80\%$

***) Sudah Tercapai $X > 100\%$, Akan Tercapai $100\% > X > 80\%$, Perlu Upaya Keras $X \leq 80\%$



2. Capaian Pembangunan Misi ke 2

Misi ke 2 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak” keberhasilan pelaksanaan misi ke 2 tersebut dicapai melalui 4 tujuan dan 7 sasaran serta diukur melalui 18 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 14 indikator yang tercapai dan 4 indikator tidak tercapai, indikator yang tidak tercapai yaitu Angka Melanjutkan SMP/MTs Harapan lama sekolah. Angka Melanjutkan SMP/MTs, Angka kunjungan ke perpustakaan dan Usia Harapan Hidup

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 18 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya masuk dalam kategori sangat tinggi.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2020 sudah baik. Dari sebanyak 18 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai, 5 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87 Capaian Indikator Misi Ke 2 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020		Capaian Akhir Target RPJMD		OPD	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status (**)		Status (***)
Misi 2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak															
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkeadilan															
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendidikan non formal	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,89	6,32	5,9	6,41	5,91	6,42	5,92	108,63	Tercapai	108,28	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	BPS
	Harapan lama sekolah	Tahun	11,71	11,91	11,86	11,94	12,01	11,95	12,60	99,50	Tidak Tercapai	94,76	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	BPS
	Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100,65	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan SMP/Mts	%	100	96,76	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan SD/MI	%	98,51	98,53	98,54	109,9	98,57	109,9	98,60	111,49	Tercapai	111,46	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan SMP/MTs	%	87,9	87,91	88	87,91	88,1	88,03	88,20	99,92	Tidak Tercapai	99,81	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kunjungan ke masyarakat ke perpustakaan	Angka kunjungan ke perpustakaan	%	4	4,07	4,25	4,82	4,5	1,53	4,75	34	Tidak Tercapai	32,21	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras	Dinpusarda
Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat															
Meningkatnya derajat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,06	73,11	73,15	73,35	73,25	73,23	73,35	99,97	Tidak Tercapai	99,84	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	BPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	112	66,94	108	50	104	51	100,00	150,96	Tercapai	196,08	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	9	7,5	8,5	5,58	8	4,69	7,50	141,38	Tercapai	159,91	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan	
	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	10	8,5	9,5	6,16	9	5,24	8,50	141,78	Tercapai	162,21	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,028	0,025	0,027	0,013	0,026	0,021	0,03	119,23	Tercapai	119,05	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Kesehatan	
	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,53	2,54	2,52	2,52	2,51	2,51	2,50	100,00	Tercapai	99,60	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Dinas DaldukKB PPPA	
Tujuan : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah																
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan partisipasi perempuan dalam ranah publik	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	84,87	85,89	85,21	86,03	85,55	85,81	85,89	100,30	Tercapai	99,91	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	BPS	
	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	69,79	71,17	70,25	75,95	70,71	80,08	71,17	113,25	Tercapai	112,52	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	BPS	
Tujuan : Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS																
Meningkatnya penanganan pemberian	Persentase PMKS yang tertangani	%	30,17	75,17	35,89	190,84	41,6	80,99	47,32	194,69	Tercapai	171,15	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Sosial	

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
jaminan sosial bagi PMKS																
Meningkatnya cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	%	85,23	98,55	88,94	99,79	92,65	99,87	96,35	107,79	Tercapai	103,65	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Disdukcattpil	
	Persentase Anak memiliki Akta Kelahiran	%	85	87,29	87	90,8	90	94,21	92,50	104,68	Tercapai	101,85	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Disdukcattpil	

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100% > X,

**) Sangat Tinggi X > 90%, Tinggi 90% ≥ X > 86,67%, Sedang 86,67% ≥ X > 83,33%, Rendah 83,33% ≥ X > 80%, Sangat Rendah X ≤ 80%

***) Sudah Tercapai X > 100%, Akan Tercapai 100% > X > 80% , Perlu Upaya Keras X ≤ 80%

3. Capaian Pembangunan Misi ke 3

Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “*Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran*” keberhasilan pelaksanaan misi ke 3 tersebut dicapai melalui 4 tujuan dan 8 sasaran serta diukur melalui 19 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 9 indikator yang tercapai dan 10 indikator tidak tercapai, indikator yang tidak tercapai yaitu produktivitas Kedelai, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengeluaran Perkapita, Persentase koperasi sehat, Persentase pertumbuhan IKM, Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Peningkatan wisatawan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penduduk miskin.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 19 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator masuk dalam kategori tinggi, sebanyak 1 indikator masuk dalam kategori rendah dan sebanyak 4 indikator masuk dalam kategori rendah.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 19 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 3 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88 Capaian Indikator Misi Ke 3 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran																
Tujuan : Meningkatkan tingkat kecukupan pangan masyarakat																
Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas	Produktivitas padi	kw/ha	57,65	62,51	57,67	61,54	57,69	63,04	57,71	109,27	Tercapai	109,24	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pertanian	
	produktivitas jagung	kw/ha	55,54	62,54	55,96	59,51	56,38	58,02	56,80	102,91	Tercapai	102,15	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pertanian	
	produktivitas Kedelai	kw/ha	13,5	13,6	14	13,11	14,5	14,31	15,00	98,69	Tidak Tercapai	95,40	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Dinas Pertanian	
Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang BISA (berimbang, beragam, sehat, dan aman)	Produksi Komoditas peternakan utama	kg	18.430.056	20.092.000	18.511.453	20.464.499	18.593.630	20.200.323,10	18.676.590,00	108,64	Tercapai	108,16	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pertanian	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	81,4	95,1	84,5	95,61	87,6	92,6	88,00	105,71	Tercapai	105,23	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Pangan	
Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan cadangan pangan	Ton	30	30	40	40	50	50	60,00	100,00	Tercapai	83,33	Tinggi	Akan Tercapai	Pangan	
	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi															

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020		Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)	
Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial di Kabupaten Pemalang	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	5,59	5,46	5,88	5,47	-0,66	5,48	-12,07	Tidak Tercapai	(12,04)	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras	BPS
	PDRB Per Kapita	Rp	13.126.062,66	17.981.169,94	13.770,552,34	14.055,349,85	14.446,686,46	12.332,137,76	15.156,018,76	85,36	Tidak Tercapai	81,37	Tinggi	Akan Tercapai	BPS
	Laju Inflasi	%	6,1 - 6,9	2,95	5,9 - 6,5	2,95	5,8 - 6,3	2,36	5,6 - 6,0	254,24	Tercapai	237,29	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	BPS
	Indeks Gini	Indeks	0,21	0,28	0,2	0,358	0,2	0,358	0,20	179,00	Tercapai	55,87	Rendah	Akan Tercapai	BPS
Meningkatnya kualitas serta produktivitas koperasi dan UMKM	Tingkat Pengeluaran Perkapita	Rp	8.038,267	8.186,000	8.347,741	8.546,000	8.669,129	8.461,000	9.002,890,00	97,60	Tidak Tercapai	93,98	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	BPS
	produksi perikanan tangkap	kg	16.202.724	17.194.460	16.526,778	16.973,640	16.857,314	18.096,881	17.194,460,00	107,35	Tercapai	94,77	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	kg	15.529.000	18.652.000	16.698,000	16.918,064	17.638,000	17.800,168	18.652,000,00	100,92	Tercapai	90,68	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Perikanan
	Persentase koperasi sehat	%	30	44,68	30	32,5	30	27,56	30,00	91,87	Tidak Tercapai	233,33	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Koperasi
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan IKM	%	6,4	7,3	6,7	6,92	7	-3,5	7,30	-50,00	Tidak Tercapai	(47,95)	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras	Perindustrian
	Persentase pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan	%	4,5	4,65	4,55	4,65	4,6	-3,49	4,65	-75,87	Tidak Tercapai	-	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras	BPS

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Capaian Tahun 2020		Capaian Akhir Target RPJMD			OPD	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
terhadap PDRB	perdagangan terhadap PDRB														
Meningkatnya kunjungan wisatawan	Peningkatan wisatawan	%	2,08	2,17	2,13	8,8	2,15	-28,84	2,17	-1341,40	Tidak Tercapai	(1.740,55)	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras	Disparpora
Tujuan : Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi pengangguran															
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7	6,87	6,93	6,15	6,87	7,64	6,87	88,79	Tidak Tercapai	93,09	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Tenaga Kerja
Tujuan : Menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang															
Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	16,9	15,4	16,04	15,41	15,9	16,02	15,40	99,25	Tidak Tercapai	96,13	Sangat Rendah	Perlu upaya keras	BPS

*) Tercapai $X \geq 100\%$, Tidak Tercapai $100\% > X$,

***) Sudah Tercapai $X > 100\%$, Akan Tercapai $100\% > X > 80\%$, Perlu Upaya Keras $X \leq 80\%$

*) Sangat Tinggi $X > 90\%$, Tinggi $90\% \geq X > 86,67\%$, Sedang $86,67\% \geq X > 83,33\%$, Rendah $83,33\% \geq X > 80\%$, Sangat Rendah $X \leq 80\%$

Capaian persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 96,13% dari target akhir RPJMD, walaupun capaiannya diatas 90% capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah, karena untuk menurunkan angka kemiskinan perlu upaya yang sangat keras mengingat kompleksnya penyebab kemiskinan.



4. Capaian Pembangunan Misi ke 4

Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “*Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah*” keberhasilan pelaksanaan misi ke 4 tersebut dicapai melalui 3 tujuan dan 3 sasaran serta diukur melalui 9 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat 7 indikator yang tercapai dan 2 indikator tidak tercapai, indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase jalan dalam kondisi baik dan Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, sebanyak dan sebanyak 3 indikator masuk dalam kategori rendah.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai. Dan 1 indikator termasuk dalam kategori perlu upaya keras.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 4 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89 Capaian Indikator Misi Ke 4 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Capaian Tahun 2020		Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)	
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	90	57,12	91	59,8	92	68,66	74,63	Tidak Tercapai	59,63	Rendah	Akan Tercapai	PUPR
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	98	100	99	99	100	100	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	PUPR
	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	65	65	70	70,05	73	73,04	100,05	Tercapai	97,39	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	PUPR
	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	%	95	92,88	100	96,21	100	86,2	86,20	Tidak Tercapai	85,45	Tinggi	Akan Tercapai	PUPR
	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%	68	69,78	69	71,07	70	72,16	103,09	Tercapai	101,63	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	PUPR
	Persentase RTLH yang ditangani	%	11,05	11,18	12,36	17,17	13,67	21,67	158,52	Tercapai	144,47	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	PUPR
Misi 4 : Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah														
Tujuan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang secara merata.														

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
Tujuan : Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat																
Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	2	2	1	1,41	0,5	1,36	0,10	-72,00	Tidak Tercapai	7,35	Sangat Rendah	Perlu Upaya Keras	Perumahan Pemukiman	
Tujuan : Meningkatkan kelestarian lingkungan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang kehidupan																
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase usaha yang memiliki ketaatan terhadap pencemaran air dan udara dari sumber tidak bergerak	%	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	DLH	

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100% > X,

**) Sangat Tinggi X > 90%, Tinggi 90% ≤ X < 86,67%, Sedang 86,67% ≤ X < 83,33%, Rendah 83,33% ≤ X < 80%, Sangat Rendah X ≤ 80%

***) Sudah Tercapai X > 100%, Akan Tercapai 100% > X > 80% , Perlu Upaya Keras X ≤ 80%

5. Capaian Pembangunan Misi ke 5

Misi ke 5 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “*Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati*” keberhasilan pelaksanaan misi ke 5 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 1 sasaran serta diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase penurunan konflik sosial, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 indikator tersebut tercapai.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 harus mendapatkan perhatian karena capaiannya termasuk dalam kategori sangat rendah..

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras , maka sampai dengan tahun 2020 perlu upaya keras dalam mencapainya, karena termasuk dalam kategori sudah tercapai

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 5 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90 Capaian Indikator Misi Ke 5 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati																
Tujuan : Meningkatkan toleransi dan hubungan beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam kehidupan masyarakat																
Terciptanya kehidupan beragama yang rukun dan damai	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	5	5	5	5	5	5	5	100	Tercapai	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Bakesbangpol

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100% > X,

**) Sangat Tinggi X > 90%, Tinggi 90% ≥ X > 86,67%, Sedang 86,67% ≥ X > 83,33%, Rendah 83,33% ≥ X > 80%, Sangat Rendah X ≤ 80%

***) Sudah Tercapai X > 100%, Akan Tercapai 100% > X > 80% , Perlu Upaya Keras X ≤ 80%



6. Capaian Pembangunan Misi ke 6

Misi ke 6 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah” keberhasilan pelaksanaan misi ke 6 tersebut dicapai melalui 3 tujuan dan 4 sasaran serta diukur melalui 4 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 2 indikator tercapai dan 2 indikator tidak tercapai.

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator masuk dalam kategori sangat tinggi, dan sebanyak 1 indikator masuk dalam kategori tinggi.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2019 sudah baik, dari sebanyak 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori sudah tercapai dan sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori akan tercapai.

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 6 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91 Capaian Indikator Misi Ke 6 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Akhir Target RPJMD					
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Status s.d 2020 (%)	Status (**)	Status (+++)	
Misi 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah															
Tujuan : Meningkatkan realisasi investasi yang didukung iklim investasi yang kondusif															
Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rupiah	734.604.689.677	584.491.011.981	739.604.689.677	2.327.904.533.716	744.604.689.677	2.494.396.941.717	749.604.689.677	335,00	Tercapai	332,76	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Penanaman Modal
Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik															
Meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Hasil Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Keuangan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Rata-rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik	Skor	B	B	B	B	B	B	B	100,00	Tercapai	100,00	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Setda

Tujuan : Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informasi guna menunjang pelayanan publik

Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hotspot	9	10	12	12	14	13	14,00	92,86	Tidak Tercapai	92,86	Sangat Tinggi	Akan Tercapai	Kominfo

*) Tercapai $X \geq 100\%$, Tidak Tercapai $100\% > X$.

**) Sangat Tinggi $X > 90\%$, Tinggi $90\% \geq X > 86,67\%$, Sedang $86,67\% \geq X > 83,33\%$, Rendah $83,33\% \geq X > 80\%$, Sangat Rendah $X \leq 80\%$

**) Sudah Tercapai $X > 100\%$, Akan Tercapai $100\% > X > 80\%$, Perlu Upaya Keras $X \leq 80\%$

7. Capaian Pembangunan Misi ke 7

Misi ke 7 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah “*Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat*” keberhasilan pelaksanaan misi ke 7 tersebut dicapai melalui 1 tujuan dan 1 sasaran serta diukur melalui 2 indikator, jika dibandingkan dengan target tahun 2020 seluruh indikator tercapai

Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD (tahun 2021) sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 2 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya masuk dalam kategori sangat tinggi.

Jika capaian RPJMD dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu sudah tercapai, akan tercapai, perlu upaya keras, maka sampai dengan tahun 2020 sudah baik, dari sebanyak 2 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk dalam kategori sudah tercapai

Secara lebih rinci capaian indikator misi ke 7 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92 Capaian Indikator Misi Ke 7 RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2018		2019		2020		Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2020			Capaian Akhir Target RPJMD			OPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		% Capaian	Status	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***)		
Misi 7 : Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat																
Tujuan : Menumbuhkembangkan Budaya Asli Kabupaten Pemalang sebagai kekayaan non ragawi dan Jati Diri Pemalang																
Meningkatnya kelestarian nilai-nilai Budaya, Seni, dan kekayaan budaya Asli Pemalang	Cakupan kelompok seni yang dibina	%	38	83	41	84,74	44	83,33	47,00	189,39	Tercapai	177,29	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		%	63	90	65	91,3	67	90,52	69,00	135,10	Tercapai	131,19	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

*) Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100% > X,

**) Sangat Tinggi X > 90%, Tinggi 90% ≥ X > 86,67%, Sedang 86,67% ≥ X > 83,33%, Rendah 83,33% ≥ X > 80%, Sangat Rendah X ≤ 80%

***) Sudah Tercapai X > 100%, Akan Tercapai 100% > X > 80% , Perlu Upaya Keras X ≤ 80%